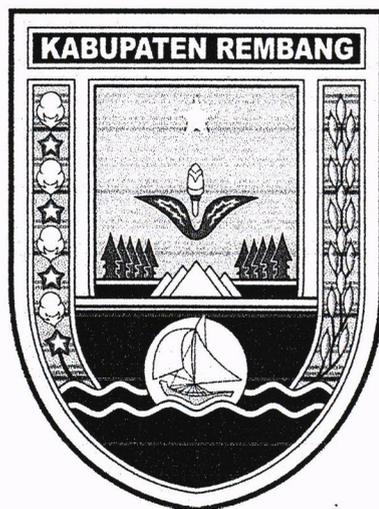


RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 2 Dan 8 Juli 2019



**TENTANG
RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (I)

DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG

RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

APBD TAHUN ANGGARAN 2018

Hari : Selasa
Tanggal : 2 Juli 2019
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. SIFAT RAPAT : Terbuka
- III. ACARA RAPAT :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;
3. Skors (untuk penyusunan pandangan umum fraksi);
4. Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;
5. Skors (untuk penyusunan jawaban bupati);

6. Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;
7. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. DRUPODO, M.Si.
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 6 orang
2. Fraksi Demokrat	: 7 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 4 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 7 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 2 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	<hr/> : 31 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 4 orang
2. Fraksi Demokrat	: 1 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 2 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 1 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 2 orang
7. Fraksi Harapan	: 1 orang
Jumlah	<hr/> : 14 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL. MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikumWr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda beserta Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;
- Camat Se Kabupaten Rembang;
- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat paripurna ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini Selasa tanggal 2 Juli 2019 kita dapat melaksanakan dan mengikuti Rapat Paripurna Pertama DPRD dalam membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 dengan keadaan sehat wal'afiat. Dan semoga atas ridlo-Nya pula, rapat paripurna DPRD hari ini dapat berjalan tertib dan lancar. Amiin.

Kami ucapkan selamat datang dan terimakasih kepada Saudara Bupati, Wakil Bupati, Anggota Forkopimda, rekan-rekan anggota serta segenap tamu undangan yang telah berkenan hadir memenuhi undangan Pimpinan DPRD.

Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 31 orang.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 107 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, bahwa rapat paripurna untuk menetapkan perda dan APBD dinyatakan sah dan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD.

Dengan memperhatikan jumlah fisik anggota yang hadir, dan ketentuan yang berlaku, maka rapat paripurna hari ini telah memenuhi kuorum.

Selanjutnya dengan mengucapkan “*Bismillahirrohmanirrohim*” tepat pukul 12.20 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati.

Sesuai hasil rapat Badan Musyawarah pada tanggal 27 Juni 2019, dan atas dasar Pasal 12 ayat (5) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, terdapat beberapa agenda dalam pelaksanaan rapat paripurna ini, dan untuk selengkapnya akan saya bacakan susunan acara sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;
3. Skors (untuk penyusunan pandangan umum fraksi);
4. Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;
5. Skors (untuk penyusunan jawaban bupati);
6. Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;
7. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya marilah kita masuki acara kedua yaitu Penjelasan Bupati atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018.

Kepada Saudara Bupati Rembang, dipersilahkan.

===== **PENJELASAN BUPATI** =====

➤ (*Penjelasan Bupati atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 terlampir*)

Terima kasih Sdr. Bupati atas penjelasannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Acara berikutnya yaitu pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018. Namun, perlu kita berikan waktu kepada masing-masing fraksi dalam menyusun pandangan umumnya. Untuk itu rapat paripurna saya skors selama 15 menit.

(Ketuk palu 1 kali)

Waktu yang diberikan kepada masing-masing fraksi telah habis, maka skors saya cabut, dan rapat kita lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Kita masuki acara keempat yaitu pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018.

Untuk kelancarannya, saya minta kepada juru bicara masing-masing fraksi menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Sdr. Muh. Anshori
2. Fraksi Demokrat : Sdr. Mugiyarto, S.T.
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdr. Ilyas
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : Sdr. Sustiyono

5. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya : Sdr. Puji Santoso,S.P.,M.H
6. Fraksi Karya Sejahtera : Sdr. H. Ismari,S.H.
7. Fraksi Harapan : Sdri. Nur Jannah

Selanjutnya secara berurutan, dimulai dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dipersilahkan.

===== PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI =====

➤ *(Pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 terlampir)*

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Acara selanjutnya yaitu Jawaban Bupati atas Pandangan umum Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018.

Namun sebelumnya, perlu kita berikan waktu kepada Saudara Bupati dalam menyusun jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi dimaksud.

Untuk itu, rapat paripurna saya skors selama 30 menit.

(Ketuk palu 1 kali)

Waktu yang diberikan kepada Saudara Bupati telah habis, maka skors saya cabut dan rapat kita lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Kita masuki acara keenam yaitu Jawaban Bupati atas Pandangan umum Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018.

Selanjutnya, kepada Saudara Wakil Bupati, waktu dan tempat dipersilahkan.

=== JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI

===

➤ *(Jawaban Bupati atas Pandangan umum Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 terlampir)*

Terimakasih Saudara Wakil Bupati atas jawabannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Dengan disampaikannya jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018, maka selesai sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Selesai rapat paripurna ini, pada hari ini juga akan dilanjutkan dengan Rapat Banggar dan TAPD dengan acara penjelasan lanjutan atas Raperda, diteruskan dengan rapat Banggar dan Pimpinan Komisi dengan acara strategi dan distribusi pembahasan Raperda. Adapun untuk rapat paripurna kedua dalam membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 jatuh pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019.

Kami segenap pimpinan DPRD, sekali lagi mengucapkan terimakasih kepada Saudara Bupati, Wakil Bupati, Anggota Forkopimda, reka-rekan anggota dan segenap tamu undangan yang telah mengikuti jalannya rapat hingga selesai, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan selama kami memimpin acara rapat paripurna ini.

Akhirnya, dengan mengucap "*Alhamdulillahirobbil 'alamin*" tepat pukul 12.30 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf bila ada kesalahan saya ketika memimpin rapat paripurna ini.

Sekian

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

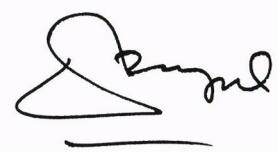
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,



H. MAJID KAMIL MZ

SEKRETARIS,



Drs. DRUPODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (I) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2018**

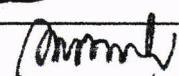
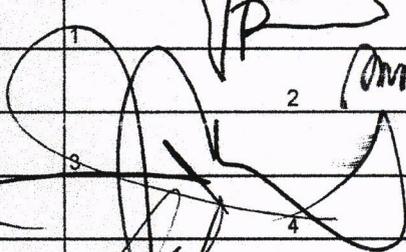
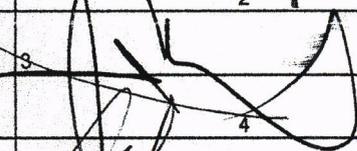
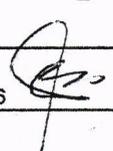
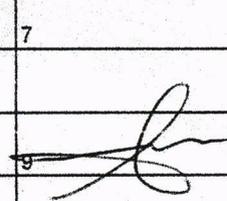
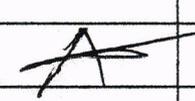
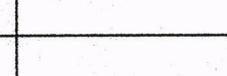
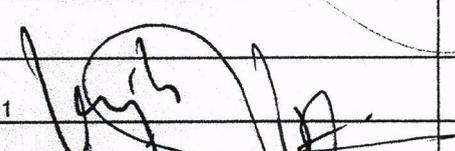
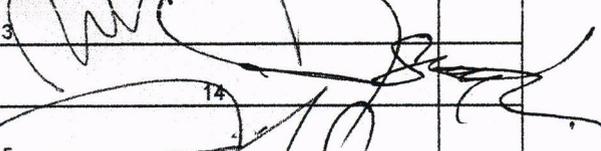
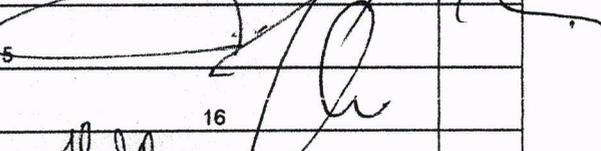
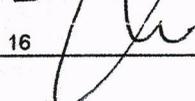
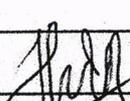
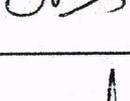
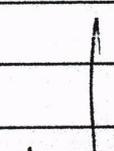
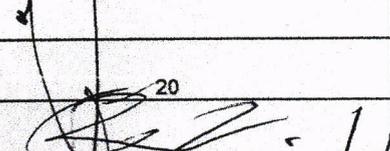
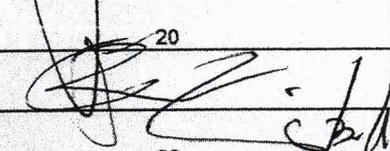
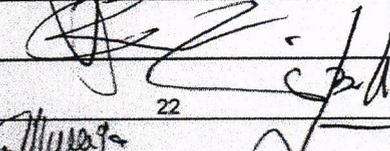
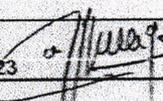
- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan
Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Pengantar Nota Keuangan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2018;
- LAMPIRAN III : Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi atas
Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2018;
- LAMPIRAN IV : Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum
Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

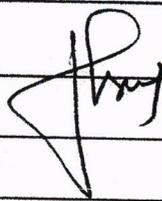
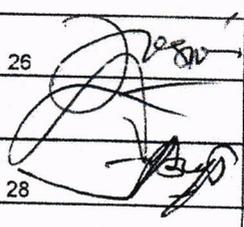
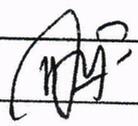
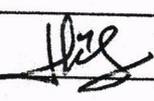
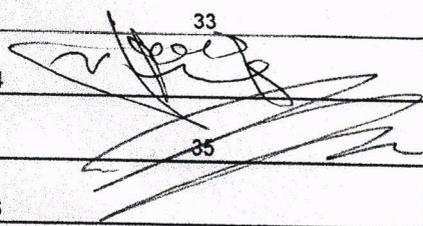
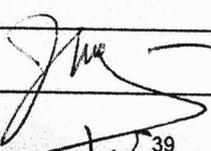
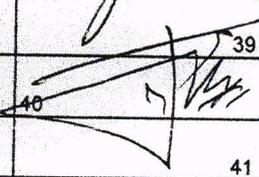
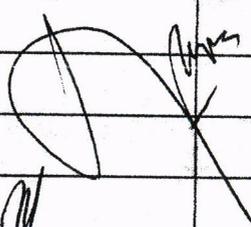
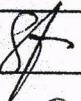
DAFTAR HADIR

**RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

HARI/TANGGAL : SELASA, 2 JULI 2019

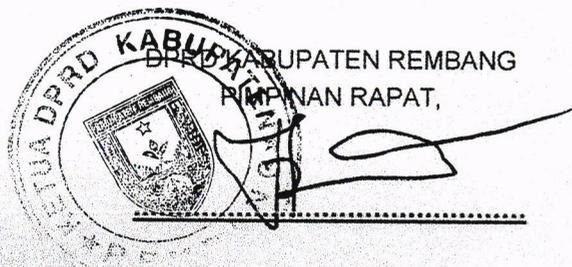
PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD		
2	SUGIHARTO	Anggota		
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota		
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota		
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota		
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota		
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota		
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota		
9	H. SUPADI	Anggota		
10	NUR HASYIM	Anggota		
	FRAKSI DEMOKRAT			
11	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD		
12	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H.	Anggota		
13	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota		
14	EKA SISWA KARTIKA	Anggota		
15	H. ISLAHUDDIN	Anggota		
16	H. HARNO, S.E.	Anggota		
17	MUGIYARTO, S.T.	Anggota		
18	MOHAMMAD HARIYADI	Anggota		
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD		
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota		
21	ILYAS	Anggota		
22	SHOLEH, B.A	Anggota		
23	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi.	Anggota		

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25 
26	JASMANI	Anggota	26 
27	WIDODO	Anggota	27
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28 
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29 
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30 
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31
32	SUSTIYONO	Anggota	32 
FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34 
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35
36	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37
FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38 
39	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39 
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40
41	ALI IMRON WAHYUDI	Anggota	41
FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42 
43	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43 
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44 
45	NUR JANNAH	Anggota	45 

Keterangan :

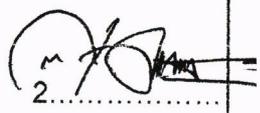
- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar,



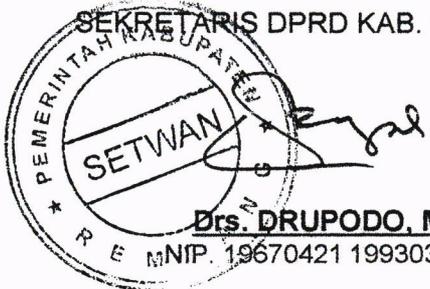
DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN
REMBANG TAHUN ANGGARAN 2018

HARI/TANGGAL : SELASA, 2 JULI 2019

PUKUL : 10.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	BAYU ANDRIYANTO, S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3	Kejaksaan Negeri Rembang	3.
4	<u>Silpi Yanti Zulfa, S.H., M.H.</u>	Pengadilan Negeri Rembang	4. 
5	<u>Bardan</u>	Dandim 0720 Rembang	5. 
6	<u>YOHAN SETIAJID</u>	M. Kepolisian Resort Rembang	6. 
7	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.
8	Drs. SUBAKTI	Sekretaris Daerah	8.

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



Drs. DRUPODO, M.Si
 NIP. 19670421 199303 1 009

**DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2018**

HARI/TANGGAL : SELASA, 2 JULI 2019
PUKUL : 10.00 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	MUSTHOCH	1
2	CAMAT KALIORI	Hayu	2
3	CAMAT SUMBER	Kanclan	3
4	CAMAT SULANG	Slamet Hayat	4
5	CAMAT BULU	Slamet Pijet	5
6	CAMAT PAMOTAN	Sulamin	6
7	CAMAT GUNEM	A. Sholichan	7
8	CAMAT SALE	SUBHAN	8
9	CAMAT LASEM		9
10	CAMAT PANCUR	Juhanto	10
11	CAMAT SEDAN	Dni Martopo	11
12	CAMAT SLUKE	Hanngadi	12
13	CAMAT KRAGAN		13
14	CAMAT SARANG		14

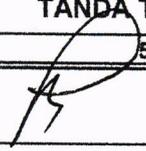
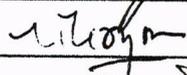
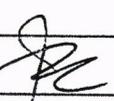
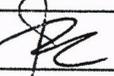
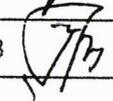
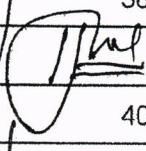
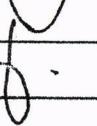
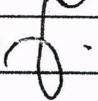
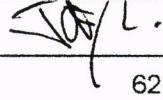
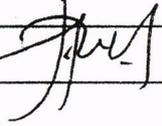
SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

 Drs. DRUPODO, M.Si
 NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR HADIR OPD
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2018

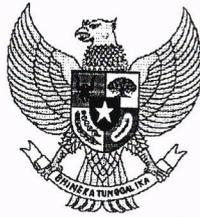
HARI/TANGGAL : SELASA, 2 JULI 2019
PUKUL : 10.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Hani Puranto		1
2	STAF AHLI BUPATI	Mentah		2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA	S. MUDLIF		5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN			8
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS			10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN			11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	Siti Teguh W.		13
14	BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN			14
15	BAG. UMUM			15
16	BPPKAD	M. W. S.		16
17	INSPEKTORAT	FAHRUDIN		17
18	BAPPEDA	M. L. S.		18
19	DINSOSP2KB	S. W. S.		19
20	B K D	Supatman		20
21	B P B D			21
22	DPU TATA RUANG	S. H. S.	DPU	22
23	DPKP/ DINPERKIM	goes tien narni	Kadin	23
24	DINAS KESEHATAN	Darmas		24
25	DINDIKPORA	A. Patih K.	Kabid.	25
26	DINPERINDAGKOP & UMKM	A. S. S.	Kadis	26
27	DINTANPAN	C. S. S.	Kadis	27
28	DINLUTKAN	Suparman	Kadis	28
29	DINKOMINFO	Wartono		29
30	DINAS PERHUBUNGAN			30
31	DINAS DIKCAPIL	Rasmin	Kabid	31

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
33	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Pranetya .	kebud.	33 
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Maryam	selisih	34 
35	KANTOR KESBANGPOLINMAS	KARTONO	Ka	35 
36	DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN	Winaryu K	sekjen	36 
37	DINAS PMPTSP NAKER	ANJOK	sek di	37 
38	RSUD dr. R. SUTRASNO	Sutartik	RSUD	38 
39	SATPOL PP	KIALUYO	Kasat	39 
40	TIM PKK KAB. REMBANG			40 
41	P D A M	M. AFFAN	Dir	41 
42	PERCETAKAN DAERAH			42 
43	PD. BANK PASAR			43
44	PT. MIGAS REMBANG ENERGY			44
45	BANK BNI 46			45
46	BANK JATENG CAB. REMBANG			46
47	BRI CAB. REMBANG			47
48	PD BPR BKK LASEM			48
49	PT. R B S J			49
50	APOTIK DAERAH			50
51	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA			51
52	DIPENDA PROPINSI			52
53	BPS KAB. REMBANG			53
54	RUMAH TAHANAN			54
55	PERHUTANI KPH MANTINGAN			55
56	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			56
57	KANTOR PERHUTANI SPH IV			57
58	KANTOR POS DAN GIRO			58
59	TELKOM REMBANG			59
60	PLN CAB. REMBANG			60
61	BAWASLU KAB. REMBANG	TOTOK S.	KETUA	61 
62	B P N KAB. REMBANG			62
63	KANTOR PAJAK			63
64	UP3AD (ASET DAERAH)			64
65	KANTOR PELABUHAN			65
66	KETUA KPU KAB. REMBANG	IORAL	KENIA	66 
67	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG	Sarif W.	sek kab	67 

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
70	Dewan Pendidikan	Ahmad Fururi	Ketua	70
71	Pencetakan Daerah	Pangga Gihombing	ka. Unit	71
72	FIC	Agus L	TA	72
73	Kodim	Agus	Int	73
74	KPU P.E.	Satrio X G	Seksi	74
75	Radio Citra Bahari FM	Masudi	Reporter	75
76	Syberx Mui. Com	Edu. S	Wartan	76
77	H. MWN LIC H		PEON	77
78				78
79				79
80				80
81				81
82				82
83				83
84				84
85				85
86				86
87				87
88				88
89				89
90				90
91				91
92				92
93				93
94				94
95				95
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
 PEMERINTAH KABUPATEN
 SETWAN
 Drs. DRUPODO, M.Si
 NIP. 19670421 199202 1 000



BUPATI REMBANG

**SAMBUTAN BUPATI REMBANG
PENYAMPAIAN PENGANTAR NOTA KEUANGAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN
REMBANG TAHUN ANGGARAN 2018**

Tanggal, 2 Juli 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yth. - Ketua DPRD Kabupaten Rembang ;
Ykh. - Para Ketua Komisi dan Anggota DPRD
Kabupaten Rembang;
Ykh. - Rekan-Rekan Forkopimda Rembang ;
Ykh. - Para Asisten Sekda dan Kepala OPD se Kab. Rembang
;
Ykh. - Para Camat dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur ***Alhamdulillah*** kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka "**Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018**" dalam keadaan sehat wal'fiat.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pada kesempatan yang baik ini perkenankan Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada Pimpinan dan segenap anggota DPRD serta jajaran eksekutif atas dukungan dan kerjasama yang baik selama ini dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rembang yang kita cintai.

Oleh karena itu pada setiap setelah akhir Tahun Anggaran kami menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan tahap akhir dari pada siklus anggaran yang memuat data realisasi pelaksanaan anggaran sebagai cerminan dari hasil-hasil yang telah dicapai dan sekaligus memberikan gambaran mengenai berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Penyampaian Pengantar Nota Keuangan ini merupakan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 sebagai kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dalam pasal 194 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dan dalam kesempatan ini pula, saya sampaikan sebuah kabar yang sangat membahagiakan, membanggakan bagi saya pribadi dan seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang, karena di penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 kita dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Selanjutnya sebagaimana kita ketahui bersama bahwa struktur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terdiri atas Pendapatan

Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Dari rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.816.656.942.094,00 (*Satu Triliun delapan ratus enam belas milyar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan puluh empat rupiah*) dapat direalisasikan sebesar Rp1.785.911.075.230,15 (*Satu triliun tujuh ratus delapan puluh lima milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh puluh lima ribu dua ratus tiga puluh koma lima belas rupiah*) atau 98,31%.

Untuk Belanja Daerah dari yang direncanakan sebesar Rp.1.912.100.759.618,00 (*Satu triliun sembilan ratus dua belas milyar seratus juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah*) realisasinya adalah sebesar Rp.1.814.662.262.214,36 (*Satu triliun delapan ratus empat belas milyar enam ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat belas koma tiga puluh enam rupiah*) atau 94,90% meliputi atas Belanja dan Transfer dengan rincian untuk Belanja dari yang direncanakan sebesar Rp1.561.292.212.018,00 (*Satu triliun lima ratus enam puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua belas ribu delapan belas rupiah*) realisasinya adalah sebesar Rp1.464.320.909.614,36 (*Satu triliun empat ratus enam puluh empat milyar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus empat belas koma tiga puluh enam rupiah*) dan Transfer dari yang direncanakan sebesar Rp.350.808.547.600,00 (*Tiga ratus lima puluh milyar delapan ratus delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*) realisasinya adalah sebesar Rp.350.341.352.600,00 (*Tiga ratus lima puluh milyar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah*).

Sedangkan pada kelompok Pembiayaan yang terdiri atas Penerimaan Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp108.161.445.444,00 (*Seratus delapan milyar seratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah*) realisasinya sebesar Rp.117.161.445.444,40 (*Seratus tujuh belas milyar seratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat koma empat puluh rupiah*) atau 108,32% dan Pengeluaran Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp12.717.627.920,00 (*Dua belas milyar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*) realisasinya sebesar Rp12.717.627.920,00 (*Dua*

belas milyar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) atau 100,00%.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Berdasarkan angka-angka realisasi yang tertuang dalam Pengantar Nota Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 maka terlihat bahwa pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang pada umumnya dapat berjalan lancar dan terdapat beberapa peningkatan.

Namun perlu dipahami, bahwa disamping kemajuan-kemajuan dan keberhasilan yang telah dicapai dan dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Rembang masih juga terdapat kekurangan-kekurangan dan hambatan yang semua itu harus dihadapi sebagai pelajaran dan tantangan demi tercapainya kesempurnaan tugas-tugas mendatang.

Oleh karenanya masih diperlukan kerja keras dengan segala kemampuan yang ada sehingga pada gilirannya dapat memberikan hasil yang lebih baik dan tahun depan kita dapat, dan harus dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Bersama Pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 ini dilampirkan buku-buku Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2018 dengan harapan untuk segera dibahas dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Demikian telah saya sampaikan Pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018. Dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

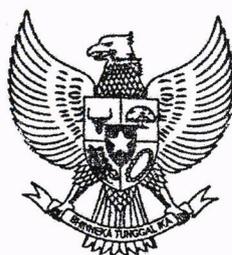
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam membangun Kabupaten Rembang yang lebih baik.

Sekian, terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bupati Rembang

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No.175 Semarang Telepon (024) 8660825, 8660826, 8660883 Faksimili (024) 8660884

Semarang, 28 Mei 2019

Nomor : 170 /S/XVIII.SMG/05/2019
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2018

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Di
Rembang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang TA 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "**Wajar Tanpa Pengecualian**" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan Aset Tetap belum tertib sebesar Rp18,39 miliar mengakibatkan Aset Tanah sebesar Rp3,10 miliar, Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp203,99 juta dan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp12,80 miliar tidak diyakini kewajarannya; dan
- b. Pengelolaan Aset Tanah hasil reklamasi di Pelabuhan Tanjung Bonang tidak tertib mengakibatkan aset hasil reklamasi seluas 183.024 m² tidak dapat segera diproses penerbitan sertifikat HPL nya serta potensi pendapatan sebesar Rp32,93 miliar atas penguasaan tanah hasil reklamasi oleh pihak ketiga tanpa adanya perjanjian;

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan agar memerintahkan:

- a. Memerintahkan Sekretaris Daerah, Kepala BPPKAD dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi aset dan menelusuri aset-aset tersebut dan mengakomodir pencatatannya di KIB dan Neraca; dan
- b. Segera menyelesaikan permasalahan pihak ketiga yang terlibat dalam pelaksanaan proses reklamasi dan termasuk nilai klaim dari masing-masing pihak ketiga tersebut dan memerintahkan Sekretaris Daerah menyusun kerjasama pemanfaatan atas aset hasil reklamasi terhadap pihak-pihak yang menguasai.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain kekurangan volume pekerjaan dalam pelaksanaan Belanja Modal pada lima Organisasi Perangkat Daerah sebesar Rp2,09 miliar mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1,94 miliar dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp153,54 juta.

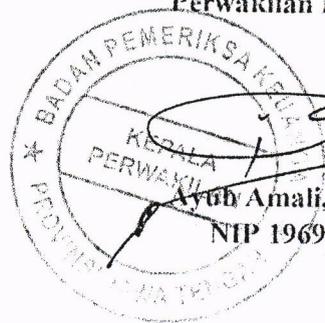
Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Rembang agar memerintahkan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1,94 miliar dengan penyetoran ke Kas Daerah serta memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp153,54 juta pada saat pelunasan pembayaran atas sisa pekerjaan yang belum dibayarkan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 60A/LHP/XVIII.SMG/05/2019, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 60B/LHP/XVIII.SMG/05/2019, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 60C/LHP/XVIII.SMG/05/2019 masing-masing bertanggal 23 Mei 2019.

Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, DPRD menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai kewenangannya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Kepala,



Ayub Amali, S.E., M.M., Ak., CA.
NIP 19690321 199603 1 002

Tembusan:

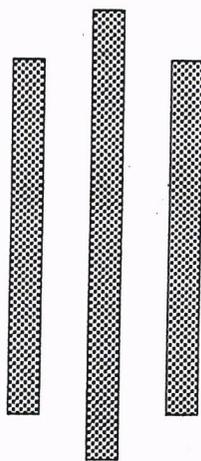
1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Rembang.



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

P E N G A N T A R
NOTA KEUANGAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG



TAHUN ANGGARAN 2018



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PENGANTAR NOTA KEUANGAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2018

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

- Yth. Saudara Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Yth. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;
- Yth. Saudara Staff Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Camat dan Hadirin yang berbahagia.

Mengawali sambutan ini, marilah terlebih dahulu kita menyampaikan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita sehingga dapat bertemu dalam Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pada kesempatan yang baik ini perkenankan Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan segenap anggota DPRD serta jajaran eksekutif atas dukungan dan kerjasama yang baik selama ini dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan untuk kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rembang yang kita cintai.

Oleh karena itu pada setiap akhir Tahun Anggaran kami menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan tahap akhir dari pada siklus anggaran yang memuat data realisasi pelaksanaan anggaran sebagai cerminan dari hasil-hasil yang telah dicapai dan sekaligus memberikan gambaran mengenai berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 .

Penyampaian Pengantar Nota Keuangan ini merupakan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 sebagai kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dalam pasal 101 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dan dalam kesempatan ini pula, saya sampaikan sebuah kabar yang sangat membahagiakan, membanggakan bagi saya pribadi dan seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang, karena di penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 kita dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Selanjutnya sebagaimana kita ketahui bersama bahwa struktur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Dari rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp1.816.656.942.094,00 dapat direalisasikan sebesar Rp1.785.911.075.230,15 atau 98,31%. Untuk Belanja Daerah dari yang direncanakan sebesar Rp1.912.100.759.618,00 realisasinya adalah sebesar Rp1.814.662.262.214,36 atau 94,90% meliputi

atas Belanja dan Transfer dengan rincian untuk Belanja dari yang direncanakan sebesar Rp1.561.292.212.018,00 realisasinya adalah sebesar Rp1.464.320.909.614,36 dan Transfer dari yang direncanakan sebesar Rp.350.808.547.600,00 realisasinya adalah sebesar Rp.350.341.352.600,00

Sedangkan pada kelompok Pembiayaan yang terdiri atas Penerimaan Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp108.161.445.444,00 realisasinya sebesar Rp.117.161.445.444,00 atau 108,32% dan Pengeluaran Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp12.717.627.920,00 realisasinya sebesar Rp12.717.627.920,00 atau 100,00%

Berikut ini kami sampaikan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 :

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4	PENDAPATAN - LRA	1.816.656.942.094,00	1.785.911.075.230,15	98,31
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	304.351.906.094,00	296.676.436.263,15	97,48
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	96.286.250.000,00	100.438.352.553,00	104,31
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	22.858.499.000,00	21.441.590.432,00	93,8
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	17.679.000.000,00	18.775.303.058,00	106,2
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	167.528.157.094,00	156.021.190.220,15	93,13
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.454.849.116.000,00	1.432.266.688.947,00	98,45
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	922.884.425.000,00	902.171.379.111,00	97,76
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	26.359.122.000,00	20.192.268.635,00	76,60
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	20.498.948.000,00	20.819.418.859,00	101,56
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	771.584.367.000,00	771.584.367.000,00	100,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	104.441.988.000,00	89.575.324.617,00	85,77
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	406.778.201.000,00	398.053.997.887,00	97,86
4.2.2.3	Dana Penyesuaian - LRA	406.778.201.000,00	398.053.997.887,00	97,86
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	95.000.000.000,00	105.216.144.949,00	110,75
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	95.000.000.000,00	105.216.144.949,00	110,75
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA	30.186.490.000,00	26.825.167.000,00	88,86
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	30.186.490.000,00	26.825.167.000,00	88,86
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	57.455.920.000,00	56.967.950.020,00	99,15
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	57.455.920.000,00	56.967.950.020,00	99,15
5	BELANJA	1.561.292.212.018,00	1.464.320.909.614,36	93,79
5.1	BELANJA OPERASI	1.210.071.952.273,00	1.154.872.403.719,36	95,44
5.1.1	Belanja Pegawai	847.959.027.491,75	825.667.808.529,16	97,37
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	289.894.369.366,25	263.637.636.747,20	90,94
5.1.3	Belanja Bunga	1.451.355.415,00	1.468.870.443,00	101,21

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.1.5	Belanja Hibah	61.787.200.000,00	55.764.388.000,00	90,25
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	8.980.000.000,00	8.333.700.000,00	92,80
5.2	BELANJA MODAL	350.720.259.745,00	309.448.505.895,00	88,23
5.2.1	Belanja Modal Tanah	7.475.114.000,00	7.406.104.110,00	99,08
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.989.838.313,00	46.462.284.728,00	89,37
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	110.031.939.250,00	94.860.823.159,00	86,21
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	171.523.136.204,00	152.529.881.164,00	88,93
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.700.231.978,00	8.189.412.734,00	84,42
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	500.000.000,00	0,00	0,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	0,00	0,00
6	TRANSFER	350.808.547.600,00	350.341.352.600,00	99,87
6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	10.765.819.900,00	10.765.819.900,00	100,00
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	8.449.970.000,00	8.449.970.000,00	100,00
6.1.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2.315.849.900,00	2.315.849.900,00	100,00
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	340.042.727.700,00	339.575.532.700,00	99,86
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	338.951.771.700,00	338.601.771.700,00	99,90
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.090.956.000,00	973.761.000,00	89,26
	SURPLUS / (DEFISIT)	-95.443.817.524,00	-28.751.186.984,21	30,12
7	PEMBIAYAAN			
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	108.161.445.444,00	117.161.445.444,40	108,32
7.1.1	Penggunaan SILPA	108.161.445.444,00	117.161.445.444,40	108,32
7.1.4	Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.717.627.920,00	12.717.627.920,00	100,00
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	10.422.000.000,00	10.422.000.000,00	100,00
7.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	2.256.548.000,00	2.256.548.000,00	100,00
7.2.7	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.2.8	Restitusi	39.079.920,00	39.079.920,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	95.443.817.524,00	104.443.817.524,40	109,43
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	75.692.630.540,19	0,00

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Berdasarkan angka-angka realisasi dan penjelasan secara garis besar yang tertuang dalam Pengantar Nota Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 maka terlihat bahwa pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang pada umumnya dapat berjalan lancar dan terdapat beberapa peningkatan.

Namun perlu dipahami, bahwa disamping kemajuan-kemajuan dan keberhasilan yang telah dicapai dan dinikmati oleh masyarakat Kabupaten

Rembang masih juga terdapat kekurangan-kekurangan dan hambatan yang semua itu harus dihadapi sebagai pelajaran dan tantangan demi tercapainya kesempurnaan tugas-tugas mendatang.

Oleh karenanya masih diperlukan kerja keras dengan segala kemampuan yang ada sehingga pada gilirannya dapat memberikan hasil yang lebih baik dan tahun depan kita dapat, dan harus dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Bersama Pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 ini dilampirkan buku-buku Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2018 dengan harapan untuk segera dibahas dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam rangka membangun Kabupaten Rembang.

Wassalamu'allaikum Wr. Wb.





PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RAPERDA PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Selasa , 02 Juli 2019

Dibacakan oleh : MOCH. ANSORI, SH

Assalamu a'laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.....

*Alhamdulillah Robbil a'lamiin, asholatu wassalamu a'la Sayyidina Wamaulana
Muhammadin, wa'ala alihi wosohbihi ajma'iin..., Amma ba'du ...*

Yang kami hormati :

- => Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- => Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- => Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- => sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala

Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan
para Camat dilingkungan Kabupaten Rembang

=> Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf

=> Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan,
dan semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian Pemandangan Umum ini, terlebih dahulu marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ILAHI ROBBI , atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan kepada kita, sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir pada Rapat Paripurna DPRD ini, dalam keadaan sehat Wal afiat.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan nabi besar kita, MUHAMMAD SAW, para shahabat, dan seluruh keluarganya.

Pada kesempatan yang baik ini, dan juga masih dalam suasana di bulan syawal , kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , mengnyampaikan Selamat hari raya Fitri, Minal a'idin wal faizin , mohon maaf lahir dan bathin atas semua kesalahan dan khilaf yang pernah ada.

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan sidang, dan segenap Sidang Dewan, yang kami Hormati...

Mengawali penyampaian Pemandangan umum kami, terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang tahun 2018, yang Nota Keuangannya telah disampaikan oleh sdr. Bupati , pada rapat paripurna beberapa menit yang lalu, tepatnya hari ini Selasa, tanggal 02 Juli 2019, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang , yang telah bekerja keras, sehingga dari hasil Pemeriksaan audit BPK atas penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018, berhasil mendapatkan predikat Opini WTP. Kami juga memberikan apresiasi , atas peningkatan capaian realisasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 ini , yakni mencapai 94,90 % , progress tersebut sudah meningkat capaiannya , bila dibanding dengan realisasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017, yaitu hanya sebesar 92,88 %. Meskipun sampai saat ini, masih banyak hal yang belum dapat memenuhi harapan masyarakat luas , kami dari Fraksi Patrai Persatuan Pembangunan tetap selalu memberikan dorongan, dengan harapan agar, untuk capaian realisasi pelaksanaan APBD tahun berjalan ini , dapat meningkat lebih baik lagi, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat dapat segera tercukupi.

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati...,

Sehubungan dengan Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 ini , kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, untuk kepentingan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang , menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut :

1. Terkait dengan hasil LHP BPK atas Laporan keuangan Pemkab Rembang Tahun 2018, bahwa dari hasil Pemeriksaan BPK tersebut, Pemkab Rembang telah berhasil mendapatkan predikat opini WTP yang pertama kali, meskipun masih ada catatan-catatan kekurangan dalam LHP BPK , diantaranya masih ditemukan beberapa kelemahan tentang pengendalian internal , dan juga adanya temuan tentang ketidak patuhan terhadap Peraturan perundang-undangan yang ada. Maka kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, mendorong dan meminta kepada Pemkab Rembang, agar selalu meningkatkan kinerja yang lebih serius dan melakukan langkah-langkah strategis, agar predikat opini WTP dapat dipertahankan, dan di tahun mendatang Pemkab Rembang mendapatkan penilaian yang lebih baik lagi.

2. Terkait dengan LKPJ Bupati dan LPP APBD tahun 2018 , dari hasil audit BPK , ditemukan adanya catatan penilaian LHP BPK dalam dokumen LKPJ Bupati dengan LPP APBD tahun 2018 diantaranya :
 - a. Di dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dari 6 urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan Pemkab Rembang , rata-rata realisasi penyerapan anggarannya mencapai 92,13 % , namun masih ada yang realisasinya di bawah 90 % , yakni contoh bidang perumahan Rakyat dan Permukiman . Dari indikator yang sudah diterapkan pada Urusan Wajib Pelayanan dasar ada 25 indikator kinerja , namun hasil yang mencapai target 11 indikator , 13 indikator yang tidak berhasil , dan 1 indikator yang tidak tersedia informasi. Dari data tersebut menunjukkan bahwa, kinerja Pemkab Rembang pada Urusan wajib pelayanan dasar masih kurang memuaskan. Dan data hasil Laporan semacam ini , juga terdapat pada dokumen LKPJ , pada 18 Bidang Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar , demikian juga terdapat pada 6 bidang urusan Pilihan . dari data tersebut disimpulkan bahwa , tidak optimalnya penyerapan anggaran dan tidak tercapainya indicator target, disebabkan karena adanya perencanaan yang kurang matang , kurang jelas dan tidak terukur, dan mungkin karena lemahnya controlling yang dilakukan top level dan middle lever manager dari OPD terkait. Sehubungan dengan hal tersebut kami dari F-PPP meminta agar semua kelemahan yang ada kedepan dapat diperbaiki.

 - b. Untuk selanjutnya setelah Silpa APBD Tahun anggaran 2018 sudah dipastikan , mohon agar Rancangan APBD Perubahan Tahun anggran 2019 segera diajukan untuk segera dilakukan Pembahasan.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2018. Akhirnya mari kita mohon pada ALLAH SWT, semoga kita selalu diberikan petunjuk, kemudahan dan kelancaran dalam beraktifitas , sehingga upaya dan usaha kita, mendapatkan hasil yang bermanfaat untuk masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Trima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya.....

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh....

Rembang , 02 Juli 2019

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA

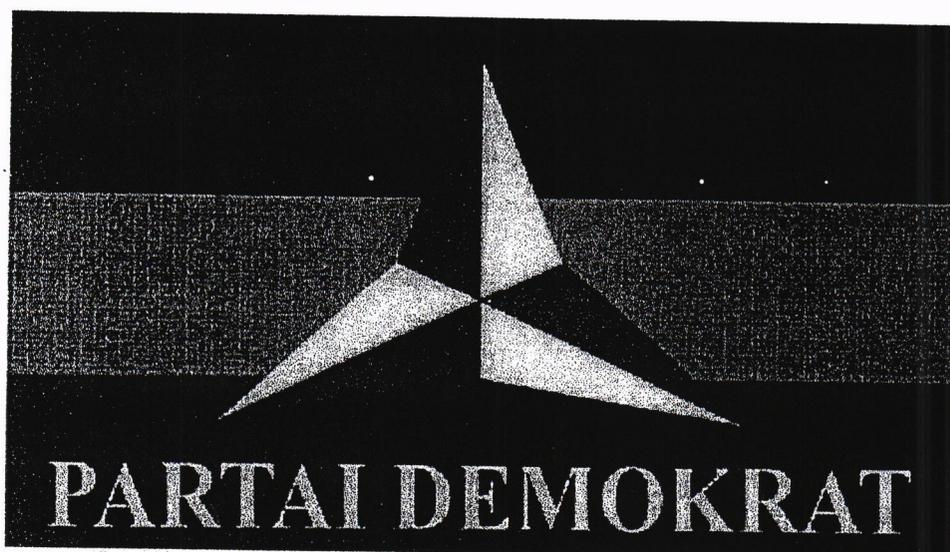

SUGIHARTO



SEKRETARIS

ZAIMUL UMAM NS

**PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
ATAS RAPERDA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018**



**FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**Rembang, 2 JULI 2019
Dibacakan oleh : MUGIYARTO, ST.**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
FRAKSI DEMOKRAT
Jl. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194

**PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
ATAS RAPERDA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018**

SELASA, 2 JULI 2019

Dibacakan oleh : MUGIYARTO, ST.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
3. FORKOPIMDA Kabupaten Rembang
4. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
5. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
6. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta Staff
7. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia

Mengawali penyampaian pandangan fraksi ini, perkenankanlah kami mengajak hadirin semuanya untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, keselamatan dan berkah kepada kita semua sehingga kita bisa hadir mengikuti persidangan yang berbahagia ini.

Secara umum kami memberi apresiasi yang sangat tinggi terhadap kinerja PEMKAB Rembang pada tahun 2018, karena Kabupaten Rembang berhasil meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK dan penyerapan Anggarannya sudah cukup baik yaitu 98%, tetapi masih juga menyisakan 18 M yang masih perlu digali ketidak tertibannya.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat

Dalam kesempatan ini, kami memberi beberapa masukan untuk ditindak lanjuti, diantaranya :

1. Dalam pelaksanaan APBD 2018 masih ada beberapa kendala diantaranya Penyerapan Anggaran di Triwulan I dan Triwulan II yang sangat lambat sehingga masih mbendol mburi, diakhir tahun masih oyak-oyakan bahkan masih ada juga keterlambatan sampai awal tahun 2019.
2. Kami berharap supaya Anggaran Tahun 2019 secepatnya dilaksanakan agar penyerapan Anggaran maksimal, Kami minta kepada OPD kinerjanya diperbaiki dan jangan ogah-ogahan.
3. Kami berharap untuk hibah dan bansos supaya secepatnya direalisasikan dan dilaksanakan, karena masyarakat sudah menunggu dan membutuhkannya.
4. Kami berharap kepada PEMKAB Rembang supaya memberi prioritas terhadap jalan lingkaran yang panjangnya kurang lebih dua kilo meter dapat di perbaiki karena sudah rusak parah, sehingga banyak kendaraan berat (truk tronton) enggan melewatinya dan malah lewat tengah kota.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat
Demikianlah pandangan umum Fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Rembang, 2 Juli 2019
FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

WAKIL KETUA



MUGIARTO, ST/KAB. REMBANG

SEKRETARIS



IMRO'ATUS SOLICHAH, SE., MH.



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

Pemandangan Umum

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
ATAS**

***RAPERDA TENTANG PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN
APBD TA. 2018***

Disampaikan oleh : Drs. H. Muh. Subawoto
Pada Sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang
Selasa, 2 Juli 2019

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yang kami Hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang Kami Hormati, segenap jajaran Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Yang kami Hormati, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang,
beserta segenap anggota DPRD kabupaten Rembang.

Yang kami hormati para Pimpinan Kesatuan TNI-POLRI, Pengadilan Negeri dan
Kejaksaan Negeri Rembang

Yang kami Hormati, Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten
Rembang beserta jajarannya.

Yang kami hormati Para Pejabat dilingkungan Pemkab Rembang Serta Para Camat
Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas,
Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali Penyampaian Pemandangan Umum FPKB ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Sidang Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kab. Rembang Atas *Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2018* dalam Keadaan Sehat Wal afiat tanpa suatu halangan apapun, semoga kehadiran kita senantiasa mendapatkan ridho Allah SWT. Amiin

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia

Selanjutnya FPKB mengucapkan terima kasih kepada Bupati yang telah menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018. Setelah mendengar penjelasan Bupati dan mempelajari Laporan Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang TA. 2018, FPKB menilai Laporan tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku sehingga dapat dilakukan pembahasan dalam rapat-rapat DPRD Kabupaten Rembang terutama pendalaman oleh Komisi-komisi DPRD Rembang bersama OPD-OPD mitra kerja.

Hadirin Sidang paripurna yang terhormat,

Terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 yang telah disampaikan Saudara Bupati dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 2 Juli 2019, FPKB memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Rembang yang mana berdasarkan penjelasan yang tertuang dalam Pengantar Nota Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan APBD TA. 2018 pada umumnya dapat berjalan lancar bahkan lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

FPKB juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Rembang yang mana setelah diaudit oleh BPK, ternyata BPK memberikan Opini Wajar Tanpa pengecualian atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2018. Sebuah prestasi yang berhasil dicapai oleh pemerintah

Kabupaten Rembang untuk pertama kali dan belum pernah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Bupati dan OPD-OPD di lingkungan Pemda Rembang yang telah berusaha keras untuk meraih Opini WTP tersebut. Besar harapan kami, agar prestasi ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan di masa yang akan datang. Namun perlu juga kami sampaikan, menurut kami keberhasilan pembangunan oleh Pemerintah Daerah tidak hanya diukur dari angka-angka realisasi dan penyerapan anggaran dalam APBD serta raihan Opini WTP dari BPK semata. Ada beberapa indikator yang harus dipenuhi seperti indikator Ekonomi dan indikator sosial untuk mengukur keberhasilan pembangunan sebuah daerah. Sejauh mana peningkatan kesejahteraan masyarakat, itulah yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah karena pembangunan dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Hadirin sidang paripurna yang terhormat,

Berikut ini kami sampaikan catatan-catatan dan masukan atas Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2018 :

1. Melihat realisasi APBD 2018, FPKB menilai bahwa Pemda Rembang belum mampu meningkatkan kemandirian Daerah yang ditandai dengan stagnasi dan masih rendahnya Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemda Rembang masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai jalannya pemerintahan dengan mengandalkan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. Kami ingin mendapatkan penjelasan, bagaimana upaya Pemda dalam meningkatkan PAD Kab. Rembang dan apa langkah-langkah riil yang selama ini telah ditempuh?
2. Antara Anggaran yang direncanakan dan realisasi pada belanja barang dan jasa kami menemukan selisih 26,25 M dan belanja Hibah-Bansos selisih 6,65 M. kami menilai realisasi pada belanja ini masih rendah, pada hal belanja-belanja ini langsung bersentuhan dengan masyarakat dan penganggarannya sudah melalui proses perencanaan yang matang. Kami ingin mendapatkan penjelasan mengapa hal ini terjadi?
3. FPKB prihatin dengan serapan belanja modal yang hanya 88,23persen dari anggaran yang semula direncanakan Rp. 350.720.259.745,- (Tiga ratus lima

puluh milyar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) dan hanya terserap Rp. 309.448.505.895,- (Tiga ratus sembilan milyar empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah). Tingginya anggaran dan serapan belanja modal yang seharusnya menjadi indikator sehatnya APBD, tidak tercermin pada realisasi APBD 2018. Kami ingin mendapatkan penjelasan dari Bupati mengapa hal ini terjadi? Apakah hal ini disebabkan oleh lemahnya perencanaan APBD 2018 atau karena buruknya kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang atau justru karena keduanya?

4. Pada belanja penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah sebesar Rp. 10.422.000.000,- (Sepuluh milyar empat ratus dua puluh dua juta rupiah) yang terealisasi 100 persen kami menganggap investasi ini cukup besar. Kami ingin mendapatkan penjelasan sejauh mana perkembangan investasi ini? Bagaimana perkembangan lembaga atau BUMD-BUMD termasuk PT. REMBANG MIGAS ENERGI yang menerima investasi dari Pemerintah Daerah? Jangan sampai terulang lagi kegagalan-kegagalan pengelolaan BUMD-BUMD yang pernah terjadi.
5. Sedikit menyimpang dari APBD 2018, terkait temuan komisi B dilapangan yang sempat mencuat di media massa yaitu temuan pada distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mana beras yang didistribusikan **DIDUGA** belum memenuhi standar kualitas beras premium tapi masih medium 1 atau medium 2, sehingga jumlah dan harga yang diterima oleh para penerima manfaat terdapat selisih cukup besar dari jumlah dan harga yang seharusnya diterima, kami minta kepada Pemerintah Kabupaten Rembang untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program BPNT tersebut. Jangan sampai carut marut pelaksanaan program BPNT yang terjadi di beberapa Daerah lain akan terjadi di Rembang. Besar harapan kami program BPNT ini bias dilaksanakan dengan baik sehingga esensi dari maksud dan tujuan program ini dapat tercapai. Kami menyarankan agar pelaksanaan program ini melibatkan BUMdes-BUMdes untuk lebih memberdayakan masyarakat pedesaan.

Demikian Pandangan Umum FPKB terhadap Raperda tentang Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD TA 2018, akhirnya kami ucapkan terimakasih atas perhatiannya,

Wallahulmuwaffiq ila aqwamit thoriq

Wassalamualaikum Wr. Wb

Rembang, 2 Juli 2019

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KABUPATEN REMBANG**

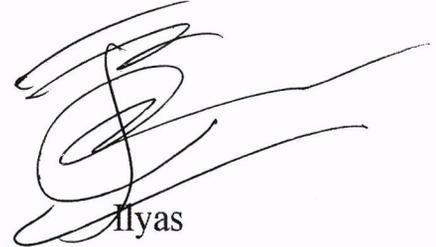
Ketua



Muhammad Imron



sekretaris



Ilyas



**FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

PANDANGAN UMUM FRAKSI

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nasional Demokrat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018

Hari / Tanggal : Selasa / 2 Juli 2019

Dibacakan oleh :

Assalamu' alaikum Wr, Wb

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Merdeka.....Merdeka.....Merdeka....!!!

Yang terhormat, Sdr Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kab. Rembang

Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA)

Kab. Rembang

Yang Terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Semua Kabag di lingkungan Setda Rembang

Yang terhormat, Ka Dinas, Ka Badan , Ka Kantor dan Camat se- Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Sekretaris DPRD Kab. Rembang, Kabag beserta jajarannya.

Lsm, Rekan Wartawan, Ormas dan semua pihak yang telah hadir pada hari ini yang kami hormati

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Muliakan,

Pada kesempatan yang baik ini marilah kita mengucapkan Alhamdulillah puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas izin dan nikmatNya lah kita pada hari ini diberikan kesempatan menghadiri Rapat Paripurna, tak lupa Sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di Yaumul Akhir nanti.

Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Muliakan,

Sebelum kami menyampaikan Pandangan Umum Fraksi, kami mengucapkan selamat HUT Bhayangkara ke-73, semoga bisa terjalin sinergi antara Polri, TNI, serta semua lapisan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang terntam, adil dan sejahtera.

Menanggapi Atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018, Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem berpendapat :

Yang Pertama, kami memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang atas kerja keras yang telah dilakukan, sehingga memberikan hasil yang baik serta mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) saat penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Yang Kedua, kami juga memberikan apresiasi atas pencapaian pendapatan Daerah yang terealisasi sebesar 98,31%. Kami harapkan untuk yang akan datang Pemerintah Kabupaten menargetkan peningkatkan pendapatan daerah. Dengan menggali potensi-potensi pendapatan daerah yang belum terakomodir.

Yang Ketiga, terkait adanya hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK yang menemukan atas pengelolaan Aset Tanah hasil Reklamasi seluas 183,024 m² yang tidak kunjung selesai penanganannya dari tahun ke tahun, maka Pemerintah Kabupaten Rembang agar segera menyelesaikan permasalahan penerbitan sertifikat HPL secara tuntas. Dengan begitu diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rembang.

Demikian telah kami sampaikan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan Nasdem,
atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2018. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan,
walaupun singkat semoga bermanfaat. Aamiin...

Wabillahi taufiq wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr, Wb,

Merdeka....Merdeka....Merdeka....

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua


Jasmani



Sekretaris


Ali Irham, ST

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2018**



REMBANG, 2 Juli 2019

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

**RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018**

Disampaikan oleh puji santoso
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Selasa 2 Juli 2019

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan;

Yang kami hormati Sdr. Para Anggota Forkompimda dan Ketua Pengadilan Negeri

Yang kami hormati Sdr. Para Komandan / Kepala Kesatuan TNI-POLRI

Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah dan Para Pejabat dilingkungan Pemkab. Rembang Serta Para Camat Se-Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Sdr. Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali kalimat pembuka, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga pada kesempatan yang baik ini, kita dapat

melaksanakan rapat paripurna pada hari ini dengan baik dan lancar, semoga apa yang telah kita kerjakan ini menjadikan amal dan ibadah yang bermanfaat. *Amiin Ya Robbal alamiin*

Selanjutnya sholawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Baginda Rosullullah Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran bagi umat manusia, dan semoga kita termasuk dalam golongan yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. *Amiin*

Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang terhormat;

Sehubungan dengan pembahasan Raperda Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018, Fraksi Gerindra memberikan Apresiasi dan beberapa catatan sebagai berikut :

1. Fraksi Gerindra memberikan Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati dan jajaran denegan diperolehnya Opini BKP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Tahun 2018. Ini adalah hal sangat menggembirakan bagi kita semua sebagai bentuk yang ideal sebuah pertanggungjawaban Anggaran kepada masyarakat Kabupaten Rembang. Kami berharap di tahun-tahun mendatang bisa dipertahankan.

2. Untuk Mendukung Program *E – Planning* dan *E-Budgeting* kami meminta kepada Kepala Daerah agar Perencanaan Pekerjaan fisik yang ada di semua Dinas bisa dikerjakan pada Tahun-1 (T-1) dan diusahakan Anggaran perencanaan di sediakan di Anggaran perubahan, hal ini sangat penting dilaksanakan agar memudahkan dalam pembahasan anggaran, supaya bisa Tepat dalam menentukan jumlah Volume pekerjaan dengan Anggaran yang di rencanakan. Selain itu, Pekerjaan tersebut bisa langsung dikerjakan di awal tahun tanpa harus menunggu Perencanaan terlebih dahulu sehingga prestasi serapan Anggaran bisa berjalan Normal dan lancar. Karena kalau kita belajar tahun-tahun lalu dan tahun ini bahwa pelaksanaan pekerjaan fisik sangatlah terlambat. Pada tahun ini saja, pada bulan juli pekerjaan fisik belum terlaksana. Seharusnya pada bulan April atau Mei pekerjaan fisik sudah bisa berjalan dengan baik agar masyarakat bisa merasakan dampak pembangunan di Kabupaten Rembang.
3. Fraksi Gerindra juga mengingatkan kepada kepala daerah akan pentingnya menjaga sumber air bersih maupun sumber air minum di Kabupaten Rembang. Karena setiap musim kemarau warga kita selalu kekurangan air. Air dari PDAM saja juga belum bisa memenuhi masyarakat di kabupaten Rembang, ditambah dengan SPAM dan SPAB yang dikelola

oleh masyarakat. Untuk itu perlu kiranya kita menjaga dan melestarikan sumber air-sumber air yang ada di wilayah Kabupaten Rembang dan bisa memanfaatkan se-efektif dan se-efisien mungkin. Karena sejauh ini hasil pemantauan kami bahwa anggaran dan kegiatan untuk melestarikan dan menjaga sumber air sangatlah minim. Air sangat penting bagi kehidupan.

Demikian pandangan umum Fraksi Gerindra ini kami sampaikan, Teriring doa dan semangat kerakyatan semoga Raperda ini bisa dibahas dengan penuh tanggung jawab, cermat, hikmah, dan tepat. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa selalu menuntun niat baik ini. Serta membuahkan hasil yang optimal, berguna, dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Rembang. *Amiin..Amiin..Ya Robbal Alalamiin*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

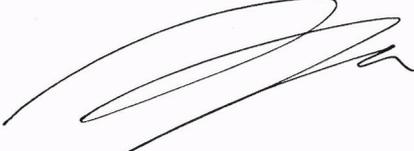
Rembang, 2 Juli 2019

FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD REMBANG



H. CHASANUDDIN

Wakil Ketua



PUJI SANTOSO, SP. MH.

Sekretaris



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Sekretariat Jl. Diponegoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290



PANDANGAN UMUM
FRAKSI KARYA SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN REMBANG

atas
Rancangan Peraturan Daerah
tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Rembang
Hari Selasa, 2 Juli 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah, Assisten SEKDA dan Kabag di lingkungan SETDA Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Instansi Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Camat, para wartawan dan hadirin yang berbahagia

Dalam mengawali pemandangan umum fraksi kali ini, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, anugerah dan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa hadir dalam suasana yang baik ini.

Saudara Bupati dan para hadirin yang terhormat,

Perkenankanlah kami menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Karya Sejahtera atas RAPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut,

1. Secara umum pelaksanaan APBD 2018 telah berjalan dengan baik dan kami sangat berterima kasih kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat, jajaran pemerintahan, eksekutif maupun legislatif serta masyarakat umum yang telah bekerja sama untuk mewujudkan hal ini. Terbukti pada

tahun anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Rembang mendapat predikat atau opini WTP (Wajar Tanpa Perkecualian), untuk itu Fraksi Karya Sejahtera mengucapkan selamat, semoga prestasi ini bisa dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.

2. Dalam hal pendapatan masih belum memenuhi harapan, dari target penerimaan sebesar Rp. 1.816.656.942.094,- (satu trilyun delapan ratus enam belas milyar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan puluh empat rupiah) tercapai realisasi sebesar Rp. 1.785.911.075.230,15 (satu trilyun tujuh ratus delapan puluh lima milyar sembilan ratus sebelas juta dua ratus tiga puluh ribu koma lima belas rupiah) atau 98,31 %. Pertanyaannya, apakah perencanaan kurang matang ?
3. Pada PAD (pendapatan asli daerah), Pendapatan Retribusi Daerah dari target sebesar Rp. 22.858.499.000,- (dua puluh dua milyar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ter-realisis sebesar Rp. 21.442.590.432,- (dua puluh satu milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) atau 93,8 %. Patut diduga terjadi kurang optimalisasi dalam pemungutannya. Mohon penjelasan.
4. Mohon diperhatikan, SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) terbilang masih cukup tinggi yakni sebesar Rp. 75.692.639.540,19 (tujuh puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh koma sembilan belas rupiah). Hal ini menunjukkan, walaupun penyerapan anggaran yang dilakukan

oleh OPD-OPD telah dilakukan secara normatif tapi belum diimbangi dengan optimalnya kinerja dan kualitas hasil kerjanya.

5. Pada belanja operasi yakni belanja pegawai, belanja barang dan jasa dll, terserap 95,44 %, tapi pada belanja modal hanya terserap 88,23 %. Mohon penjelasan.
6. Untuk kesekian kami mengingatkan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada APBD Induk jangan sampai terlambat karena akan mengganggu perencanaan dan pelaksanaan kegiatan APBD Perubahan.

Itulah pandangan umum Fraksi Karya Sejahtera terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang kemudian akan dibahas dalam rapat-rapat komisi bersama OPD (organisasi perangkat daerah) Kabupaten Rembang.

Rapat dewan dan hadirin yang terhormat,

Menutup pandangan umum ini apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga kita senantiasa diberi ridho dan kekuatan untuk membangun Kabupaten Rembang tercinta.

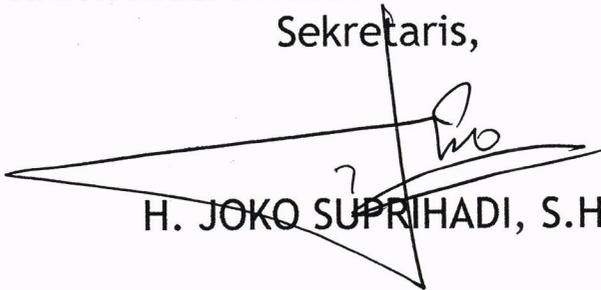
Wassalamu'alaikum wr.wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Ketua,


H. ISMARI, SH

Sekretaris,


H. JOKO SUPRIHADI, S.H.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI HARAPAN

Sekretariat: Jl. Diponegoro No.88 Rembang



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI HARAPAN
DPRD KABUPATEN REMBANG**

atas

Rancangan Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Rembang
Hari Selasa, tgl 2 Juli 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah, Assisten SEKDA dan Kabag di lingkungan SETDA Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Instansi Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati sdr. Camat, para wartawan dan undangan yang berbahagia.

Mengawali pemandangan umum fraksi kali ini, marilah memanjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, anugerah dan kenikmatan kepada kita semua sehingga bisa hadir dalam Rapat Paripurna Dewan membahas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang tahun anggaran 2018 ini. Pada kesempatan ini perkenankanlah kami memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Rembang yang telah berhasil meraih predikat atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Pemerintah Pusat atas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 tersebut.

Pimpinan sidang, saudara Bupati dan para hadirin yang terhormat,

Setelah mendengarkan Pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 oleh Saudara Bupati tadi, kami akan menyampaikan pemandangan umum sbb.

Secara umum pelaksanaan APBD 2018 telah berjalan dengan baik dan kami sangat berterima kasih kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat, jajaran pemerintahan, eksekutif maupun legislatif serta masyarakat umum yang telah bekerja sama untuk mewujudkan hal ini.

Dari sisi pendapatan nyaris memenuhi harapan, target penerimaan Rp. 1.816.656.942.094,- (satu trilyun delapan ratus enam belas milyar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan puluh empat rupiah) tercapai realisasi sebesar Rp. 1.785.911.075.230,15 (satu trilyun tujuh ratus delapan puluh lima milyar sembilan ratus sebelas juta dua ratus tiga puluh ribu koma lima belas rupiah) atau 98,31 %. Harapan kami pada tahun ini bisa melampaui target pendapatan, terutama dari pendapatan asli daerah. Untuk itu, kami sangat mendukung upaya BPPKAD maupun OPD yang lain untuk meningkatkan perolehan pendapatan asli daerah, dengan tetap mengedepankan rasa keadilan masyarakat. Dari sisi belanja

daerah, target Rp 1.561.292.212.018,- (satu trilyun lima ratus enam puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua belas ribu delapan belas rupiah) ter-realisis sebesar Rp 1.464.320.909.614,36 (satu trilyun empat ratus enam puluh empat milyar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus empat belas koma tiga puluh enam rupiah) atau 93,79 %.

Namun kami masih kecewa karena SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) terbilang masih cukup tinggi yakni sebesar Rp. 75.692.639.540.19 (tujuh puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh koma sembiln belas rupiah). Hal ini menunjukkan, walaupun penyerapan anggaran yang dilakukan oleh OPD-OPD telah dilakukan secara optimal tapi belum diimbangi dengan optimalnya kinerja dan kualitas hasil kerjanya. Kami minta Saudara Bupati memperhatikan dan mengindahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang th 2018. Namun kami kecewa karena SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) masih tinggi yakni sebesar Rp. 75.692.639.540.19 (

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

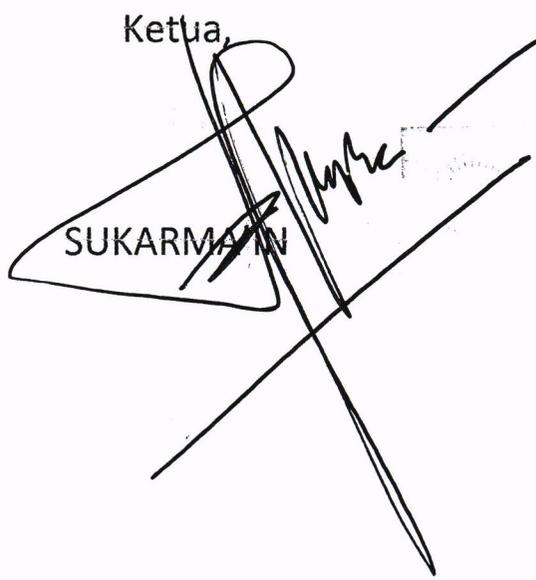
Dalam keberhasilan pembangunan, disamping perencanaan dan palaksanaan, unsur yang penting adalah unsur pengawasan dan evaluasi. Jika pembangunan telah selesai dilaksanakan,

namun tidak disertai dengan adanya pengawasan dan evaluasi, maka yang terjadi adalah pemborosan. Pada hemat kami ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam hal membangun; yakni bisa difungsikan, kualitasnya bagus dan terjamin pemeliharannya.

Demikianlah pandangan umum Fraksi Harapan, selanjutnya Raperda ini akan dibahas antara komisi-komisi DPRD bersama OPD dan antara Badan Anggaran dengan TAPD. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga kita senantiasa diberi ridho dan kekuatan untuk membangun Kabupaten Rembang tercinta. Amien.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI HARAPAN

Ketua,	Sekretaris,
 SUKARMAN	SAHNINGSIH, SE



JAWABAN BUPATI REMBANG
ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN
REMBANG
TERHADAP RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
KABUPATEN REMBANG



**JAWABAN BUPATI REMBANG
ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN
REMBANG
TERHADAP RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

**Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Sejahtera untuk kita semua.**

Yang saya hormati, Sdr Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan segenap anggota DPRD;

Yang saya hormati, Rekan-rekan Forpimda Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr.Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr.Staff Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr.Pimpinan Organisasi Profesi, LSM dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali pidato jawaban kami atas pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018, terlebih dulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, kita masih diberi kesehatan, kebahagiaan dan tak kurang suatu apa.

Selanjutnya sebagaimana kita ketahui bersama bahwa struktur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2018 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Dari rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.816.656.942.094,00 (Satu Triliun delapan ratus enam belas milyar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan puluh empat rupiah) dapat direalisasikan sebesar Rp1.785.911.075.230,15 (Satu triliun tujuh ratus delapan puluh lima milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh puluh lima ribu dua ratus tiga puluh koma lima belas rupiah) atau 98,31%.

Untuk Belanja Daerah dari yang direncanakan sebesar Rp.1.912.100.759.618,00 (Satu triliun sembilan ratus dua belas milyar seratus juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah) realisasinya adalah sebesar Rp.1.814.662.262.214,36 (Satu triliun delapan ratus empat belas milyar enam ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat belas koma tiga puluh enam rupiah) atau 94,90%

Sedangkan pada kelompok Pembiayaan yang terdiri atas Penerimaan Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp108.161.445.444,00 (Seratus delapan milyar seratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) realisasinya sebesar Rp.117.161.445.444,40 (Seratus tujuh belas milyar seratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat koma empat puluh rupiah) atau 108,32% dan Pengeluaran Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp12.717.627.920,00 (Dua belas milyar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) realisasinya sebesar Rp12.717.627.920,00 (Dua belas milyar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) atau 100,00%.

Selanjutnya berkenaan dengan pertanyaan, saran, pendapat dan catatan-catatan yang berkembang dalam Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Rembang, berikut saya sampaikan jawaban dan klarifikasinya:

1. PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN

- a. Berkenaan dengan capaian opini WTP pada Kabupaten Rembang di penyajian LKPD TA 2018, kami ucapkan terimakasih pada semua pihak yang telah mendukung capaian tersebut, dan terkait LHP BPK baik di Kepatuhan atau di Sistem Pengendalian Internal (SPI) , telah dilakukan penyelesaian-penyelesaian yang selanjutnya mulai tanggal 3 Juli 2019 akan dilakukan pembahasan di BPK perwakilan Jawa Tengah.
- b. Tentang belum optimalnya penyerapan anggaran pada APBD TA 2018, kedepannya akan kami tingkatkan.
- c. Berkaitan SILPA TA 2018 audited telah dilakukan penyesuaian pada rancangan APBD Perubahan TA 2019 yang telah masuk di tingkat TAPD

2. PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT

- a. Tentang adanya keterlambatan penyerapan anggaran di triwulan I dan triwulan II sehingga masih bendol diakhir tahun.

Jawab : terimakasih atas masukannya, semoga di tahun ini tidak akan terjadi lagi sekaligus menjawab saran dan masukan nomer 2 dan 3

- b. Tentang pemberian prioritas perbaikan jalan lingkaran tireman yang sudah rusak parah .

Jawab :

Berkenaan dengan pertanyaan Fraksi Demokrat terkait dengan jalan lingkar Tireman yang panjangnya kurang lebih dua kilometer dalam kondisi rusak parah :

- a. Tahun Anggaran 2018 (Induk) dialokasikan melalui Bantuan Provinsi sebesar Rp. 15.134.456.250,- dengan nilai kontrak dan realisasi sebesar Rp. 13.926.905.000,- untuk ruas jalan Galonan ke arah Timur.
- b. Tahun Anggaran 2019, dengan sumber dana :
 - DBHCHT Rp. 2.673.000.000,- (Induk)
 - APBD Perubahan Rp. 3.425.000.000,- (Pangalihan Anggaran dari Pembangunan Ruas Jalan Sale – Tahunan sebesar Rp. 3.425.000.000,-)

3. Pemandangan Umum Fraksi Kebangkitan Bangsa

- a. Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah kami telah melakukan upaya dan langkah-langkah sebagai berikut :

Sekaligus menjawab Fraksi Karya Sejahtera, Fraksi PDI Perjuangan Nassdem dan Fraksi Harapan

1. Pengelolaan Sumber Penerimaan Baru baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah;
2. Penjaringan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah Baru yang ada dan memasukkannya dalam database Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah pada Aplikasi Pengelolaan Pendapatan yang ada (SIMPATDA, SISMIOP/e-PBB);
3. Pembuktian Kewajaran Penerimaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah melalui peninjauan terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang melaporkan Pajak/Retribusi yang dinilai tidak/kurang wajar;
4. Optimalisasi Penerimaan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui verifikasi Piutang kepada seluruh Objek Pajak Daerah untuk memastikan kebenaran data piutang yang dapat ditagih dengan melakukan penagihan secara rutin;
5. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Pelatihan, BinteK, Workshop, FGD dan forum-forum lainnya;
6. Modernisasi Administrasi, pengembangan dan pembaharuan aplikasi pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah melalui pendekatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Pajak Daerah;
7. Penyederhanaan Proses Bisnis Pengelolaan PAD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam mempermudah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam melaporkan dan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Adapun terhadap target Penerimaan Pendapatan Daerah yang tidak tercapai dapat kami jelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah telah tercapai dari target dengan capaian sebesar 100.44%;
 2. Adanya kebijakan pusat terhadap Dana Transfer Dana DAK dan Bantuan Keuangan dari Provinsi yang hanya ditransfer dan dibayarkan sesuai dengan nilai kontrak sehingga mengakibatkan realisasi penerimaan yang direncanakan tidak tercapai sesuai dengan target. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
 3. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari retribusi daerah dari target sebesar Rp. 22.858.499.000,- terealisasi sebesar 21.442.590.432,- hal ini diantaranya disebabkan oleh adanya perubahan regulasi dan anomali cuaca yang berdampak pada hasil tangkapan nelayan dan perolehan retribusi daerah.
- b. Terhadap realisasi belanja Hibah dan Bansos yang tidak terserap sebesar 6,65 M, hal ini disebabkan karena beberapa hal diantaranya sebagai berikut ;
1. Kelompok Calon Penerima Hibah tidak mencukupi persyaratan pencairan yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan;
 2. Adanya kelompok yang mengundurkan diri atau tidak mau mencairkan/menerima hibah;
 3. Waktu yang tidak cukup untuk melaksanakan kegiatan belanja hibah terutama hibah yang kegunaannya untuk bangunan konstruksi.
- c. Terkait Penyertaan Modal Pada PT. RME dapat Kami jelaskan sebagai berikut:
- PT. RME pada tahun 2018 memperoleh penyertaan modal sebesar Rp. 1.000.000.000,-
 - Pengelolaan sumur Randugunting di lapangan Randugunting dibidang hulu, Pemkab Rembang dan Pemprov Jateng akan membentuk Perusahaan Daerah/ BUMD yang khusus mengelola PI 10%
 - Alokasi untuk mitra BUMD, PT RME telah mendapat penetapan alokasi dan pemanfaatan gas bumi dari wilayah kerja Randugunting berdasarkan surat dari Kepala SKK Migas nomor SRT-0251/SKKMA0000/2019/S2 tanggal 14 Mei 2019
 - Selanjutnya menunggu surat alokasi gas dari Menteri ESDM sebagai dasar pembangunan kilang gas.
- d. Tentang distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang aman beras yang didistribusikan diduga belum memenuhi standar kualitas beras premium tapi masih medium 1 atau medium 2 sehingga jumlah dan harga yang diterima para penerima manfaat terdapat selisih yang

cukup besar. Mohon untuk dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program BPNT.

Jawab :

Terimakasih atas hasil monitoring dan evaluasi dari komisi B yang telah menemukan permasalahan pada pelaksanaan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) di Kabupaten Rembang. Selanjutnya akan Kami tindaklanjuti untuk melaksanakan Pembinaan monitoring dan evaluasi kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan penyaluran BPNT tersebut

4. **PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN – NASIONAL DEMOKRAT**

1. Tentang capaian Opini WTP pada Penyampaian LKPD di Tahun Anggaran 2018 Kami ucapkan terimakasih apresiasinya.
2. Tentang pengelolaan aset tanah hasil reklamasi seluas 183,024 m yang tidak kunjung selesai penanggannya, agar Pemkab Rembang segera menyelesaikan permasalahan penerbitan sertifikat HPL secara tuntas.

Jawab :

Dalam rangka penyelesaian pengelolaan aset tanah hasil reklamasi pelabuhan tanjung bonang dapat kami jelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sesuai Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), Pelabuhan Tanjung Bonang ditetapkan menjadi Pelabuhan Rembang Terminal Sluke dengan hierarki sebagai pelabuhan pengumpan regional, yang RIP, DLKr dan DLKp telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah dan diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Rembang berdasarkan penetapan oleh Menteri Perhubungan;
2. Tanah hasil reklamasi eksisting yang menjadi bagian dari DLKr Pelabuhan Rembang Terminal Sluke tidak dapat dikuasai dan dimanfaatkan secara parsial akan tetapi harus dikelola secara utuh dalam satu sistem pengelolaan pelabuhan yang pengaturannya dilakukan oleh UPP Kelas III Rembang.

5. **PEMANDANGAN UMUM FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA**

Tentang program *E-Planning* dan *E-Budgeting* agar perencanaan pekerjaan fisik dikerjakan pada tahun-1 (T-1) agar emudahkan dalam

pembahasan anggarannya dan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan tepat waktu .

Jawab :

Untuk mendukung E-planning dan E-budgeting perencanaan pekerjaan fisik diusahakan Tahun-1 (T-1)

Jawab : saran tersebut akan kami perhatikan namun juga mempertimbangkan prioritas kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Tentang pentingnya menjaga sumber air bersih maupun sumber air minum di Kabupaten Rembang, karena air PDAM pada musim kemarau belum memenuhi kebutuhan masyarakat.

Jawab :

Pentingnya untuk menjaga sumber air bersih maupun sumber air minum di kabupaten Rembang.

Jawab : upaya untuk melestarikan sumber air bersih dan sumber air minum, Pemerintah Kabupaten Rembang telah melakukan konservasi daerah tangkupan air melalui penghijauan, sumur resapan, pembuatan chek dam dan embung-embung saluran kecil dan menengah.

6. PEMANDANGAN UMUM FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Tentang SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang masih tinggi.

Sekaligus menjawab pertanyaan Fraksi Harapan

Berkenaan SILPA sebesar Rp75.692.639.540, 19 dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Uraian	NILAI
Pelampauan pendapatan	4.152.102.553,00
Tambahan Profesi Guru	12.010.693.460,00
Tambahan Penghasilan Guru	446.250.000,00
DAK Fisik Penugasan	524.657.067,00
DAK Fisik Reguler	2.824.537.035,00
Pengehematan Belanja	50.506.069.199,15
Jumlah	70.464.309.314,15
Kas di Bendahara Penerimaan	68.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	9.029.331,00
Kas di BLUD RSUD	210.968.392,04
Kas di BLUD Puskesmas	3.424.744.469,00
Kas BOS DIKNAS 2018	1.306.646.411,00
TGR pada Dinas Kesehatan	276.864.623,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	75.692.630.540,19

Rapat Dewan dan Hadirin yang saya hormati,

Demikian yang dapat Kami jelaskan atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Raperda Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018. Untuk selanjutnya terhadap hal-hal yang masih membutuhkan penjelasan secara teknis saya mempersilahkan untuk dibahas dan diperdalam dalam pembahasan komisi-komisi.

Akhirnya tidak lupa saya sampaikan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita sekalian.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, Juli 2019

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA (II)
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG**

**RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2018**

Hari : Senin
Tanggal : 8 Juli 2019
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
III. **ACARA RAPAT:**

1. Pembukaan;
2. Laporan Badan Anggaran Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;
3. Pendapat Fraksi terhadap hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;
4. Persetujuan Penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;

5. Penandatanganan Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang dilanjutkan Penyerahan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Raperda;
6. Penyampaian Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;
7. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. GUNASIH, S.E.
2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. DRUPODO, M.Si.
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 8 orang
2. Fraksi Demokrat	: 5 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 4 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang

5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 1 orang
Jumlah	<hr/> : 32 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 2 orang
2. Fraksi Demokrat	: 3 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 2 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: - orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	<hr/> : 13 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. GUNASIH, S.E.**

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;

- Sekretaris Daerah beserta Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;
- Camat Se Kabupaten Rembang;
- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, marilah senantiasa kita selalu bersyukur kehadirat-Nya, atas berbagai kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita kembali dapat bertemu untuk melaksanakan Rapat Paripurna Kedua dalam membahas Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Ketentuan kuorum yang berlaku dalam Rapat Paripurna Kedua hari ini, adalah sama dengan yang berlaku dalam Rapat Paripurna Pertama dalam membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 yaitu dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD. Hal ini tertuang dalam pasal 107 ayat (1) huruf b Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir dalam Rapat Paripurna DPRD hari ini adalah sebanyak 32 orang. Dengan demikian ketentuan kuorum dalam rapat paripurna ini telah terpenuhi, dan rapat paripurna dapat kita mulai.

Dengan membaca "*Bismillahirrohmanirrohim*" tepat pukul 12.35 WIB Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Terdapat 4 (empat) agenda pokok dalam rapat paripurna kedua ini, sebagaimana yang dihasilkan oleh Badan Musyawarah pada rapat tanggal 27 Juni 2019, dan untuk lengkapnya akan saya bacakan susunan acara yang menjadi agenda dalam rapat paripurna hari ini, yaitu :

1. Pembukaan.
2. Laporan Banggar atas hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;
3. Penyampaian pendapat fraksi terhadap hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;
4. Persetujuan penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;
5. Penandatanganan Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang dilanjutkan Penyerahan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Raperda;
6. Pendapat akhir Bupati atas hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;
7. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu Laporan Banggar atas hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018.

Untuk hal tersebut, saya minta kepada Drs. Drupodo, M.Si. untuk menyampaikannya.

=== LAPORAN BANGGAR ===

Terimakasih Saudara Drs. Drupodo, M.Si. atas penyampaiannya.

➤ *(Laporan Banggar atas hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 terlampir)*

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Acara selanjutnya, acara ketiga yaitu Penyampaian pendapat fraksi terhadap hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018. Guna kelancaran dalam penyampaiannya, kepada juru bicara masing-masing fraksi saya minta menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Sdr. Muhammad Anshori
2. Fraksi Demokrat : Sdri. Hj. Hikmah Purnamawati
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdr. Ilyas
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : Sdri. Nanik Sri Sundari
5. Fraksi Partai Gerindra : Sdr. Puji Santoso, S.P.,M.H.
6. Fraksi Karya Sejahtera : Sdr. Ali Imron Wahyudi
7. Fraksi Harapan : Sdr. Sukarmain

Secara berurutan dimulai dari juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dipersilahkan.

PENDAPAT FRAKSI

Fraksi	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	✓		
Fraksi Demokrat	✓		
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	✓		
Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	✓		
Fraksi Partai Gerindra	✓		
Fraksi Karya Sejahtera	✓		
Fraksi Harapan	✓		

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampaiannya.

➤ (*Penyampaian pendapat fraksi terhadap hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 terlampir*)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Kita masuki acara keempat yaitu Persetujuan penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018.

Dari laporan Badan Anggaran maupun pendapat dari masing-masing Fraksi, sudah dapat disimpulkan bahwa Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah. Namun untuk keabsahannya perlu persetujuan dari rekan-rekan anggota dalam rapat paripurna ini.

Saya tawarkan kepada Saudara-Saudara Anggota :

“Apakah Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 dan Rekomendasi yang dilaporkan oleh Badan Anggaran DPRD dapat disetujui ?”

=====SETUJU=====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Terima kasih kepada rekan-rekan anggota atas persetujuannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Kita masuki acara ketujuh yaitu Penandatanganan Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang dilanjutkan Penyerahan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Raperda.

Agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, saya minta kepada Sekretariat DPRD memandu jalannya prosesi penandatanganan dan penyerahan Keputusan DPRD.

Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada pembawa acara.

===== **PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA DAN
PENYERAHAN KEPUTUSAN DPRD** =====

Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memandu jalannya penandatanganan raperda dan penyerahan keputusan DPRD.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Acara terakhir yaitu Pendapat Akhir Bupati Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018.

Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat dipersilahkan.

==== PENDAPAT AKHIR BUPATI ====

Terima kasih saudara H. Abdul Hafidz, S.Pd.I. atas penyampaiannya.

- *(Pendapat Akhir Bupati Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 terlampir)*

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Agenda pada rapat paripurna ini telah kita lalui, maka selesai sudah acara Rapat Paripurna Kedua ini. Terima kasih kepada Saudara Bupati beserta jajarannya, rekan-rekan Anggota DPRD serta Sekretaris DPRD beserta seluruh stafnya yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, sehingga pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 ini dapat berjalan baik dan lancar. Dan kepada saudara-saudara yang telah mengikuti rapat, kami atas nama Pimpinan DPRD mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan di dalam pelaksanaan rapat paripurna ini.

- H. Gunasih, S.E. (Pimpinan Rapat)

“ Ini sebelum rapat saya akhiri ada dua surat yang masuk yang pertama terkait KUA/PPAS 2020 dan KUPA 2019 dan karena agenda jadwal bulan Juli 2019 sudah kita agendakan pada banmus tanggal 27 Juni kemarin dan

untuk merubah jadwal tersebut harus lewat paripurna maka ini saya tawarkan kepada temen – temen”

- Gatot Paeran S.H.M.Si (Fraksi Karya Sejahtera)
“ Maaf Pimpinan apa hal tersebut tidak disampaikan setelah rapat saja ?? biar tidak merubah susunan acara”
- H. Gunasih, S.E. (Pimpinan Rapat)
Maaf Pak Gatot ini terkait dengan tatib yang baru untuk mengubah jadwal yang sudah ditetapkan banmus harus lewat paripura , dan klo dua surat ini saya sampaikan setelah paripurna berarti paripurna sudah selesai. Ini saya tawarkan kepada temen – temen apakah agenda bulan Julitahun 2019 bisa/ setuju untuk dirubah??”
- Anggota DPRD yang hadir menjawab
“ Setujuu..!!!!”

Akhirnya, dengan mengucap “ *Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “ tepat pukul 13.55 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

WAKIL KETUA,

SEKRETARIS,



H. GUNASIH, S.E.



Drs. DRUPODO, M.Si.

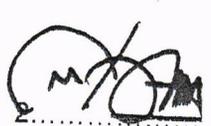
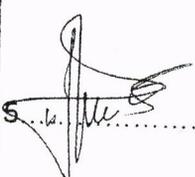
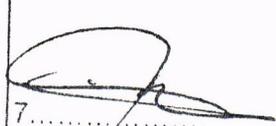
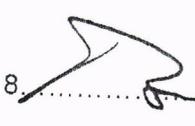
Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (II) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Laporan Banggar atas Hasil Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018;
- LAMPIRAN III : Pendapat Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018;
- LAMPIRAN IV : Keputusan DPRD Nomor Tahun 2019 Tentang Persetujuan Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;
- LAMPIRAN V : Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN
REMBANG TAHUN ANGGARAN 2018

HARI/TANGGAL : SENIN, 8 JULI 2019
 PUKUL : 10.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	BAYU ANDRIYANTO, S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3	Kejaksaan Negeri Rembang	3.
4	Pengadilan Negeri Rembang	4.
5	Bardani	Dandim 0720 Rembang	5. 
6	Kepolisian Resort Rembang	6.
7	Drs. H. S. C. M. M. M. M.	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7. 
8	Drs. SUBAKTI	Sekretaris Daerah	8. 

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



Drs. DRUPODO, M.Si
 NIP. 19670421 199303 1 009

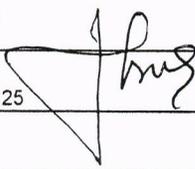
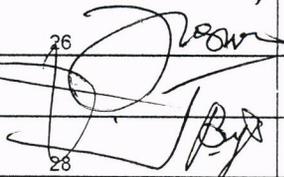
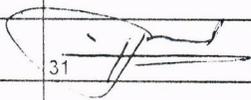
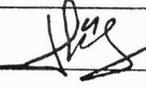
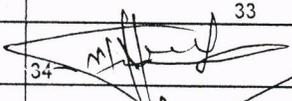
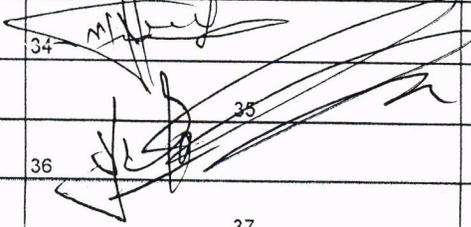
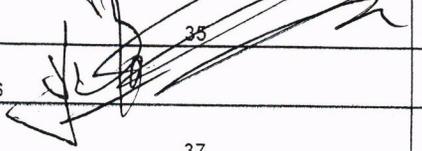
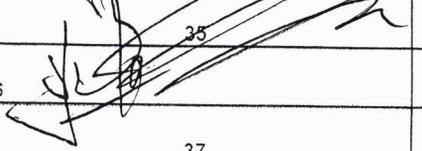
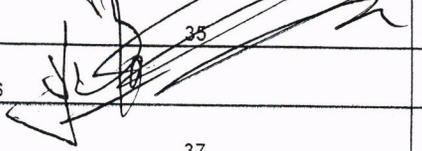
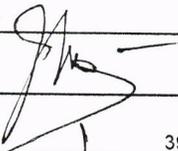
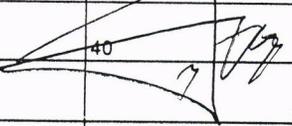
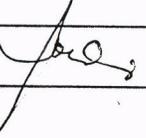
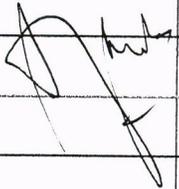
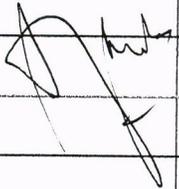
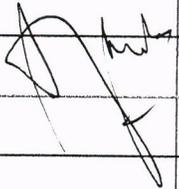
DAFTAR HADIR

**RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

HARI/TANGGAL : SENIN, 8 JULI 2019

PUKUL : 10.00 WIB

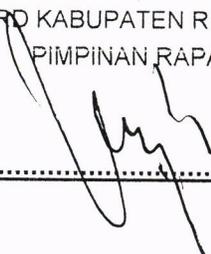
NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD	11	
12	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H.	Anggota	12	
13	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	13	
14	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	14	
15	H. ISLAHUDDIN	Anggota	15	
16	H. HARNO, S.E.	Anggota	16	
17	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	17	
18	MOHAMMAD HARIYADI	Anggota	18	
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, B.A	Anggota	22	
23	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi.	Anggota	23	
24	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	24	

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25 
26	JASMANI	Anggota	26 
27	WIDODO	Anggota	27 
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28 
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29 
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30 
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31 
32	SUSTIYONO	Anggota	32 
FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33 
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34 
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35 
36	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36 
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37 
FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38 
39	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39 
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40 
41	ALI IMRON WAHYUDI	Anggota	41 
FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42 
43	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43 
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44 
45	NUR JANNAH	Anggota	45 

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar

DPRD KABUPATEN REMBANG
PIMPINAN RAPAT,


.....

DAFTAR HADIR OPD
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2018

HARI/TANGGAL : SENIN, 8 JULI 2019
PUKUL : 10.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA	D. MUSAUF	As I	5
6	ASISTEN II SEKDA	A. Lantawati	As II	6
7	ASISTEN III SEKDA	Hamid Huda	As III	7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	NURPURNO	Kabag	8
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS	NURPURNO	Plt Kabag	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Agus H H	Kabag	11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			13
14	BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN			14
15	BAG. UMUM			15
16	BPPKAD	Mikotri	Kabag	16
17	INSPEKTORAT			17
18	BAPPEDA	CATUR SNI	Kababag	18
19	DINSOSP2KB	Sri Wahyuni		19
20	B K D			20
21	B P B D	Ikwanto	Kabid DC	21
22	DPU TATA RUANG	Triyanto Ind	Sekt	22
23	DPKP/ DINPERKIM	Roeniarnani	Kasi	23
24	DINAS KESEHATAN	Ans. S.	Kabid P ₂	24
25	DINDIKPORA			25
26	DINPERINDAGKOP & UMKM	Ahlihan	Kabin	26
27	DINTANPAN	Cipriko		27
28	DINLUTKAN	Sahar Dadi		28
29	DINKOMINFO	P. Hartono	Kabid	29
30	DINAS PERHUBUNGAN	P. Saeni	Plt Kabid	30
31	DINAS DUKCAPIL	P. Saeni	Kabid	31
32	DINPERMADES	P. Saeni	Kabid	32

			4	5
33	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Dwi Purwana	Kedi	33
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Maryasa	Seni	34
35	KANTOR KESBANGPOLINMAS	KARTONO	ka.	35
36	DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN	H. Agus Sulm	icadun	36
37	DINAS PMPTSP NAKER	REHAT G.	ls	37
38	RSUD dr. R. SUTRASNO	SUPRIYO	Kabid Gugup	38
39	SATPOL PP	H. KIALUYO	Kasru	39
40	TIM PKK KAB. REMBANG			40
41	P D A M			41
42	PERCETAKAN DAERAH			42
43	PD. BANK PASAR			43
44	PT. MIGAS REMBANG ENERGY			44
45	BANK BNI 46			45
46	BANK JATENG CAB. REMBANG			46
47	BRI CAB. REMBANG			47
48	PD BPR BKK LASEM			48
49	PT. R B S J			49
50	APOTIK DAERAH			50
51	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA			51
52	DIPENDA PROPINSI			52
53	BPS KAB. REMBANG			53
54	RUMAH TAHANAN			54
55	PERHUTANI KPH MANTINGAN			55
56	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			56
57	KANTOR PERHUTANI SPH IV			57
58	KANTOR POS DAN GIRO			58
59	TELKOM REMBANG			59
60	PLN CAB. REMBANG			60
61	BAWASLU KAB. REMBANG			61
62	B P N KAB. REMBANG			62
63	KANTOR PAJAK			63
64	UP3AD (ASET DAERAH)			64
65	KANTOR PELABUHAN			65
66	KETUA KPU KAB. REMBANG			66
67	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG	Satriyo W.	Sek KPU	67
68	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			68
69	BTPN KCP. REMBANG			69

1	2	3	4	5
70	Kudam	Agur	Int	70
71	Power	Indra	Int	71
72	Power	Heni	Int	72
73	SA FIKS	Ayu W		73
74	Radio Citra Bahari FM	Masudi	Reporter	74
75	MUNBAR RAKYAT	MUNLICHT		75
76				76
77				77
78				78
79				79
80				80
81				81
82				82
83				83
84				84
85				85
86				86
87				87
88				88
89				89
90				90
91				91
92				92
93				93
94				94
95				95
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. DRUPODO, M.Si

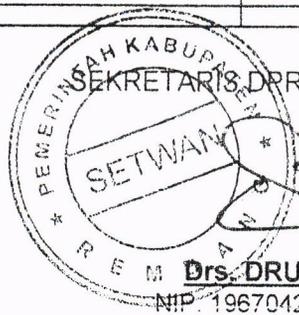
NIP. 19670421 199303 1 009

**RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2018**

HARI/TANGGAL : SENIN, 8 JULI 2019

PUKUL : 10.00 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	MUSTHOLIH	1
2	CAMAT KALIORI	Haryus	2
3	CAMAT SUMBER	KATWANI	3
4	CAMAT SULANG	Slamet Haryus	4
5	CAMAT BULU	Siellu Ruyd	5
6	CAMAT PAMOTAN	ROPINGI	6
7	CAMAT GUNEM	A. Sholchan	7
8	CAMAT SALE	HARONO	8
9	CAMAT LASEM		9
10	CAMAT PANCUR	Juhank	10
11	CAMAT SEDAN		11
12	CAMAT SLUKE	Lio-p.oca'	12
13	CAMAT KRAGAN	Prup to R	13
14	CAMAT SARANG		14


 SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
 SETWAN
 Drs. DRUPODO, M.Si
 NIP. 19670421 199303 1 009

**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 perlu diadakan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); .
2. Bahwa hasil pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 dilaporkan oleh Badan Anggaran pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

II. DASAR

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;

9. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
10. Surat Bupati Rembang Nomor 050/1731/2019 tanggal 20 Juni 2019 perihal Pengiriman Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 ;
11. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 27 Juni 2019 yang mengagendakan Penjadualan Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018.

III. PELAKSANAAN

1. Rapat Badan Anggaran DPRD dengan TAPD Kabupaten Rembang pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019, Jam 12.00 WIB dengan acara Penjelasan lanjutan atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018.
2. Rapat Badan Anggaran dengan Pimpinan Komisi-komisi DPRD Kabupaten Rembang yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019 Jam 13.00 WIB membahas Strategi dan Distribusi Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018.
3. Rapat-rapat Komisi A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Rembang dengan OPD / Instansi terkait dilaksanakan pada :
 - Hari : Rabu – Kamis
 - Tanggal : 3 sampai dengan 4 Juli 2019
 - Jam : 10.00 WIB – Selesai
 - Tempat : Ruang Komisi A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Rembang
 - Acara : Pendalaman Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018
4. Rapat Badan Anggaran dengan Pimpinan Komisi-komisi DPRD Kabupaten Rembang pada :
 - Hari : Jumat
 - Tanggal : 5 Juli 2019
 - Jam : 09.00 WIB – Selesai
 - Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang
 - Acara : Penyampaian Laporan Komisi atas Pendalaman

Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018.

5. Rapat Badan Anggaran DPRD dengan TAPD pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 5 Juli 2019
Jam : 11.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang
Acara : Sinkronisasi dan Koordinasi hasil pembahasan
Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018.

IV. HASIL RAPAT

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang telah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018, sebagaimana jadwal yang telah ditentukan. Adapun ringkasannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. RINGKASAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2018

IV. HASIL PEMBAHASAN

RINGKASAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD 2018

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PEMBAHASAN		
		SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%	MENJADI	BERTAMBAH (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PENDAPATAN DAERAH	1,816,656,942,094.00	1,785,911,075,230.15	(30,745,866,863.85)	98.31	1,785,911,075,230.15	(30,745,866,863.85)	98.31
1.1	Pendapatan Asli Daerah	304,351,906,094.00	296,676,436,263.15	(7,675,469,830.85)	97.48	296,676,436,263.15	(7,675,469,830.85)	97.48
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	96,286,250,000.00	100,438,352,553.00	4,152,102,553.00	104.31	100,438,352,553.00	4,152,102,553.00	104.31
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	22,858,499,000.00	21,441,590,432.00	(1,416,908,568.00)	93.80	21,441,590,432.00	(1,416,908,568.00)	93.80
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17,679,000,000.00	18,775,303,058.00	1,096,303,058.00	106.20	18,775,303,058.00	1,096,303,058.00	106.20
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	167,528,157,094.00	156,021,190,220.15	(11,506,966,873.85)	93.13	156,021,190,220.15	(11,506,966,873.85)	93.13
1.2	Dana Perimbangan	1,100,652,496,000.00	1,071,215,246,998.00	(29,437,249,002.00)	97.33	1,071,215,246,998.00	(29,437,249,002.00)	97.33
1.2.2	Dana Transfer Umum	310,442,437,000.00	312,560,054,484.00	(5,040,332,500.00)	99.29	312,560,054,484.00	(5,040,332,500.00)	99.29
1.2.3	Dana Transfer Khusus	282,210,059,000.00	258,619,192,504.00	(23,590,866,496.00)	91.64	258,619,192,504.00	(23,590,866,496.00)	91.64
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	411,652,540,000.00	418,019,391,969.00	6,366,851,969.00	101.55	418,019,391,969.00	6,366,851,969.00	101.55
1.3.1	Hibah	57,455,920,000.00	56,967,950,020.00	(487,969,980.00)	99.15	56,967,950,020.00	(487,969,980.00)	99.15
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya	95,000,000,000.00	105,216,144,949.00	10,216,144,949.00	110.75	105,216,144,949.00	10,216,144,949.00	110.75
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	229,010,130,000.00	229,010,130,000.00	-	100.00	229,010,130,000.00	-	100.00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	30,186,490,000.00	26,825,167,000.00	(3,361,323,000.00)	88.86	26,825,167,000.00	(3,361,323,000.00)	88.86
2.	BELANJA DAERAH	1,912,100,759,618.00	1,814,662,262,214.36	(97,438,497,403.64)	94.90	1,814,662,262,214.36	(97,438,497,403.64)	94.90
2.1	Belanja Tidak Langsung	1,091,881,145,441.75	1,064,012,361,865.16	(27,868,783,576.59)	97.45	1,064,012,361,865.16	(27,868,783,576.59)	97.45
2.1.1	Belanja Pegawai	668,354,042,428.75	649,572,921,265.16	(18,781,121,161.59)	97.19	649,572,921,265.16	(18,781,121,161.59)	97.19
2.1.2	Belanja Bunga	1,451,355,415.00	-	(1,451,355,415.00)	-	-	(1,451,355,415.00)	-
2.1.4	Belanja Hibah	61,787,200,000.00	55,764,388,000.00	(6,022,812,000.00)	90.25	55,764,388,000.00	(6,022,812,000.00)	90.25
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8,980,000,000.00	8,333,700,000.00	(646,300,000.00)	92.80	8,333,700,000.00	(646,300,000.00)	92.80
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	10,765,819,900.00	10,765,819,900.00	-	100.00	10,765,819,900.00	-	100.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa	340,042,727,700.00	339,575,532,700.00	(467,195,000.00)	99.86	339,575,532,700.00	(467,195,000.00)	99.86
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	500,000,000.00	-	(500,000,000.00)	-	-	(500,000,000.00)	-
2.2	Belanja Langsung	820,219,614,176.25	750,649,900,349.20	(69,569,713,827.05)	91.52	750,649,900,349.20	(69,569,713,827.05)	91.52
2.2.1	Belanja Pegawai	179,604,985,065.00	177,563,757,707.00	(2,041,227,358.00)	98.86	177,563,757,707.00	(2,041,227,358.00)	98.86
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	289,894,369,366.25	263,637,636,747.20	(26,256,732,619.05)	90.94	263,637,636,747.20	(26,256,732,619.05)	90.94
2.2.3	Belanja Modal	350,720,259,745.00	309,448,505,895.00	(41,271,753,850.00)	88.23	309,448,505,895.00	(41,271,753,850.00)	88.23
	Jumlah Belanja	1,912,100,759,618.00	1,814,662,262,214.36	(97,438,497,403.64)	94.90	1,814,662,262,214.36	(97,438,497,403.64)	94.90
	surplus (defisit)	(95,443,817,524.00)	(28,751,186,984.21)	66,692,630,539.79	30.12	(28,751,186,984.21)	66,692,630,539.79	30.12
3.	PEMBIAYAAN DAERAH							
3.1	Penerimaan Pembiayaan	108,161,445,444.40	117,161,445,444.40	9,000,000,000.00	108.32	117,161,445,444.40	9,000,000,000.00	108.32
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	108,161,445,444.40	117,161,445,444.40	9,000,000,000.00	108.32	117,161,445,444.40	9,000,000,000.00	108.32
	Jumlah penerimaan Pembiayaan	108,161,445,444.40	117,161,445,444.40	9,000,000,000.00	108.32	117,161,445,444.40	9,000,000,000.00	108.32
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	12,717,627,920.00	12,717,627,920.00	-	100.00	12,717,627,920.00	-	100.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10,422,000,000.00	10,422,000,000.00	-	100.00	10,422,000,000.00	-	100.00
3.2.3	Pembayaran pokok utang	2,256,548,000.00	2,256,548,000.00	-	-	2,256,548,000.00	-	-
3.2.5	Restitusi atas kelebihan penetapan Pajak	39,079,920.00	39,079,920.00	-	100.00	39,079,920.00	-	100.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12,717,627,920.00	12,717,627,920.00	-	100.00	12,717,627,920.00	-	100.00
	Pembiayaan Netto	95,443,817,524.00	104,443,817,524.40	9,000,000,000.40	109.43	104,443,817,524.40	9,000,000,000.40	109.43
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	-	75,692,630,540.19	75,692,630,540.19		75,692,630,540.19	75,692,630,540.19	

B. REKOMENDASI :

1. Agar Pemerintah Kabupaten Rembang segera mentertibkan pengelolaan aset tanah hasil reklamasi di Pelabuhan Tanjung Bonang seluas 18,30 Ha dan segera diproses penerbitan sertifikat HPLnya sehingga potensi pendapatan sebesar Rp. 32,93 Milyar atas pemanfaatan tanah hasil reklamasi oleh pihak ketiga tanpa adanya perjanjian dapat terealisasi sehingga bisa menjadi penunjang PAD Kabupaten Rembang.
2. Agar Dinas Indakop dan UMKM menindaklanjuti hasil temuan BPK terkait kekurangan volume pekerjaan Penataan Kawasan eks Pasar Pamotan dan eks Kawedanan Pamotan sebesar Rp.140.481.829,00 (Seratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah)
3. Perencanaan kegiatan harus direncanakan pada satu tahun sebelumnya atau T-1 agar segera dapat dilelangkan diawal tahun, sehingga kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun
4. DPU Taru dan DPKP Kabupaten Rembang agar segera menyelesaikan catatan dan temuan asset dari pemeriksaan LHP BPK-RI Tahun 2018
5. Untuk meringankan beban kerja Pemerintah Daerah, perlu adanya penambahan tenaga harian lepas sesuai dengan kompetensinya
6. Kekurangan volume pekerjaan Jalan Kepohagung – Kerep - Kunir atau kelebihan bayar sebesar Rp. 101.899.412,96 (Seratus satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah, sembilan puluh enam sen) agar segera disetorkan ke Kas Daerah maksimal tanggal 28 Juli 2019 (sesuai temuan BPK).
7. Pelaksana kegiatan atau kontraktor pekerjaan Jalan Sedan – Pandangan agar dievaluasi pekerjaannya, karena ada kekurangan

volume pekerjaan atau kelebihan bayar sebesar Rp. 916.464.300,00 (Sembilan ratus enam belas juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

Besarnya kekurangan volume ini menunjukkan konsultan pengawas tidak bekerja secara optimal. Temuan hasil pemeriksaan BPK pada 9 titik menunjukkan bahwa konsultan pengawas tidak melaksanakan kewajiban dengan baik, kami mengkhawatirkan, manakala pemeriksaan dilakukan pada lebih banyak titik maka akan ditemukan semakin banyak kekurangan volume pekerjaan, artinya semakin besar pula potensi kerugian Negara / Daerah, sehingga DPU Taru harus mengevaluasi kinerja konsultan pengawas serta memberikan sanksi yang jelas.

8. Kegiatan yang menyangkut fasilitas khusus dan fasilitas umum pada DPKP agar dibuatkan Perda sesuai dengan rekomendasi BPK.
9. DPKP agar meminta kepada semua Pengembang Perumahan di Kabupaten Rembang untuk menyerahkan sarana dan prasarana serta utilitas Perumahan dan Permukiman yang dibangun, kepada Pemerintah Kabupaten Rembang
10. Pembahasan Raperda Non APBD agar dapat dilakukan lebih awal, tiga tahun terakhir, Raperda Non APBD selalu dikirim ke DPRD untuk dibahas bersama pada menjelang akhir-akhir tahun sehingga pembahasannya tidak efektif.
11. Perlu ada Zona Khusus untuk Penempatan PKL yang strategis untuk pengembangan usaha
12. Agar pihak manajemen P.T. Rembang Migas Energi memberikan progres terkait pengurusan Gas Bumi. Mengingat sudah mendapatkan penyertaan modal dari Pemkab sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).

13. Masih banyak kendaraan plat nomor luar Daerah Rembang yang masih operasi di Kabupaten Rembang, mohon untuk lebih mengintensifkan sosialisasi agar merubah plat nomor kendaraan menjadi K - D sehingga memperbesar pendapatan pajak kendaraan untuk Kabupaten Rembang.
14. Perlu tambahan tenaga fungsional (tenaga Instruktur untuk BLK) yang bersertifikat dari Kementerian.
15. Agar kapal lain dar luar Wilayah Kabupaten Rembang yang bersandar di TPI Rembang, menjual hasil tangkapan ikannya di TPI Kabupaten Rembang untuk mendongrak PAD Kabupaten Rembang sektor perikanan.

VI. PENUTUP

Demikian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam Fersetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna II (kedua) DPRD Kabupaten Rembang

Rembang, 8 Juli 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
BADAN ANGGARAN**

Ketua,

Sekretaris,

H. MAJID KAMIL, MZ

Drs. DRUPODO, MSi

IV. HASIL PEMBAHASAN

RINGKASAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD 2018

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PEMBAHASAN		
		SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%	MENJADI	BERTAMBAH (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PENDAPATAN DAERAH	1,816,656,942,094.00	1,785,911,075,230.15	(30,745,866,863.85)	98.31	1,785,911,075,230.15	(30,745,866,863.85)	98.31
1.1	Pendapatan Asli Daerah	304,351,906,094.00	296,676,436,263.15	(7,675,469,830.85)	97.48	296,676,436,263.15	(7,675,469,830.85)	97.48
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	96,286,250,000.00	100,438,352,553.00	4,152,102,553.00	104.31	100,438,352,553.00	4,152,102,553.00	104.31
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	22,858,499,000.00	21,441,590,432.00	(1,416,908,568.00)	93.80	21,441,590,432.00	(1,416,908,568.00)	93.80
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17,679,000,000.00	18,775,303,058.00	1,096,303,058.00	106.20	18,775,303,058.00	1,096,303,058.00	106.20
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	167,528,157,094.00	156,021,190,220.15	(11,506,966,873.85)	93.13	156,021,190,220.15	(11,506,966,873.85)	93.13
1.2	Dana Perimbangan	1,100,652,496,000.00	1,071,215,246,998.00	(29,437,249,002.00)	97.33	1,071,215,246,998.00	(29,437,249,002.00)	97.33
1.2.2	Dana Transfer Umum	818,442,437,000.00	812,596,054,494.00	(5,846,382,506.00)	99.29	812,596,054,494.00	(5,846,382,506.00)	99.29
1.2.3	Dana Transfer Khusus	282,210,059,000.00	258,619,192,504.00	(23,590,866,496.00)	91.64	258,619,192,504.00	(23,590,866,496.00)	91.64
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	411,652,540,000.00	418,019,391,969.00	6,366,851,969.00	101.55	418,019,391,969.00	6,366,851,969.00	101.55
1.3.1	Hibah	57,455,920,000.00	56,967,950,020.00	(487,969,980.00)	99.15	56,967,950,020.00	(487,969,980.00)	99.15
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya	95,000,000,000.00	105,216,144,949.00	10,216,144,949.00	110.75	105,216,144,949.00	10,216,144,949.00	110.75
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	229,010,130,000.00	229,010,130,000.00	-	100.00	229,010,130,000.00	-	100.00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	30,186,490,000.00	26,825,167,000.00	(3,361,323,000.00)	88.86	26,825,167,000.00	(3,361,323,000.00)	88.86
2	BELANJA DAERAH	1,912,100,759,618.00	1,814,662,262,214.36	(97,438,497,403.64)	94.90	1,814,662,262,214.36	(97,438,497,403.64)	94.90
2.1	Belanja Tidak Langsung	1,091,881,145,441.75	1,064,012,361,865.16	(27,868,783,576.59)	97.45	1,064,012,361,865.16	(27,868,783,576.59)	97.45
2.1.1	Belanja Pegawai	668,354,042,426.75	649,572,921,265.16	(18,781,121,161.59)	97.19	649,572,921,265.16	(18,781,121,161.59)	97.19
2.1.2	Belanja Bunga	1,451,355,415.00	-	(1,451,355,415.00)	-	-	(1,451,355,415.00)	-
2.1.4	Belanja Hibah	61,787,200,000.00	55,764,388,000.00	(6,022,812,000.00)	90.25	55,764,388,000.00	(6,022,812,000.00)	90.25
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8,980,000,000.00	8,333,700,000.00	(646,300,000.00)	92.80	8,333,700,000.00	(646,300,000.00)	92.80
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	10,765,819,900.00	10,765,819,900.00	-	100.00	10,765,819,900.00	-	100.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa	340,042,727,700.00	339,575,532,700.00	(467,195,000.00)	99.86	339,575,532,700.00	(467,195,000.00)	99.86
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	500,000,000.00	-	(500,000,000.00)	-	-	(500,000,000.00)	-
2.2	Belanja Langsung	820,219,614,176.25	750,649,900,349.20	(69,569,713,827.05)	91.52	750,649,900,349.20	(69,569,713,827.05)	91.52
2.2.1	Belanja Pegawai	179,604,985,065.00	177,563,757,707.00	(2,041,227,358.00)	98.86	177,563,757,707.00	(2,041,227,358.00)	98.86
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	289,894,369,366.25	263,637,636,747.20	(26,256,732,619.05)	90.94	263,637,636,747.20	(26,256,732,619.05)	90.94
2.2.3	Belanja Modal	350,720,259,745.00	309,446,505,895.00	(41,273,753,850.00)	88.23	309,446,505,895.00	(41,273,753,850.00)	88.23
	Jumlah Belanja	1,912,100,759,618.00	1,814,662,262,214.36	(97,438,497,403.64)	94.90	1,814,662,262,214.36	(97,438,497,403.64)	94.90
	surplus (devisit)	(95,443,817,524.00)	(28,751,186,984.21)	66,692,630,539.79	30.12	(28,751,186,984.21)	66,692,630,539.79	30.12
3	PEMBIAYAAN DAERAH							
3.1	Penerimaan Pembiayaan	108,161,445,444.00	117,161,445,444.40	9,000,000,000.40	108.32	117,161,445,444.40	9,000,000,000.40	108.32
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	108,161,445,444.00	117,161,445,444.40	9,000,000,000.40	108.32	117,161,445,444.40	9,000,000,000.40	108.32
	Jumlah penerimaan Pembiayaan	108,161,445,444.00	117,161,445,444.40	9,000,000,000.40	108.32	117,161,445,444.40	9,000,000,000.40	108.32
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	12,717,627,920.00	12,717,627,920.00	-	100.00	12,717,627,920.00	-	100.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10,422,000,000.00	10,422,000,000.00	-	100.00	10,422,000,000.00	-	100.00
3.2.3	Pembayaran pokok utang	2,256,548,000.00	2,256,548,000.00	-	-	2,256,548,000.00	-	-
3.2.5	Restitusi atas kelebihan penetapan Pajak	39,079,920.00	39,079,920.00	-	100.00	39,079,920.00	-	100.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12,717,627,920.00	12,717,627,920.00	-	100.00	12,717,627,920.00	-	100.00
	Pembiayaan Netto	95,443,817,524.00	104,443,817,524.40	9,000,000,000.40	109.43	104,443,817,524.40	9,000,000,000.40	109.43
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	-	75,692,630,540.19	75,692,630,540.19		75,692,630,540.19	75,692,630,540.19	

REKAPITULASI ANGGARAN SKPD

NO.	SKPD	JUMLAH (Rp)			
		PENDAPATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	3	4	5	6=4+5
1	DINPENDIKPORA	13,770,000.00	406,046,413,562.00	152,134,009,835.00	558,180,423,397.00
2	DINAS KESEHATAN	42,919,634,184.00	48,405,734,000.00	91,674,200,133.00	140,079,934,133.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	100,000,000,000.00	25,680,488,000.00	126,617,799,648.25	152,298,287,648.25
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1,020,000,000.00	8,455,413,000.00	153,368,471,454.00	161,823,884,454.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1,115,000,000.00	4,721,721,000.00	18,940,560,640.00	23,662,281,640.00
6	SATPOL PP		6,147,762,000.00	4,701,326,000.00	10,849,088,000.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1,145,881,000.00	1,715,648,000.00	2,861,529,000.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		3,100,732,000.00	3,486,000,000.00	6,586,732,000.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		4,961,929,000.00	13,804,229,600.00	18,766,158,600.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	20,750,000.00	4,873,572,000.00	2,885,000,000.00	7,758,572,000.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	121,535,000.00	13,077,985,000.00	38,528,643,000.00	51,606,628,000.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	130,000,000.00	8,025,333,000.00	12,341,252,000.00	20,366,585,000.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		3,351,125,000.00	3,729,591,000.00	7,080,716,000.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		3,273,800,000.00	4,484,975,000.00	7,758,775,000.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	1,361,924,500.00	5,312,352,000.00	20,886,047,316.00	26,198,399,316.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	356,745,000.00	2,452,484,000.00	2,412,000,000.00	4,864,484,000.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	732,000,000.00	2,688,044,000.00	5,422,266,000.00	8,110,310,000.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		2,804,599,000.00	2,149,000,000.00	4,953,599,000.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	13,216,728,265.00	3,589,792,000.00	24,644,699,000.00	28,234,491,000.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	3,637,277,765.00	10,290,155,000.00	24,080,521,550.00	34,370,676,550.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		19,499,558,000.00	-	19,499,558,000.00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		770,173,000.00	-	770,173,000.00
23	SEKRETARIAT DAERAH	9,392,000,000.00	14,720,583,000.00	38,415,840,000.00	53,136,423,000.00
24	SEKRETARIAT DPRD		4,483,051,000.00	31,578,817,000.00	36,061,868,000.00
25	KECAMATAN REMBANG		5,403,966,000.00	3,692,050,000.00	9,096,016,000.00
26	KECAMATAN KALIORI		2,331,289,000.00	466,458,000.00	2,797,747,000.00
27	KECAMATAN SULANG		1,999,332,000.00	812,216,000.00	2,811,548,000.00
28	KECAMATAN SUMBER		1,845,878,000.00	673,000,000.00	2,518,878,000.00
29	KECAMATAN BULU		1,688,759,000.00	480,060,000.00	2,168,819,000.00
30	KECAMATAN LASEM		2,267,761,000.00	628,612,000.00	2,896,373,000.00
31	KECAMATAN PANCUR		2,440,652,000.00	489,228,000.00	2,929,880,000.00
32	KECAMATAN SLUKE		1,553,935,000.00	512,600,000.00	2,066,535,000.00
33	KECAMATAN PAMOTAN		1,796,001,000.00	890,000,000.00	2,686,001,000.00
34	KECAMATAN GUNEM		1,621,915,000.00	489,300,000.00	2,111,215,000.00
35	KECAMATAN SALE		1,741,850,000.00	645,100,000.00	2,386,950,000.00
36	KECAMATAN KRAGAN		2,171,997,000.00	815,394,000.00	2,987,391,000.00
37	KECAMATAN SEDAN		2,042,340,000.00	554,925,000.00	2,597,265,000.00
38	KECAMATAN SARANG		2,344,685,000.00	719,700,000.00	3,064,385,000.00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN		4,082,376,000.00	7,078,828,000.00	11,161,204,000.00
40	BAPPEDA		4,293,444,000.00	4,855,672,000.00	9,149,116,000.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1,642,619,577,380.00	440,316,568,879.75	12,811,574,000.00	453,128,142,879.75
a	(SKPD)	130,314,541,380.00	16,789,465,864.75	12,811,574,000.00	29,601,039,864.75
b	(PPKD)	1,512,305,036,000.00	423,527,103,015.00	-	423,527,103,015.00
42	BKD		4,059,717,000.00	5,604,000,000.00	9,663,717,000.00
	JUMLAH	1,816,656,942,094.00	1,091,881,145,441.75	820,219,614,176.25	1,912,100,759,618.00

REKAPITULASI ANGGARAN SKPD

NO.	SKPD	JUMLAH (Rp)			
		PENDAPATAN	REALISASI		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	7	8	9	10=8+9
1	DINPENDIKPORA	8,590,000.00	392,819,209,421.00	144,331,418,186.00	537,150,627,607.00
2	DINAS KESEHATAN	42,263,533,399.00	48,106,407,341.00	83,349,664,319.00	131,456,071,660.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	93,667,508,828.99	26,842,330,061.16	110,798,025,663.20	137,640,355,724.36
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1,061,825,500.00	8,251,626,162.00	141,048,287,585.00	149,299,913,747.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1,832,990,000.00	4,634,001,258.00	15,905,468,687.00	20,539,469,945.00
6	SATPOL PP		5,936,219,414.00	4,568,060,538.00	10,504,279,952.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1,091,840,677.00	1,698,303,566.00	2,790,144,243.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		2,816,981,082.00	3,354,894,300.00	6,171,875,382.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		4,803,685,206.00	12,081,024,930.00	16,884,710,136.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	5,517,000.00	4,556,966,842.00	2,796,789,323.00	7,353,756,165.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	123,675,000.00	12,819,045,754.00	36,110,226,191.00	48,929,271,945.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	130,000,000.00	7,889,834,741.00	11,954,577,650.00	19,844,412,391.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		3,304,647,397.00	3,633,001,281.00	6,937,648,678.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		3,187,699,335.00	4,455,162,118.00	7,642,861,453.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	1,113,078,970.00	5,177,362,598.00	20,767,426,819.00	25,944,789,417.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	372,827,909.00	2,398,293,994.00	2,365,516,434.00	4,763,810,428.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1,025,057,000.00	2,662,789,452.00	4,843,286,259.00	7,506,075,711.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		2,737,417,989.00	2,123,086,248.00	4,860,504,237.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	12,467,485,505.00	3,455,725,481.00	18,843,336,467.00	22,299,061,948.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	2,944,342,768.00	9,909,680,814.00	22,990,538,435.00	32,900,219,249.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		19,103,558,590.00	-	19,103,558,590.00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		769,571,184.00	-	769,571,184.00
23	SEKRETARIAT DAERAH	10,655,219,601.00	14,459,840,790.00	37,193,794,364.00	51,653,635,154.00
24	SEKRETARIAT DPRD		4,421,468,438.00	25,765,422,964.00	30,186,891,402.00
25	KECAMATAN REMBANG		5,166,900,081.00	3,465,710,559.00	8,632,610,640.00
26	KECAMATAN KALIORI		2,209,761,593.00	461,937,152.00	2,671,698,745.00
27	KECAMATAN SULANG		1,900,755,942.00	800,807,000.00	2,701,562,942.00
28	KECAMATAN SUMBER		1,739,782,895.00	666,858,070.00	2,406,640,965.00
29	KECAMATAN BULU		1,561,120,618.00	474,293,700.00	2,035,414,318.00
30	KECAMATAN LASEM		2,235,413,707.00	588,065,958.00	2,823,479,665.00
31	KECAMATAN PANCUR		2,212,385,575.00	483,682,751.00	2,696,068,326.00
32	KECAMATAN SLUKE		1,510,417,880.00	508,608,311.00	2,019,026,191.00
33	KECAMATAN PAMOTAN		1,728,211,016.00	840,350,000.00	2,568,561,016.00
34	KECAMATAN GUNEM		1,538,294,491.00	482,256,941.00	2,020,551,432.00
35	KECAMATAN SALE		1,629,643,617.00	512,120,000.00	2,141,763,617.00
36	KECAMATAN KRAGAN		2,094,377,049.00	800,881,000.00	2,895,258,049.00
37	KECAMATAN SEDAN		1,998,566,572.00	534,604,500.00	2,533,171,072.00
38	KECAMATAN SARANG		2,275,251,056.00	713,052,779.00	2,988,303,835.00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN		3,876,969,310.00	6,835,145,470.00	10,712,114,780.00
40	BAPPEDA		3,634,257,643.00	4,835,228,542.00	8,469,486,185.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1,618,239,423,749.16	430,520,314,697.00	11,718,883,433.00	442,239,198,130.00
a	(SKPD)	129,004,784,782.16	16,080,874,097.00	11,718,883,433.00	27,799,757,530.00
b	(PPKD)	1,489,234,638,967.00	414,439,440,600.00	-	414,439,440,600.00
42	BKD		4,023,734,102.00	4,950,101,856.00	8,973,835,958.00
	JUMLAH	1,785,911,075,230.15	1,064,012,361,865.16	750,649,900,349.20	1,814,662,262,214.36

REKAPITULASI ANGGARAN SKPD

NO.	SKPD	JUMLAH (Rp)			
		BERTAMBAH (BERKURANG)			
		PENDAPATAN	BELANJA		JUMLAH
1	2	11=7-3	12=8-4	13=9-5	14=12+13
1	DINPENDIKPORA	(5,180,000.00)	(13,227,204,141.00)	(7,802,591,649.00)	(21,029,795,790.00)
2	DINAS KESEHATAN	(656,100,785.00)	(299,326,659.00)	(8,324,535,814.00)	(8,623,862,473.00)
3	RSUD dr R. SOETRASNO	(6,332,491,171.01)	1,161,842,061.16	(15,819,773,985.05)	(14,657,931,923.89)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	41,825,500.00	(203,786,838.00)	(12,320,183,869.00)	(12,523,970,707.00)
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	717,990,000.00	(87,719,742.00)	(3,035,091,953.00)	(3,122,811,695.00)
6	SATPOL PP	-	(211,542,586.00)	(133,265,462.00)	(344,808,048.00)
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	(54,040,323.00)	(17,344,434.00)	(71,384,757.00)
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	(283,750,918.00)	(131,105,700.00)	(414,856,618.00)
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	(158,243,794.00)	(1,723,204,670.00)	(1,881,448,464.00)
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	(15,233,000.00)	(316,605,158.00)	(88,210,677.00)	(404,815,835.00)
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	2,140,000.00	(258,939,246.00)	(2,418,416,809.00)	(2,677,356,055.00)
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	(135,498,259.00)	(386,674,350.00)	(522,172,609.00)
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	(46,477,603.00)	(96,589,719.00)	(143,067,322.00)
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	(86,100,665.00)	(29,812,882.00)	(115,913,547.00)
15	DINAS PERHUBUNGAN	(248,845,530.00)	(134,989,402.00)	(118,620,497.00)	(253,609,899.00)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16,082,909.00	(54,190,006.00)	(46,483,566.00)	(100,673,572.00)
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	293,057,000.00	(25,254,548.00)	(578,979,741.00)	(604,234,289.00)
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	(67,181,011.00)	(25,913,752.00)	(93,094,763.00)
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(749,242,760.00)	(134,066,519.00)	(5,801,362,533.00)	(5,935,429,052.00)
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	(692,934,997.00)	(380,474,186.00)	(1,089,983,115.00)	(1,470,457,301.00)
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	(395,999,410.00)	-	(395,999,410.00)
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	(601,816.00)	-	(601,816.00)
23	SEKRETARIAT DAERAH	1,263,219,601.00	(260,742,210.00)	(1,222,045,636.00)	(1,482,787,846.00)
24	SEKRETARIAT DPRD	-	(61,582,562.00)	(5,813,394,036.00)	(5,874,976,598.00)
25	KECAMATAN REMBANG	-	(237,065,919.00)	(226,339,441.00)	(463,405,360.00)
26	KECAMATAN KALIORI	-	(121,527,407.00)	(4,520,848.00)	(126,048,255.00)
27	KECAMATAN SULANG	-	(98,576,058.00)	(11,409,000.00)	(109,985,058.00)
28	KECAMATAN SUMBER	-	(106,095,105.00)	(6,141,930.00)	(112,237,035.00)
29	KECAMATAN BULU	-	(127,638,382.00)	(5,766,300.00)	(133,404,682.00)
30	KECAMATAN LASEM	-	(32,347,293.00)	(40,546,042.00)	(72,893,335.00)
31	KECAMATAN PANCUR	-	(228,266,425.00)	(5,545,249.00)	(233,811,674.00)
32	KECAMATAN SLUKE	-	(43,517,120.00)	(3,991,689.00)	(47,508,809.00)
33	KECAMATAN PAMOTAN	-	(67,789,984.00)	(49,650,000.00)	(117,439,984.00)
34	KECAMATAN GUNEM	-	(83,620,509.00)	(7,043,059.00)	(90,663,568.00)
35	KECAMATAN SALE	-	(112,206,383.00)	(132,980,000.00)	(245,186,383.00)
36	KECAMATAN KRAGAN	-	(77,619,951.00)	(14,513,000.00)	(92,132,951.00)
37	KECAMATAN SEDAN	-	(43,773,428.00)	(20,320,500.00)	(64,093,928.00)
38	KECAMATAN SARANG	-	(69,433,944.00)	(6,647,221.00)	(76,081,165.00)
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	(205,406,690.00)	(243,682,530.00)	(449,089,220.00)
40	BAPPEDA	-	(659,186,357.00)	(20,443,458.00)	(679,629,815.00)
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(24,380,153,630.84)	(9,796,254,182.75)	(1,092,690,567.00)	(10,888,944,749.75)
a	(SKPD)	(1,309,756,597.84)	(708,591,767.75)	(1,092,690,567.00)	(1,801,282,334.75)
b	(PPKD)	(23,070,397,033.00)	(9,087,662,415.00)	-	(9,087,662,415.00)
42	BKD	-	(35,982,898.00)	(653,898,144.00)	(689,881,042.00)
	JUMLAH	(30,745,866,863.85)	(27,868,783,576.59)	(69,569,713,827.05)	(97,438,497,403.64)

REKAPITULASI ANGGARAN SKPD

NO.	SKPD	BERTAMBAH (BERKURANG)			
		%			
		PENDAPATAN	BELANJA		
BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG		JUMLAH		
1	2	15	16	17	18
1	DINPENDIKPORA	62.38	96.74	94.87	96.23
2	DINAS KESEHATAN	98.47	99.38	90.92	93.84
3	RSUD dr R. SOETRASNO	93.67	104.52	87.51	90.38
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	104.10	97.59	91.97	92.26
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	164.39	-	83.98	86.80
6	SATPOL PP		96.56	97.17	96.82
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		95.28	98.99	97.51
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		90.85	96.24	93.70
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		96.81	87.52	89.97
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	26.59	93.50	96.94	94.78
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	101.76	98.02	93.72	94.81
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	100.00	98.31	96.87	97.44
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		98.61	97.41	97.98
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		97.37	99.34	98.51
15	DINAS PERHUBUNGAN	81.73	97.46	99.43	99.03
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	104.51		98.07	97.93
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	140.04	99.06	89.32	92.55
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		97.60	98.79	98.12
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	94.33	96.27	76.46	78.98
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	80.95	96.30	95.47	95.72
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		97.97		97.97
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		99.92		99.92
23	SEKRETARIAT DAERAH	113.45	98.23	96.82	97.21
24	SEKRETARIAT DPRD		98.63	81.59	83.71
25	KECAMATAN REMBANG		95.61	93.87	94.91
26	KECAMATAN KALIORI		94.79	99.03	95.49
27	KECAMATAN SULANG		95.07	98.60	96.09
28	KECAMATAN SUMBER		94.25	99.09	95.54
29	KECAMATAN BULU		92.44	98.80	93.85
30	KECAMATAN LASEM		98.57	93.55	97.48
31	KECAMATAN PANCUR		90.65	98.87	92.02
32	KECAMATAN SLUKE		97.20	99.22	97.70
33	KECAMATAN PAMOTAN		96.23	94.42	95.63
34	KECAMATAN GUNEM		94.84	98.56	95.71
35	KECAMATAN SALE		93.56	79.39	89.73
36	KECAMATAN KRAGAN		96.43	98.22	96.92
37	KECAMATAN SEDAN		97.86	96.34	97.53
38	KECAMATAN SARANG		97.04	99.08	97.52
39	INSPEKTORAT KABUPATEN		94.97	96.56	95.98
40	BAPPEDA		84.65	99.58	92.57
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	98.52	97.78	91.47	97.60
a	(SKPD)	98.99	95.78	91.47	93.91
b	(PPKD)	98.47	97.85		97.85
42	BKD		99.11	88.33	92.86
	JUMLAH	98.31	97.45	91.52	94.90

REKAPITULASI ANGGARAN SKPD

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		MENJADI			
		PENDAPATAN	BELANJA		JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG				
1	2	19	20	21	22=20+21
1	DINPENDIKPORA	8,590,000.00	392,819,209,421.00	144,331,418,186.00	537,150,627,607.00
2	DINAS KESEHATAN	42,263,533,399.00	48,106,407,341.00	83,349,664,319.00	131,456,071,660.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	93,667,508,828.99	26,842,330,061.16	110,798,025,663.20	137,640,355,724.36
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1,061,825,500.00	8,251,626,162.00	141,048,287,585.00	149,299,913,747.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1,832,990,000.00	4,634,001,258.00	15,905,468,687.00	20,539,469,945.00
6	SATPOL PP		5,936,219,414.00	4,568,060,538.00	10,504,279,952.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1,091,840,677.00	1,698,303,566.00	2,790,144,243.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		2,816,981,082.00	3,354,894,300.00	6,171,875,382.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		4,803,685,206.00	12,081,024,930.00	16,884,710,136.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	5,517,000.00	4,556,966,842.00	2,796,789,323.00	7,353,756,165.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	123,675,000.00	12,819,045,754.00	36,110,226,191.00	48,929,271,945.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	130,000,000.00	7,889,834,741.00	11,954,577,650.00	19,844,412,391.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		3,304,647,397.00	3,633,001,281.00	6,937,648,678.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		3,187,699,335.00	4,455,162,118.00	7,642,861,453.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	1,113,078,970.00	5,177,362,598.00	20,767,426,819.00	25,944,789,417.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	372,827,909.00	2,398,293,994.00	2,365,516,434.00	4,763,810,428.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1,025,057,000.00	2,662,789,452.00	4,843,286,259.00	7,506,075,711.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		2,737,417,989.00	2,123,086,248.00	4,860,504,237.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	12,467,485,505.00	3,455,725,481.00	18,843,336,467.00	22,299,061,948.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	2,944,342,768.00	9,909,680,814.00	22,990,538,435.00	32,900,219,249.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		19,103,558,590.00	-	19,103,558,590.00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		769,571,184.00	-	769,571,184.00
23	SEKRETARIAT DAERAH	10,655,219,601.00	14,459,840,790.00	37,193,794,364.00	51,653,635,154.00
24	SEKRETARIAT DPRD		4,421,468,438.00	25,765,422,964.00	30,186,891,402.00
25	KECAMATAN REMBANG		5,166,900,081.00	3,465,710,559.00	8,632,610,640.00
26	KECAMATAN KALIORI		2,209,761,593.00	461,937,152.00	2,671,698,745.00
27	KECAMATAN SULANG		1,900,755,942.00	800,807,000.00	2,701,562,942.00
28	KECAMATAN SUMBER		1,739,782,895.00	666,858,070.00	2,406,640,965.00
29	KECAMATAN BULU		1,561,120,618.00	474,293,700.00	2,035,414,318.00
30	KECAMATAN LASEM		2,235,413,707.00	588,065,958.00	2,823,479,665.00
31	KECAMATAN PANCUR		2,212,385,575.00	483,682,751.00	2,696,068,326.00
32	KECAMATAN SLUKE		1,510,417,880.00	508,608,311.00	2,019,026,191.00
33	KECAMATAN PAMOTAN		1,728,211,016.00	840,350,000.00	2,568,561,016.00
34	KECAMATAN GUNEM		1,538,294,491.00	482,256,941.00	2,020,551,432.00
35	KECAMATAN SALE		1,629,643,617.00	512,120,000.00	2,141,763,617.00
36	KECAMATAN KRAGAN		2,094,377,049.00	800,881,000.00	2,895,258,049.00
37	KECAMATAN SEDAN		1,998,566,572.00	534,604,500.00	2,533,171,072.00
38	KECAMATAN SARANG		2,275,251,056.00	713,052,779.00	2,988,303,835.00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN		3,876,969,310.00	6,835,145,470.00	10,712,114,780.00
40	BAPPEDA		3,634,257,643.00	4,835,228,542.00	8,469,486,185.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1,618,239,423,749.16	430,520,314,697.00	11,718,883,433.00	442,239,198,130.00
a	(SKPD)	129,004,784,782.16	16,080,874,097.00	11,718,883,433.00	27,799,757,530.00
b	(PPKD)	1,489,234,638,967.00	414,439,440,600.00	-	414,439,440,600.00
42	BKD		4,023,734,102.00	4,950,101,856.00	8,973,835,958.00
	JUMLAH	1,785,911,075,230.15	1,064,012,361,865.16	750,649,900,349.20	1,814,662,262,214.36

REKAPITULASI ANGGARAN SKPD

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		BERTAMBAH (BERKURANG)			
		PENDAPATAN	BELANJA		JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG				
1	2	23=19-3	24=20-4	25=21-5	26=24+25
1	DINPENDIKPORA	(5,180,000.00)	(13,227,204,141.00)	(7,802,591,649.00)	(21,029,795,790.00)
2	DINAS KESEHATAN	(656,100,785.00)	(299,326,659.00)	(8,324,535,814.00)	(8,623,862,473.00)
3	RSUD dr R. SOETRASNO	(6,332,491,171.01)	1,161,842,061.16	(15,819,773,985.05)	(14,657,931,923.89)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	41,825,500.00	(203,786,838.00)	(12,320,183,869.00)	(12,523,970,707.00)
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	717,990,000.00	(87,719,742.00)	(3,035,091,953.00)	(3,122,811,695.00)
6	SATPOL PP	-	(211,542,586.00)	(133,265,462.00)	(344,808,048.00)
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	(54,040,323.00)	(17,344,434.00)	(71,384,757.00)
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	(283,750,918.00)	(131,105,700.00)	(414,856,618.00)
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	(158,243,794.00)	(1,723,204,670.00)	(1,881,448,464.00)
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	(15,233,000.00)	(316,605,158.00)	(88,210,677.00)	(404,815,835.00)
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	2,140,000.00	(258,939,246.00)	(2,418,416,809.00)	(2,677,356,055.00)
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	(135,498,259.00)	(386,674,350.00)	(522,172,609.00)
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	(46,477,603.00)	(96,589,719.00)	(143,067,322.00)
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	(86,100,665.00)	(29,812,882.00)	(115,913,547.00)
15	DINAS PERHUBUNGAN	(248,845,530.00)	(134,989,402.00)	(118,620,497.00)	(253,609,899.00)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16,082,909.00	(54,190,006.00)	(46,483,566.00)	(100,673,572.00)
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	293,057,000.00	(25,254,548.00)	(578,979,741.00)	(604,234,289.00)
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	(67,181,011.00)	(25,913,752.00)	(93,094,763.00)
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(749,242,760.00)	(134,066,519.00)	(5,801,362,533.00)	(5,935,429,052.00)
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	(692,934,997.00)	(380,474,186.00)	(1,089,983,115.00)	(1,470,457,301.00)
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	(395,999,410.00)	-	(395,999,410.00)
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	(601,816.00)	-	(601,816.00)
23	SEKRETARIAT DAERAH	1,263,219,601.00	(260,742,210.00)	(1,222,045,636.00)	(1,482,787,846.00)
24	SEKRETARIAT DPRD	-	(61,582,562.00)	(5,813,394,036.00)	(5,874,976,598.00)
25	KECAMATAN REMBANG	-	(237,065,919.00)	(226,339,441.00)	(463,405,360.00)
26	KECAMATAN KALIORI	-	(121,527,407.00)	(4,520,848.00)	(126,048,255.00)
27	KECAMATAN SULANG	-	(98,576,058.00)	(11,409,000.00)	(109,985,058.00)
28	KECAMATAN SUMBER	-	(106,095,105.00)	(6,141,930.00)	(112,237,035.00)
29	KECAMATAN BULU	-	(127,638,382.00)	(5,766,300.00)	(133,404,682.00)
30	KECAMATAN LASEM	-	(32,347,293.00)	(40,546,042.00)	(72,893,335.00)
31	KECAMATAN PANCUR	-	(228,266,425.00)	(5,545,249.00)	(233,811,674.00)
32	KECAMATAN SLUKE	-	(43,517,120.00)	(3,991,689.00)	(47,508,809.00)
33	KECAMATAN PAMOTAN	-	(67,789,984.00)	(49,650,000.00)	(117,439,984.00)
34	KECAMATAN GUNEM	-	(83,620,509.00)	(7,043,059.00)	(90,663,568.00)
35	KECAMATAN SALE	-	(112,206,383.00)	(132,980,000.00)	(245,186,383.00)
36	KECAMATAN KRAGAN	-	(77,619,951.00)	(14,513,000.00)	(92,132,951.00)
37	KECAMATAN SEDAN	-	(43,773,428.00)	(20,320,500.00)	(64,093,928.00)
38	KECAMATAN SARANG	-	(69,433,944.00)	(6,647,221.00)	(76,081,165.00)
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	(205,406,690.00)	(243,682,530.00)	(449,089,220.00)
40	BAPPEDA	-	(659,186,357.00)	(20,443,458.00)	(679,629,815.00)
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(24,380,153,630.84)	(9,796,254,182.75)	(1,092,690,567.00)	(10,888,944,749.75)
a	(SKPD)	(1,309,756,597.84)	(708,591,767.75)	(1,092,690,567.00)	(1,801,282,334.75)
b	(PPKD)	(23,070,397,033.00)	(9,087,662,415.00)	-	(9,087,662,415.00)
42	BKD	-	(35,982,898.00)	(653,898,144.00)	(689,881,042.00)
	JUMLAH	(30,745,866,863.85)	(27,868,783,576.59)	(69,569,713,827.05)	(97,438,497,403.64)

REKAPITULASI ANGGARAN SKPD

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		%			
		PENDAPATAN	BELANJA		JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG				
1	2	27	28	29	30
1	DINPENDIKPORA	62.38	96.74	94.87	96.23
2	DINAS KESEHATAN	98.47	99.38	90.92	93.84
3	RSUD dr R. SOETRASNO	93.67	104.52	87.51	90.38
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	104.10	97.59	91.97	92.26
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	164.39		83.98	86.80
6	SATPOL PP		96.56	97.17	96.82
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		95.28	98.99	97.51
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		90.85	96.24	93.70
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		96.81	87.52	89.97
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	26.59	93.50	96.94	94.78
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	101.76	98.02	93.72	94.81
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	100.00	98.31	96.87	97.44
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		98.61	97.41	97.98
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		97.37	99.34	98.51
15	DINAS PERHUBUNGAN	81.73	97.46	99.43	99.03
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	104.51		98.07	97.93
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	140.04	99.06	89.32	92.55
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		97.60	98.79	98.12
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	94.33	96.27	76.46	78.98
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	80.95	96.30	95.47	95.72
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		97.97		97.97
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		99.92		99.92
23	SEKRETARIAT DAERAH	113.45	98.23	96.82	97.21
24	SEKRETARIAT DPRD		98.63	81.59	83.71
25	KECAMATAN REMBANG		95.61	93.87	94.91
26	KECAMATAN KALIORI		94.79	99.03	95.49
27	KECAMATAN SULANG		95.07	98.60	96.09
28	KECAMATAN SUMBER		94.25	99.09	95.54
29	KECAMATAN BULU		92.44	98.80	93.85
30	KECAMATAN LASEM		98.57	93.55	97.48
31	KECAMATAN PANCUR		90.65	98.87	92.02
32	KECAMATAN SLUKE		97.20	99.22	97.70
33	KECAMATAN PAMOTAN		96.23	94.42	95.63
34	KECAMATAN GUNEM		94.84	98.56	95.71
35	KECAMATAN SALE		93.56	79.39	89.73
36	KECAMATAN KRAGAN		96.43	98.22	96.92
37	KECAMATAN SEDAN		97.86	96.34	97.53
38	KECAMATAN SARANG		97.04	99.08	97.52
39	INSPEKTORAT KABUPATEN		94.97	96.56	95.98
40	BAPPEDA		84.65	99.58	92.57
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	98.52	97.78	91.47	97.60
a	(SKPD)	98.99	95.78	91.47	93.91
b	(PPKD)	98.47	97.85		97.85
42	BKD		99.11	88.33	92.86
	JUMLAH	98.31	97.45	91.52	94.90

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	ORGANISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN							JUMLAH
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=3+4+5+6+7+8+9
1	DINPENDIKPORA	406,046,413,562.00	-	-	-	-	-	-	406,046,413,562.00
2	DINAS KESEHATAN	48,405,734,000.00							48,405,734,000.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	25,680,488,000.00							25,680,488,000.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8,455,413,000.00							8,455,413,000.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4,721,721,000.00							4,721,721,000.00
6	SATPOL PP	6,147,762,000.00							6,147,762,000.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1,145,881,000.00							1,145,881,000.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3,100,732,000.00							3,100,732,000.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	4,961,929,000.00							4,961,929,000.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	4,873,572,000.00							4,873,572,000.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	13,077,985,000.00							13,077,985,000.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8,025,333,000.00							8,025,333,000.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3,351,125,000.00							3,351,125,000.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3,273,800,000.00							3,273,800,000.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	5,312,352,000.00							5,312,352,000.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2,452,484,000.00							2,452,484,000.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2,688,044,000.00							2,688,044,000.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2,804,599,000.00							2,804,599,000.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,589,792,000.00							3,589,792,000.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	10,290,155,000.00							10,290,155,000.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	19,499,558,000.00							19,499,558,000.00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	770,173,000.00							770,173,000.00
23	SEKRETARIAT DAERAH	14,720,583,000.00							14,720,583,000.00
24	SEKRETARIAT DPRD	4,483,051,000.00							4,483,051,000.00
25	KECAMATAN REMBANG	5,403,966,000.00							5,403,966,000.00
26	KECAMATAN KALIORI	2,331,289,000.00							2,331,289,000.00
27	KECAMATAN SULANG	1,999,332,000.00							1,999,332,000.00
28	KECAMATAN SUMBER	1,845,878,000.00							1,845,878,000.00
29	KECAMATAN BULU	1,688,759,000.00							1,688,759,000.00
30	KECAMATAN LASEM	2,267,761,000.00							2,267,761,000.00
31	KECAMATAN PANCUR	2,440,652,000.00							2,440,652,000.00
32	KECAMATAN SLUKE	1,553,935,000.00							1,553,935,000.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	1,796,001,000.00							1,796,001,000.00
34	KECAMATAN GUNEM	1,621,915,000.00							1,621,915,000.00
35	KECAMATAN SALE	1,741,850,000.00							1,741,850,000.00
36	KECAMATAN KRAGAN	2,171,997,000.00							2,171,997,000.00
37	KECAMATAN SEDAN	2,042,340,000.00							2,042,340,000.00
38	KECAMATAN SARANG	2,344,685,000.00							2,344,685,000.00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	4,082,376,000.00							4,082,376,000.00
40	BAPPEDA	4,293,444,000.00							4,293,444,000.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	16,789,465,864.75	1,451,355,415.00	61,787,200,000.00	8,980,000,000.00	10,765,819,900.00	340,042,727,700.00	500,000,000.00	440,316,568,879.75
a	(SKPD)	16,789,465,864.75							16,789,465,864.75
b	(PPKD)		1,451,355,415.00	61,787,200,000.00	8,980,000,000.00	10,765,819,900.00	340,042,727,700.00	500,000,000.00	423,527,103,015.00
42	BKD	4,059,717,000.00							4,059,717,000.00
	JUMLAH	668,354,042,426.75	1,451,355,415.00	61,787,200,000.00	8,980,000,000.00	10,765,819,900.00	340,042,727,700.00	500,000,000.00	1,091,881,145,441.75

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	ORGANISASI	REALISASI							JUMLAH
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18= 11+12+13+14+15+16+17
1	DINPENDIKPORA	392,819,209,421.00	-	-	-	-	-	-	392,819,209,421.00
2	DINAS KESEHATAN	48,106,407,341.00	-	-	-	-	-	-	48,106,407,341.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	26,842,330,061.16	-	-	-	-	-	-	26,842,330,061.16
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8,251,626,162.00	-	-	-	-	-	-	8,251,626,162.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4,634,001,258.00	-	-	-	-	-	-	4,634,001,258.00
6	SATPOL PP	5,936,219,414.00	-	-	-	-	-	-	5,936,219,414.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1,091,840,677.00	-	-	-	-	-	-	1,091,840,677.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,816,981,082.00	-	-	-	-	-	-	2,816,981,082.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	4,803,685,206.00	-	-	-	-	-	-	4,803,685,206.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	4,556,966,842.00	-	-	-	-	-	-	4,556,966,842.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	12,819,045,754.00	-	-	-	-	-	-	12,819,045,754.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7,889,834,741.00	-	-	-	-	-	-	7,889,834,741.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3,304,647,397.00	-	-	-	-	-	-	3,304,647,397.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3,187,699,335.00	-	-	-	-	-	-	3,187,699,335.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	5,177,362,598.00	-	-	-	-	-	-	5,177,362,598.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2,398,293,994.00	-	-	-	-	-	-	2,398,293,994.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2,662,789,452.00	-	-	-	-	-	-	2,662,789,452.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2,737,417,989.00	-	-	-	-	-	-	2,737,417,989.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,455,725,481.00	-	-	-	-	-	-	3,455,725,481.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	9,909,680,814.00	-	-	-	-	-	-	9,909,680,814.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	19,103,558,590.00	-	-	-	-	-	-	19,103,558,590.00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	769,571,184.00	-	-	-	-	-	-	769,571,184.00
23	SEKRETARIAT DAERAH	14,459,840,790.00	-	-	-	-	-	-	14,459,840,790.00
24	SEKRETARIAT DPRD	4,421,468,438.00	-	-	-	-	-	-	4,421,468,438.00
25	KECAMATAN REMBANG	5,166,900,081.00	-	-	-	-	-	-	5,166,900,081.00
26	KECAMATAN KALIORI	2,209,761,593.00	-	-	-	-	-	-	2,209,761,593.00
27	KECAMATAN SULANG	1,900,755,942.00	-	-	-	-	-	-	1,900,755,942.00
28	KECAMATAN SUMBER	1,739,782,895.00	-	-	-	-	-	-	1,739,782,895.00
29	KECAMATAN BULU	1,561,120,618.00	-	-	-	-	-	-	1,561,120,618.00
30	KECAMATAN LASEM	2,235,413,707.00	-	-	-	-	-	-	2,235,413,707.00
31	KECAMATAN PANCUR	2,212,385,575.00	-	-	-	-	-	-	2,212,385,575.00
32	KECAMATAN SLUKE	1,510,417,880.00	-	-	-	-	-	-	1,510,417,880.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	1,728,211,016.00	-	-	-	-	-	-	1,728,211,016.00
34	KECAMATAN GUNEM	1,538,294,491.00	-	-	-	-	-	-	1,538,294,491.00
35	KECAMATAN SALE	1,629,643,617.00	-	-	-	-	-	-	1,629,643,617.00
36	KECAMATAN KRAGAN	2,094,377,049.00	-	-	-	-	-	-	2,094,377,049.00
37	KECAMATAN SEDAN	1,998,566,572.00	-	-	-	-	-	-	1,998,566,572.00
38	KECAMATAN SARANG	2,275,251,056.00	-	-	-	-	-	-	2,275,251,056.00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	3,876,969,310.00	-	-	-	-	-	-	3,876,969,310.00
40	BAPPEDA	3,634,257,643.00	-	-	-	-	-	-	3,634,257,643.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	16,080,874,097.00	-	55,764,388,000.00	8,333,700,000.00	10,765,819,900.00	339,575,532,700.00	-	430,520,314,697.00
a	(SKPD)	16,080,874,097.00	-	-	-	-	-	-	16,080,874,097.00
b	(PPKD)	-	-	55,764,388,000.00	8,333,700,000.00	10,765,819,900.00	339,575,532,700.00	-	414,439,440,600.00
42	BKD	4,023,734,102.00	-	-	-	-	-	-	4,023,734,102.00
	JUMLAH	649,572,921,265.16	-	55,764,388,000.00	8,333,700,000.00	10,765,819,900.00	339,575,532,700.00	-	1,064,012,361,865.16

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	ORGANISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)							JUMLAH
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	
1	2	19=11-3	20=12-4	21=13-5	22=14-6	23=15-7	24=16-8	25=17-9	26= 19+20+21+22+23+24+25
1	DINPENDIKPORA	(13,227,204,141.00)	-	-	-	-	-	-	(13,227,204,141.00)
2	DINAS KESEHATAN	(299,326,659.00)	-	-	-	-	-	-	(299,326,659.00)
3	RSUD dr R. SOETRASNO	1,161,842,061.16	-	-	-	-	-	-	1,161,842,061.16
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(203,786,838.00)	-	-	-	-	-	-	(203,786,838.00)
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	(87,719,742.00)	-	-	-	-	-	-	(87,719,742.00)
6	SATPOL PP	(211,542,586.00)	-	-	-	-	-	-	(211,542,586.00)
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	(54,040,323.00)	-	-	-	-	-	-	(54,040,323.00)
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(283,750,918.00)	-	-	-	-	-	-	(283,750,918.00)
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	(158,243,794.00)	-	-	-	-	-	-	(158,243,794.00)
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	(316,605,158.00)	-	-	-	-	-	-	(316,605,158.00)
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	(258,939,246.00)	-	-	-	-	-	-	(258,939,246.00)
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(135,498,259.00)	-	-	-	-	-	-	(135,498,259.00)
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(46,477,603.00)	-	-	-	-	-	-	(46,477,603.00)
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	(86,100,665.00)	-	-	-	-	-	-	(86,100,665.00)
15	DINAS PERHUBUNGAN	(134,989,402.00)	-	-	-	-	-	-	(134,989,402.00)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(54,190,006.00)	-	-	-	-	-	-	(54,190,006.00)
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	(25,254,548.00)	-	-	-	-	-	-	(25,254,548.00)
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	(67,181,011.00)	-	-	-	-	-	-	(67,181,011.00)
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(134,066,519.00)	-	-	-	-	-	-	(134,066,519.00)
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	(380,474,186.00)	-	-	-	-	-	-	(380,474,186.00)
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	(395,999,410.00)	-	-	-	-	-	-	(395,999,410.00)
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	(601,816.00)	-	-	-	-	-	-	(601,816.00)
23	SEKRETARIAT DAERAH	(260,742,210.00)	-	-	-	-	-	-	(260,742,210.00)
24	SEKRETARIAT DPRD	(61,582,562.00)	-	-	-	-	-	-	(61,582,562.00)
25	KECAMATAN REMBANG	(237,065,919.00)	-	-	-	-	-	-	(237,065,919.00)
26	KECAMATAN KALIORI	(121,527,407.00)	-	-	-	-	-	-	(121,527,407.00)
27	KECAMATAN SULANG	(98,576,058.00)	-	-	-	-	-	-	(98,576,058.00)
28	KECAMATAN SUMBER	(106,095,105.00)	-	-	-	-	-	-	(106,095,105.00)
29	KECAMATAN BULU	(127,638,382.00)	-	-	-	-	-	-	(127,638,382.00)
30	KECAMATAN LASEM	(32,347,293.00)	-	-	-	-	-	-	(32,347,293.00)
31	KECAMATAN PANCUR	(228,266,425.00)	-	-	-	-	-	-	(228,266,425.00)
32	KECAMATAN SLUKE	(43,517,120.00)	-	-	-	-	-	-	(43,517,120.00)
33	KECAMATAN PAMOTAN	(67,789,984.00)	-	-	-	-	-	-	(67,789,984.00)
34	KECAMATAN GUNEM	(83,620,509.00)	-	-	-	-	-	-	(83,620,509.00)
35	KECAMATAN SALE	(112,206,383.00)	-	-	-	-	-	-	(112,206,383.00)
36	KECAMATAN KRAGAN	(77,619,951.00)	-	-	-	-	-	-	(77,619,951.00)
37	KECAMATAN SEDAN	(43,773,428.00)	-	-	-	-	-	-	(43,773,428.00)
38	KECAMATAN SARANG	(69,433,944.00)	-	-	-	-	-	-	(69,433,944.00)
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	(205,406,690.00)	-	-	-	-	-	-	(205,406,690.00)
40	BAPPEDA	(659,186,357.00)	-	-	-	-	-	-	(659,186,357.00)
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(708,591,767.75)	(1,451,355,415.00)	(6,022,812,000.00)	(646,300,000.00)	-	(467,195,000.00)	(500,000,000.00)	(9,796,254,182.75)
a	(SKPD)	(708,591,767.75)	-	-	-	-	-	-	(708,591,767.75)
b	(PPKD)	-	(1,451,355,415.00)	(6,022,812,000.00)	(646,300,000.00)	-	(467,195,000.00)	(500,000,000.00)	(9,087,662,415.00)
42	BKD	(35,982,898.00)	-	-	-	-	-	-	(35,982,898.00)
	JUMLAH	(18,781,121,161.59)	(1,451,355,415.00)	(6,022,812,000.00)	(646,300,000.00)	-	(467,195,000.00)	(500,000,000.00)	(27,868,783,576.59)

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	ORGANISASI	%							JUMLAH
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34
1	DINPENDIKPORA	96.74							96.74
2	DINAS KESEHATAN	99.38							99.38
3	RSUD dr R. SOETRASNO	104.52							104.52
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	97.59							97.59
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-							-
6	SATPOL PP	96.56							96.56
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.28							95.28
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	90.85							90.85
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	96.81							96.81
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	93.50							93.50
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	98.02							98.02
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	98.31							98.31
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	98.61							98.61
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	97.37							97.37
15	DINAS PERHUBUNGAN	97.46							97.46
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-							-
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	99.06							99.06
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	97.60							97.60
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	96.27							96.27
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	96.30							96.30
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	97.97							97.97
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	99.92							99.92
23	SEKRETARIAT DAERAH	98.23							98.23
24	SEKRETARIAT DPRD	98.63							98.63
25	KECAMATAN REMBANG	95.61							95.61
26	KECAMATAN KALIORI	94.79							94.79
27	KECAMATAN SULANG	95.07							95.07
28	KECAMATAN SUMBER	94.25							94.25
29	KECAMATAN BULU	92.44							92.44
30	KECAMATAN LASEM	98.57							98.57
31	KECAMATAN PANCUR	90.65							90.65
32	KECAMATAN SLUKE	97.20							97.20
33	KECAMATAN PAMOTAN	96.23							96.23
34	KECAMATAN GUNEM	94.84							94.84
35	KECAMATAN SALE	93.56							93.56
36	KECAMATAN KRAGAN	96.43							96.43
37	KECAMATAN SEDAN	97.86							97.86
38	KECAMATAN SARANG	97.04							97.04
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	94.97							94.97
40	BAPPEDA	84.65							84.65
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	95.78							95.78
a	(SKPD)	95.78							95.78
b	(PPKD)	-		90.25	92.80	100.00	99.86	-	97.85
42	BKD	99.11							99.11
	JUMLAH	97.19	-	90.25	92.80	100.00	99.86	-	97.45

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGS

NO.	ORGANISASI	PEMBAHASAN MENJADI							JUMLAH
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42= 35+36+37+38+39+41
1	DINPENDIKPORA	392,819,209,421.00	-	-	-	-	-	-	392,819,209,421.00
2	DINAS KESEHATAN	48,106,407,341.00	-	-	-	-	-	-	48,106,407,341.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	26,842,330,061.16	-	-	-	-	-	-	26,842,330,061.16
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8,251,626,162.00	-	-	-	-	-	-	8,251,626,162.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4,634,001,258.00	-	-	-	-	-	-	4,634,001,258.00
6	SATPOL PP	5,936,219,414.00	-	-	-	-	-	-	5,936,219,414.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1,091,840,677.00	-	-	-	-	-	-	1,091,840,677.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,816,981,082.00	-	-	-	-	-	-	2,816,981,082.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	4,803,685,206.00	-	-	-	-	-	-	4,803,685,206.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	4,556,966,842.00	-	-	-	-	-	-	4,556,966,842.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	12,819,045,754.00	-	-	-	-	-	-	12,819,045,754.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7,889,834,741.00	-	-	-	-	-	-	7,889,834,741.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3,304,647,397.00	-	-	-	-	-	-	3,304,647,397.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3,187,699,335.00	-	-	-	-	-	-	3,187,699,335.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	5,177,362,598.00	-	-	-	-	-	-	5,177,362,598.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2,398,293,994.00	-	-	-	-	-	-	2,398,293,994.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2,662,789,452.00	-	-	-	-	-	-	2,662,789,452.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2,737,417,989.00	-	-	-	-	-	-	2,737,417,989.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,455,725,481.00	-	-	-	-	-	-	3,455,725,481.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	9,909,680,814.00	-	-	-	-	-	-	9,909,680,814.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	19,103,558,590.00	-	-	-	-	-	-	19,103,558,590.00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	769,571,184.00	-	-	-	-	-	-	769,571,184.00
23	SEKRETARIAT DAERAH	14,459,840,790.00	-	-	-	-	-	-	14,459,840,790.00
24	SEKRETARIAT DPRD	4,421,468,438.00	-	-	-	-	-	-	4,421,468,438.00
25	KECAMATAN REMBANG	5,166,900,081.00	-	-	-	-	-	-	5,166,900,081.00
26	KECAMATAN KALIORI	2,209,761,593.00	-	-	-	-	-	-	2,209,761,593.00
27	KECAMATAN SULANG	1,900,755,942.00	-	-	-	-	-	-	1,900,755,942.00
28	KECAMATAN SUMBER	1,739,782,895.00	-	-	-	-	-	-	1,739,782,895.00
29	KECAMATAN BULU	1,561,120,618.00	-	-	-	-	-	-	1,561,120,618.00
30	KECAMATAN LASEM	2,235,413,707.00	-	-	-	-	-	-	2,235,413,707.00
31	KECAMATAN PANCUR	2,212,385,575.00	-	-	-	-	-	-	2,212,385,575.00
32	KECAMATAN SLUKE	1,510,417,880.00	-	-	-	-	-	-	1,510,417,880.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	1,728,211,016.00	-	-	-	-	-	-	1,728,211,016.00
34	KECAMATAN GUNEM	1,538,294,491.00	-	-	-	-	-	-	1,538,294,491.00
35	KECAMATAN SALE	1,629,643,617.00	-	-	-	-	-	-	1,629,643,617.00
36	KECAMATAN KRAGAN	2,094,377,049.00	-	-	-	-	-	-	2,094,377,049.00
37	KECAMATAN SEDAN	1,998,566,572.00	-	-	-	-	-	-	1,998,566,572.00
38	KECAMATAN SARANG	2,275,251,056.00	-	-	-	-	-	-	2,275,251,056.00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	3,876,969,310.00	-	-	-	-	-	-	3,876,969,310.00
40	BAPPEDA	3,634,257,643.00	-	-	-	-	-	-	3,634,257,643.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	16,080,874,097.00	-	55,764,388,000.00	8,333,700,000.00	10,765,819,900.00	339,575,532,700.00	-	430,520,314,697.00
a	(SKPD)	16,080,874,097.00	-	-	-	-	-	-	16,080,874,097.00
b	(PPKD)	-	-	55,764,388,000.00	8,333,700,000.00	10,765,819,900.00	339,575,532,700.00	-	414,439,440,600.00
42	BKD	4,023,734,102.00	-	-	-	-	-	-	4,023,734,102.00
	JUMLAH	649,572,921,265.16	-	55,764,388,000.00	8,333,700,000.00	10,765,819,900.00	339,575,532,700.00	-	1,064,012,361,865.16

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	ORGANISASI	PEMBAHASAN								
		BERTAMBAH/ (BERKURANG)								
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	JUMLAH	
1	2	43=35-3	44=36-4	45=37-5	46=38-6	47=39-7	48=40-8	49=41-9	50=	
1	DINPENDIKPORA	(13,227,204,141.00)	-	-	-	-	-	-	-	(13,227,204,141.00)
2	DINAS KESEHATAN	(299,326,659.00)	-	-	-	-	-	-	-	(299,326,659.00)
3	RSUD dr R. SOETRASNO	1,161,842,061.16	-	-	-	-	-	-	-	1,161,842,061.16
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(203,786,838.00)	-	-	-	-	-	-	-	(203,786,838.00)
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	(87,719,742.00)	-	-	-	-	-	-	-	(87,719,742.00)
6	SATPOL PP	(211,542,586.00)	-	-	-	-	-	-	-	(211,542,586.00)
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	(54,040,323.00)	-	-	-	-	-	-	-	(54,040,323.00)
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(283,750,918.00)	-	-	-	-	-	-	-	(283,750,918.00)
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	(158,243,794.00)	-	-	-	-	-	-	-	(158,243,794.00)
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	(316,605,158.00)	-	-	-	-	-	-	-	(316,605,158.00)
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	(258,939,246.00)	-	-	-	-	-	-	-	(258,939,246.00)
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(135,498,259.00)	-	-	-	-	-	-	-	(135,498,259.00)
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(46,477,603.00)	-	-	-	-	-	-	-	(46,477,603.00)
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	(86,100,665.00)	-	-	-	-	-	-	-	(86,100,665.00)
15	DINAS PERHUBUNGAN	(134,989,402.00)	-	-	-	-	-	-	-	(134,989,402.00)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(54,190,006.00)	-	-	-	-	-	-	-	(54,190,006.00)
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	(25,254,548.00)	-	-	-	-	-	-	-	(25,254,548.00)
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	(67,181,011.00)	-	-	-	-	-	-	-	(67,181,011.00)
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(134,066,519.00)	-	-	-	-	-	-	-	(134,066,519.00)
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	(380,474,186.00)	-	-	-	-	-	-	-	(380,474,186.00)
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	(395,999,410.00)	-	-	-	-	-	-	-	(395,999,410.00)
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	(601,816.00)	-	-	-	-	-	-	-	(601,816.00)
23	SEKRETARIAT DAERAH	(260,742,210.00)	-	-	-	-	-	-	-	(260,742,210.00)
24	SEKRETARIAT DPRD	(61,582,562.00)	-	-	-	-	-	-	-	(61,582,562.00)
25	KECAMATAN REMBANG	(237,065,919.00)	-	-	-	-	-	-	-	(237,065,919.00)
26	KECAMATAN KALIORI	(121,527,407.00)	-	-	-	-	-	-	-	(121,527,407.00)
27	KECAMATAN SULANG	(98,576,058.00)	-	-	-	-	-	-	-	(98,576,058.00)
28	KECAMATAN SUMBER	(106,095,105.00)	-	-	-	-	-	-	-	(106,095,105.00)
29	KECAMATAN BULU	(127,638,382.00)	-	-	-	-	-	-	-	(127,638,382.00)
30	KECAMATAN LASEM	(32,347,293.00)	-	-	-	-	-	-	-	(32,347,293.00)
31	KECAMATAN PANCUR	(228,266,425.00)	-	-	-	-	-	-	-	(228,266,425.00)
32	KECAMATAN SLUKE	(43,517,120.00)	-	-	-	-	-	-	-	(43,517,120.00)
33	KECAMATAN PAMOTAN	(67,789,984.00)	-	-	-	-	-	-	-	(67,789,984.00)
34	KECAMATAN GUNEM	(83,620,509.00)	-	-	-	-	-	-	-	(83,620,509.00)
35	KECAMATAN SALE	(112,206,383.00)	-	-	-	-	-	-	-	(112,206,383.00)
36	KECAMATAN KRAGAN	(77,619,951.00)	-	-	-	-	-	-	-	(77,619,951.00)
37	KECAMATAN SEDAN	(43,773,428.00)	-	-	-	-	-	-	-	(43,773,428.00)
38	KECAMATAN SARANG	(69,433,944.00)	-	-	-	-	-	-	-	(69,433,944.00)
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	(205,406,690.00)	-	-	-	-	-	-	-	(205,406,690.00)
40	BAPPEDA	(659,186,357.00)	-	-	-	-	-	-	-	(659,186,357.00)
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(708,591,767.75)	(1,451,355,415.00)	(6,022,812,000.00)	(646,300,000.00)	-	(467,195,000.00)	(500,000,000.00)	(9,796,254,182.75)	
a	(SKPD)	(708,591,767.75)	-	-	-	-	-	-	(708,591,767.75)	
b	(PPKD)	-	(1,451,355,415.00)	(6,022,812,000.00)	(646,300,000.00)	-	(467,195,000.00)	(500,000,000.00)	(9,087,662,415.00)	
42	BKD	(35,982,898.00)	-	-	-	-	-	-	(35,982,898.00)	
	JUMLAH	(18,781,121,161.59)	(1,451,355,415.00)	(6,022,812,000.00)	(646,300,000.00)	-	(467,195,000.00)	(500,000,000.00)	(27,868,783,576.59)	

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	ORGANISASI	%							JUMLAH
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bagi Hasil Kepada Kepala Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58
1	DINPENDIKPORA	96.74							96.74
2	DINAS KESEHATAN	99.38							99.38
3	RSUD dr R. SOETRASNO	104.52							104.52
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	97.59							97.59
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-							-
6	SATPOL PP	96.56							96.56
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.28							95.28
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	90.85							90.85
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	96.81							96.81
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	93.50							93.50
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	98.02							98.02
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	98.31							98.31
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	98.61							98.61
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	97.37							97.37
15	DINAS PERHUBUNGAN	97.46							97.46
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-							-
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	99.06							99.06
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	97.60							97.60
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	96.27							96.27
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	96.30							96.30
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	97.97							97.97
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	99.92							99.92
23	SEKRETARIAT DAERAH	98.23							98.23
24	SEKRETARIAT DPRD	98.63							98.63
25	KECAMATAN REMBANG	95.61							95.61
26	KECAMATAN KALIORI	94.79							94.79
27	KECAMATAN SULANG	95.07							95.07
28	KECAMATAN SUMBER	94.25							94.25
29	KECAMATAN BULU	92.44							92.44
30	KECAMATAN LASEM	98.57							98.57
31	KECAMATAN PANCUR	90.65							90.65
32	KECAMATAN SLUKE	97.20							97.20
33	KECAMATAN PAMOTAN	96.23							96.23
34	KECAMATAN GUNEM	94.84							94.84
35	KECAMATAN SALE	93.56							93.56
36	KECAMATAN KRAGAN	96.43							96.43
37	KECAMATAN SEDAN	97.86							97.86
38	KECAMATAN SARANG	97.04							97.04
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	94.97							94.97
40	BAPPEDA	84.65							84.65
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	95.78	-	90.25	92.80	100.00	99.86	-	97.78
a	(SKPD)	95.78	-	-	-	-	-	-	95.78
b	(PPKD)	-	-	90.25	92.80	100.00	99.86	-	97.85
42	BKD	99.11							99.11
	JUMLAH	97.19	-	90.25	92.80	100.00	99.86	-	97.45

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	DINPENDIKPORA	39,986,835,500.00	48,339,444,640.00	63,807,729,695.00	152,134,009,835.00
2	DINAS KESEHATAN	29,063,354,565.00	39,059,172,455.00	23,551,673,113.00	91,674,200,133.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	46,480,701,000.00	44,868,700,648.25	35,268,398,000.00	126,617,799,648.25
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3,038,583,000.00	2,891,750,300.00	147,438,138,154.00	153,368,471,454.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1,384,487,000.00	3,558,095,465.00	13,997,978,175.00	18,940,560,640.00
6	SATPOL PP	2,187,924,000.00	1,583,904,000.00	929,498,000.00	4,701,326,000.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1,120,008,000.00	595,640,000.00		1,715,648,000.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	705,830,000.00	2,003,670,000.00	776,500,000.00	3,486,000,000.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	2,948,642,000.00	10,105,438,600.00	750,149,000.00	13,804,229,600.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	829,410,000.00	1,988,935,000.00	66,655,000.00	2,885,000,000.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1,636,511,000.00	35,545,882,000.00	1,346,240,000.00	38,528,643,000.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1,786,510,000.00	3,430,472,942.00	7,124,269,058.00	12,341,252,000.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1,820,471,000.00	1,802,220,000.00	106,900,000.00	3,729,591,000.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	635,010,000.00	3,791,375,000.00	58,590,000.00	4,484,975,000.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	1,554,966,000.00	11,018,217,316.00	8,312,864,000.00	20,886,047,316.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	678,660,000.00	1,332,180,000.00	401,160,000.00	2,412,000,000.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	892,485,000.00	2,937,995,000.00	1,591,786,000.00	5,422,266,000.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	425,530,000.00	1,416,239,000.00	307,231,000.00	2,149,000,000.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,857,578,000.00	2,929,690,000.00	17,857,431,000.00	24,644,699,000.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	1,788,465,000.00	3,053,878,000.00	19,238,178,550.00	24,080,521,550.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
23	SEKRETARIAT DAERAH	18,936,574,000.00	17,279,341,000.00	2,199,925,000.00	38,415,840,000.00
24	SEKRETARIAT DPRD	1,018,883,000.00	29,674,450,000.00	885,484,000.00	31,578,817,000.00
25	KECAMATAN REMBANG	1,020,005,000.00	861,505,000.00	1,810,540,000.00	3,692,050,000.00
26	KECAMATAN KALIORI	200,432,000.00	257,026,000.00	9,000,000.00	466,458,000.00
27	KECAMATAN SULANG	256,660,000.00	350,556,000.00	205,000,000.00	812,216,000.00
28	KECAMATAN SUMBER	142,330,000.00	336,670,000.00	194,000,000.00	673,000,000.00
29	KECAMATAN BULU	259,340,000.00	198,520,000.00	22,200,000.00	480,060,000.00
30	KECAMATAN LASEM	191,462,000.00	312,150,000.00	125,000,000.00	628,612,000.00
31	KECAMATAN PANCUR	196,811,000.00	270,417,000.00	22,000,000.00	489,228,000.00
32	KECAMATAN SLUKE	230,435,000.00	254,165,000.00	28,000,000.00	512,600,000.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	234,705,000.00	222,495,000.00	432,800,000.00	890,000,000.00
34	KECAMATAN GUNEM	167,730,000.00	243,770,000.00	77,800,000.00	489,300,000.00
35	KECAMATAN SALE	263,370,000.00	260,230,000.00	121,500,000.00	645,100,000.00
36	KECAMATAN KRAGAN	202,669,000.00	422,275,000.00	190,450,000.00	815,394,000.00
37	KECAMATAN SEDAN	324,340,000.00	181,885,000.00	48,700,000.00	554,925,000.00
38	KECAMATAN SARANG	188,240,000.00	238,460,000.00	293,000,000.00	719,700,000.00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	4,555,680,000.00	2,288,128,000.00	235,020,000.00	7,078,828,000.00
40	BAPPEDA	1,419,271,000.00	3,269,256,000.00	167,145,000.00	4,855,672,000.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5,270,197,000.00	6,870,050,000.00	671,327,000.00	12,811,574,000.00
a	(SKPD)	5,270,197,000.00	6,870,050,000.00	671,327,000.00	12,811,574,000.00
b	(PPKD)				
42	BKD	1,703,890,000.00	3,850,110,000.00	50,000,000.00	5,604,000,000.00
	JUMLAH	179,604,985,065.00	289,894,369,366.25	350,720,259,745.00	820,219,614,176.25

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	REALISASI			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	7	8	9	10=7+8+9
1	DINPENDIKPORA	39,546,130,938.00	45,551,609,144.00	59,233,678,104.00	144,331,418,186.00
2	DINAS KESEHATAN	27,225,182,558.00	34,546,058,866.00	21,578,422,895.00	83,349,664,319.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	48,437,608,811.00	39,925,873,096.20	22,434,543,756.00	110,798,025,663.20
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2,795,582,500.00	2,520,701,332.00	135,732,003,753.00	141,048,287,585.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1,272,915,400.00	2,764,390,417.00	11,868,162,870.00	15,905,468,687.00
6	SATPOL PP	2,143,974,000.00	1,523,478,778.00	900,607,760.00	4,568,060,538.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1,114,040,000.00	584,263,566.00		1,698,303,566.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	691,730,000.00	1,904,982,300.00	758,182,000.00	3,354,894,300.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	2,868,384,000.00	8,479,931,560.00	732,709,370.00	12,081,024,930.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	821,910,000.00	1,912,973,823.00	61,905,500.00	2,796,789,323.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1,603,726,000.00	33,215,996,791.00	1,290,503,400.00	36,110,226,191.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1,745,810,000.00	3,390,153,162.00	6,818,614,488.00	11,954,577,650.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1,759,161,000.00	1,767,040,281.00	106,800,000.00	3,633,001,281.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	633,810,000.00	3,763,902,018.00	57,450,100.00	4,455,162,118.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	1,528,131,000.00	10,951,533,819.00	8,287,762,000.00	20,767,426,819.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	670,980,000.00	1,300,868,194.00	393,668,240.00	2,365,516,434.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	878,211,000.00	2,871,216,029.00	1,093,859,230.00	4,843,286,259.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	418,330,000.00	1,398,424,148.00	306,332,100.00	2,123,086,248.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,843,083,000.00	2,844,849,513.00	12,155,403,954.00	18,843,336,467.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	1,747,491,000.00	2,954,897,846.00	18,288,149,589.00	22,990,538,435.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
23	SEKRETARIAT DAERAH	18,542,210,000.00	16,559,731,957.00	2,091,852,407.00	37,193,794,364.00
24	SEKRETARIAT DPRD	902,433,000.00	24,008,033,104.00	854,956,860.00	25,765,422,964.00
25	KECAMATAN REMBANG	973,575,000.00	782,615,200.00	1,709,520,359.00	3,465,710,559.00
26	KECAMATAN KALIORI	198,932,000.00	254,103,152.00	8,902,000.00	461,937,152.00
27	KECAMATAN SULANG	254,410,000.00	343,000,000.00	203,397,000.00	800,807,000.00
28	KECAMATAN SUMBER	139,680,000.00	336,520,000.00	190,658,070.00	666,858,070.00
29	KECAMATAN BULU	258,590,000.00	193,503,700.00	22,200,000.00	474,293,700.00
30	KECAMATAN LASEM	188,878,000.00	279,521,958.00	119,666,000.00	588,065,958.00
31	KECAMATAN PANCUR	196,041,000.00	265,656,151.00	21,985,600.00	483,682,751.00
32	KECAMATAN SLUKE	228,835,000.00	251,999,311.00	27,774,000.00	508,608,311.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	214,150,000.00	211,000,000.00	415,200,000.00	840,350,000.00
34	KECAMATAN GUNEM	161,422,500.00	243,034,441.00	77,800,000.00	482,256,941.00
35	KECAMATAN SALE	241,620,000.00	239,350,000.00	31,150,000.00	512,120,000.00
36	KECAMATAN KRAGAN	193,913,000.00	417,568,000.00	189,400,000.00	800,881,000.00
37	KECAMATAN SEDAN	314,840,000.00	171,314,500.00	48,450,000.00	534,604,500.00
38	KECAMATAN SARANG	188,040,000.00	233,480,779.00	291,532,000.00	713,052,779.00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	4,535,110,000.00	2,077,629,970.00	222,405,500.00	6,835,145,470.00
40	BAPPEDA	1,414,623,000.00	3,253,563,662.00	167,041,880.00	4,835,228,542.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5,012,699,000.00	6,097,828,223.00	608,356,210.00	11,718,883,433.00
a	(SKPD)	5,012,699,000.00	6,097,828,223.00	608,356,210.00	11,718,883,433.00
b	(PPKD)				-
42	BKD	1,657,565,000.00	3,245,037,956.00	47,498,900.00	4,950,101,856.00
	JUMLAH	177,563,757,707.00	263,637,636,747.20	309,448,505,895.00	750,649,900,349.20

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
		(Rp)			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	11=7-3	12=8-4	13=9-5	14=11+12+13
1	DINPENDIKPORA	(440,704,562.00)	(2,787,835,496.00)	(4,574,051,591.00)	(7,802,591,649.00)
2	DINAS KESEHATAN	(1,838,172,007.00)	(4,513,113,589.00)	(1,973,250,218.00)	(8,324,535,814.00)
3	RSUD dr R. SOETRASNO	1,956,907,811.00	(4,942,827,552.05)	(12,833,854,244.00)	(15,819,773,985.05)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(243,000,500.00)	(371,048,968.00)	(11,706,134,401.00)	(12,320,183,869.00)
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	(111,571,600.00)	(793,705,048.00)	(2,129,815,305.00)	(3,035,091,953.00)
6	SATPOL PP	(43,950,000.00)	(60,425,222.00)	(28,890,240.00)	(133,265,462.00)
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	(5,968,000.00)	(11,376,434.00)	-	(17,344,434.00)
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(14,100,000.00)	(98,687,700.00)	(18,318,000.00)	(131,105,700.00)
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	(80,258,000.00)	(1,625,507,040.00)	(17,439,630.00)	(1,723,204,670.00)
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	(7,500,000.00)	(75,961,177.00)	(4,749,500.00)	(88,210,677.00)
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	(32,785,000.00)	(2,329,896,209.00)	(55,736,600.00)	(2,418,416,809.00)
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(40,700,000.00)	(40,319,780.00)	(305,654,570.00)	(386,674,350.00)
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(61,310,000.00)	(35,179,719.00)	(100,000.00)	(96,589,719.00)
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	(1,200,000.00)	(27,472,982.00)	(1,139,900.00)	(29,812,882.00)
15	DINAS PERHUBUNGAN	(26,835,000.00)	(66,683,497.00)	(25,102,000.00)	(118,620,497.00)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(7,680,000.00)	(31,311,806.00)	(7,491,760.00)	(46,483,566.00)
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	(14,274,000.00)	(66,778,971.00)	(497,926,770.00)	(578,979,741.00)
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	(7,200,000.00)	(17,814,852.00)	(898,900.00)	(25,913,752.00)
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(14,495,000.00)	(84,840,487.00)	(5,702,027,046.00)	(5,801,362,533.00)
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	(40,974,000.00)	(98,980,154.00)	(950,028,961.00)	(1,089,983,115.00)
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
23	SEKRETARIAT DAERAH	(394,364,000.00)	(719,609,043.00)	(108,072,593.00)	(1,222,045,636.00)
24	SEKRETARIAT DPRD	(116,450,000.00)	(5,666,416,896.00)	(30,527,140.00)	(5,813,394,036.00)
25	KECAMATAN REMBANG	(46,430,000.00)	(78,889,800.00)	(101,019,641.00)	(226,339,441.00)
26	KECAMATAN KALIORI	(1,500,000.00)	(2,922,848.00)	(98,000.00)	(4,520,848.00)
27	KECAMATAN SULANG	(2,250,000.00)	(7,556,000.00)	(1,603,000.00)	(11,409,000.00)
28	KECAMATAN SUMBER	(2,650,000.00)	(150,000.00)	(3,341,930.00)	(6,141,930.00)
29	KECAMATAN BULU	(750,000.00)	(5,016,300.00)	-	(5,766,300.00)
30	KECAMATAN LASEM	(2,584,000.00)	(32,628,042.00)	(5,334,000.00)	(40,546,042.00)
31	KECAMATAN PANCUR	(770,000.00)	(4,760,849.00)	(14,400.00)	(5,545,249.00)
32	KECAMATAN SLUKE	(1,600,000.00)	(2,165,689.00)	(226,000.00)	(3,991,689.00)
33	KECAMATAN PAMOTAN	(20,555,000.00)	(11,495,000.00)	(17,600,000.00)	(49,650,000.00)
34	KECAMATAN GUNEM	(6,307,500.00)	(735,559.00)	-	(7,043,059.00)
35	KECAMATAN SALE	(21,750,000.00)	(20,880,000.00)	(90,350,000.00)	(132,980,000.00)
36	KECAMATAN KRAGAN	(8,756,000.00)	(4,707,000.00)	(1,050,000.00)	(14,513,000.00)
37	KECAMATAN SEDAN	(9,500,000.00)	(10,570,500.00)	(250,000.00)	(20,320,500.00)
38	KECAMATAN SARANG	(200,000.00)	(4,979,221.00)	(1,468,000.00)	(6,647,221.00)
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	(20,570,000.00)	(210,498,030.00)	(12,614,500.00)	(243,682,530.00)
40	BAPPEDA	(4,648,000.00)	(15,692,338.00)	(103,120.00)	(20,443,458.00)
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(257,498,000.00)	(772,221,777.00)	(62,970,790.00)	(1,092,690,567.00)
a	(SKPD)	(257,498,000.00)	(772,221,777.00)	(62,970,790.00)	(1,092,690,567.00)
b	(PPKD)	-	-	-	-
42	BKD	(46,325,000.00)	(605,072,044.00)	(2,501,100.00)	(653,898,144.00)
	JUMLAH	(2,041,227,358.00)	(26,256,732,619.05)	(41,271,753,850.00)	(69,569,713,827.05)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
		%			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	15	16	17	18
1	DINPENDIKPORA	98.90	94.23	92.83	94.87
2	DINAS KESEHATAN	93.68	88.45	91.62	90.92
3	RSUD dr R. SOETRASNO	104.21	88.98	63.61	87.51
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	92.00	87.17	92.06	91.97
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	91.94	77.69	84.78	83.98
6	SATPOL PP	97.99	96.19	96.89	97.17
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	99.47	98.09		98.99
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	98.00	95.07	97.64	96.24
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	97.28	83.91	97.68	87.52
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	99.10	96.18	92.87	96.94
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	98.00	93.45	95.86	93.72
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	97.72	98.82	95.71	96.87
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	96.63	98.05	99.91	97.41
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	99.81	99.28	98.05	99.34
15	DINAS PERHUBUNGAN	98.27	99.39	99.70	99.43
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	98.87	97.65	98.13	98.07
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	98.40	97.73	68.72	89.32
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	98.31	98.74	99.71	98.79
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	99.62	97.10	68.07	76.46
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	97.71	96.76	95.06	95.47
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
23	SEKRETARIAT DAERAH	97.92	95.84	95.09	96.82
24	SEKRETARIAT DPRD	88.57	80.90	96.55	81.59
25	KECAMATAN REMBANG	95.45	90.84	94.42	93.87
26	KECAMATAN KALIORI	99.25	98.86	98.91	99.03
27	KECAMATAN SULANG	99.12	97.84	99.22	98.60
28	KECAMATAN SUMBER	98.14	99.96	98.28	99.09
29	KECAMATAN BULU	99.71	97.47	100.00	98.80
30	KECAMATAN LASEM	98.65	89.55	95.73	93.55
31	KECAMATAN PANCUR	99.61	98.24	99.93	98.87
32	KECAMATAN SLUKE	99.31	99.15	99.19	99.22
33	KECAMATAN PAMOTAN	91.24	94.83	95.93	94.42
34	KECAMATAN GUNEM	96.24	99.70	100.00	98.56
35	KECAMATAN SALE	91.74	91.98	25.64	79.39
36	KECAMATAN KRAGAN	95.68	98.89	99.45	98.22
37	KECAMATAN SEDAN	97.07	94.19	99.49	96.34
38	KECAMATAN SARANG	99.89	97.91	99.50	99.08
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	99.55	90.80	94.63	96.56
40	BAPPEDA	99.67	99.52	99.94	99.58
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	95.11	88.76	90.62	91.47
a	(SKPD)	95.11	88.76	90.62	91.47
b	(PPKD)	-	-	-	-
42	BKD	97.28	84.28	95.00	88.33
	JUMLAH	98.86	90.94	88.23	91.52

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		MENJADI			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	19	20	21	22=19+20+21
1	DINPENDIKPORA	39,546,130,938.00	45,551,609,144.00	59,233,678,104.00	144,331,418,186.00
2	DINAS KESEHATAN	27,225,182,558.00	34,546,058,866.00	21,578,422,895.00	83,349,664,319.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	48,437,608,811.00	39,925,873,096.20	22,434,543,756.00	110,798,025,663.20
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2,795,582,500.00	2,520,701,332.00	135,732,003,753.00	141,048,287,585.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1,272,915,400.00	2,764,390,417.00	11,868,162,870.00	15,905,468,687.00
6	SATPOL PP	2,143,974,000.00	1,523,478,778.00	900,607,760.00	4,568,060,538.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1,114,040,000.00	584,263,566.00		1,698,303,566.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	691,730,000.00	1,904,982,300.00	758,182,000.00	3,354,894,300.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	2,868,384,000.00	8,479,931,560.00	732,709,370.00	12,081,024,930.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	821,910,000.00	1,912,973,823.00	61,905,500.00	2,796,789,323.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1,603,726,000.00	33,215,996,791.00	1,290,503,400.00	36,110,226,191.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1,745,810,000.00	3,390,153,162.00	6,818,614,488.00	11,954,577,650.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1,759,161,000.00	1,767,040,281.00	106,800,000.00	3,633,001,281.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	633,810,000.00	3,763,902,018.00	57,450,100.00	4,455,162,118.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	1,528,131,000.00	10,951,533,819.00	8,287,762,000.00	20,767,426,819.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	670,980,000.00	1,300,868,194.00	393,668,240.00	2,365,516,434.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	878,211,000.00	2,871,216,029.00	1,093,859,230.00	4,843,286,259.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	418,330,000.00	1,398,424,148.00	306,332,100.00	2,123,086,248.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,843,083,000.00	2,844,849,513.00	12,155,403,954.00	18,843,336,467.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	1,747,491,000.00	2,954,897,846.00	18,288,149,589.00	22,990,538,435.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
23	SEKRETARIAT DAERAH	18,542,210,000.00	16,559,731,957.00	2,091,852,407.00	37,193,794,364.00
24	SEKRETARIAT DPRD	902,433,000.00	24,008,033,104.00	854,956,860.00	25,765,422,964.00
25	KECAMATAN REMBANG	973,575,000.00	782,615,200.00	1,709,520,359.00	3,465,710,559.00
26	KECAMATAN KALIORI	198,932,000.00	254,103,152.00	8,902,000.00	461,937,152.00
27	KECAMATAN SULANG	254,410,000.00	343,000,000.00	203,397,000.00	800,807,000.00
28	KECAMATAN SUMBER	139,680,000.00	336,520,000.00	190,658,070.00	666,858,070.00
29	KECAMATAN BULU	258,590,000.00	193,503,700.00	22,200,000.00	474,293,700.00
30	KECAMATAN LASEM	188,878,000.00	279,521,958.00	119,666,000.00	588,065,958.00
31	KECAMATAN PANCUR	196,041,000.00	265,656,151.00	21,985,600.00	483,682,751.00
32	KECAMATAN SLUKE	228,835,000.00	251,999,311.00	27,774,000.00	508,608,311.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	214,150,000.00	211,000,000.00	415,200,000.00	840,350,000.00
34	KECAMATAN GUNEM	161,422,500.00	243,034,441.00	77,800,000.00	482,256,941.00
35	KECAMATAN SALE	241,620,000.00	239,350,000.00	31,150,000.00	512,120,000.00
36	KECAMATAN KRAGAN	193,913,000.00	417,568,000.00	189,400,000.00	800,881,000.00
37	KECAMATAN SEDAN	314,840,000.00	171,314,500.00	48,450,000.00	534,604,500.00
38	KECAMATAN SARANG	188,040,000.00	233,480,779.00	291,532,000.00	713,052,779.00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	4,535,110,000.00	2,077,629,970.00	222,405,500.00	6,835,145,470.00
40	BAPPEDA	1,414,623,000.00	3,253,563,662.00	167,041,880.00	4,835,228,542.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5,012,699,000.00	6,097,828,223.00	608,356,210.00	11,718,883,433.00
a	(SKPD)	5,012,699,000.00	6,097,828,223.00	608,356,210.00	11,718,883,433.00
b	(PPKD)				-
42	BKD	1,657,565,000.00	3,245,037,956.00	47,498,900.00	4,950,101,856.00
	JUMLAH	177,563,757,707.00	263,637,636,747.20	309,448,505,895.00	750,649,900,349.20

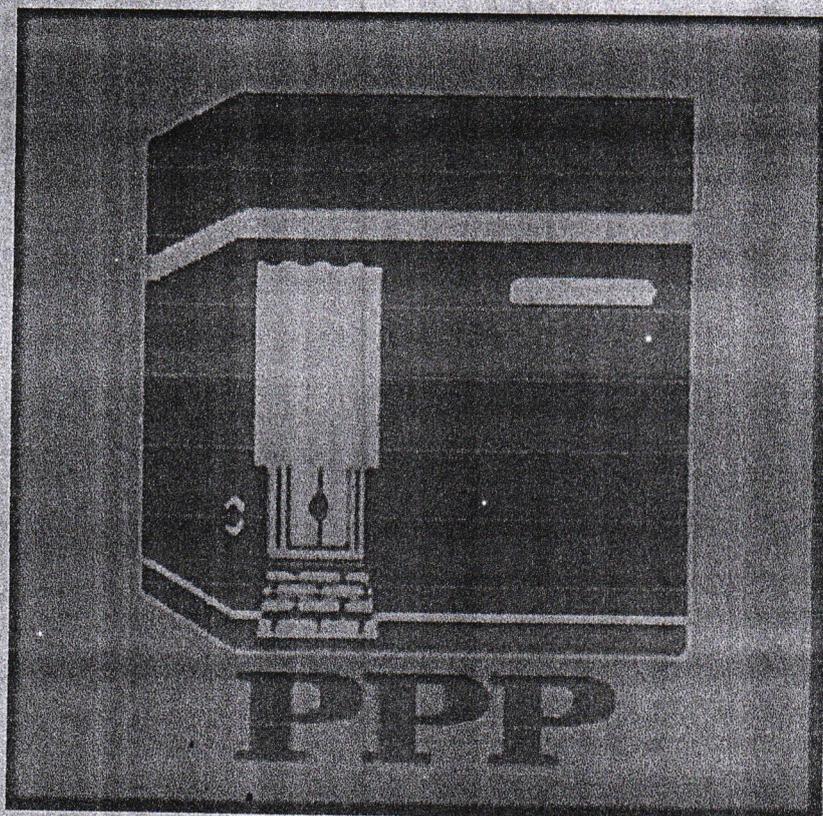
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	23=19-3	24=20-4	25=21-5	26=23+24+25
1	DINPENDIKPORA	(440,704,562.00)	(2,787,835,496.00)	(4,574,051,591.00)	(7,802,591,649.00)
2	DINAS KESEHATAN	(1,838,172,007.00)	(4,513,113,589.00)	(1,973,250,218.00)	(8,324,535,814.00)
3	RSUD dr R. SOETRASNO	1,956,907,811.00	(4,942,827,552.05)	(12,833,854,244.00)	(15,819,773,985.05)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(243,000,500.00)	(371,048,968.00)	(11,706,134,401.00)	(12,320,183,869.00)
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	(111,571,600.00)	(793,705,048.00)	(2,129,815,305.00)	(3,035,091,953.00)
6	SATPOL PP	(43,950,000.00)	(60,425,222.00)	(28,890,240.00)	(133,265,462.00)
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	(5,968,000.00)	(11,376,434.00)	-	(17,344,434.00)
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(14,100,000.00)	(98,687,700.00)	(18,318,000.00)	(131,105,700.00)
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	(80,258,000.00)	(1,625,507,040.00)	(17,439,630.00)	(1,723,204,670.00)
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	(7,500,000.00)	(75,961,177.00)	(4,749,500.00)	(88,210,677.00)
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	(32,785,000.00)	(2,329,805,209.00)	(55,736,600.00)	(2,418,416,809.00)
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(40,700,000.00)	(40,319,780.00)	(305,654,570.00)	(386,674,350.00)
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(61,310,000.00)	(35,179,719.00)	(100,000.00)	(96,589,719.00)
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	(1,200,000.00)	(27,472,982.00)	(1,139,900.00)	(29,812,882.00)
15	DINAS PERHUBUNGAN	(26,835,000.00)	(66,683,497.00)	(25,102,000.00)	(118,620,497.00)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(7,680,000.00)	(31,311,806.00)	(7,491,760.00)	(46,483,566.00)
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	(14,274,000.00)	(66,778,971.00)	(497,926,770.00)	(578,979,741.00)
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	(7,200,000.00)	(17,814,852.00)	(898,900.00)	(25,913,752.00)
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(14,495,000.00)	(84,840,487.00)	(5,702,027,046.00)	(5,801,362,533.00)
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	(40,974,000.00)	(98,980,154.00)	(950,028,961.00)	(1,089,983,115.00)
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
23	SEKRETARIAT DAERAH	(394,364,000.00)	(719,609,043.00)	(108,072,593.00)	(1,222,045,636.00)
24	SEKRETARIAT DPRD	(116,450,000.00)	(5,666,416,896.00)	(30,527,140.00)	(5,813,394,036.00)
25	KECAMATAN REMBANG	(46,430,000.00)	(78,889,800.00)	(101,019,641.00)	(226,339,441.00)
26	KECAMATAN KALIORI	(1,500,000.00)	(2,922,848.00)	(98,000.00)	(4,520,848.00)
27	KECAMATAN SULANG	(2,250,000.00)	(7,556,000.00)	(1,603,000.00)	(11,409,000.00)
28	KECAMATAN SUMBER	(2,650,000.00)	(150,000.00)	(3,341,930.00)	(6,141,930.00)
29	KECAMATAN BULU	(750,000.00)	(5,016,300.00)	-	(5,766,300.00)
30	KECAMATAN LASEM	(2,584,000.00)	(32,628,042.00)	(5,334,000.00)	(40,546,042.00)
31	KECAMATAN PANCUR	(770,000.00)	(4,760,849.00)	(14,400.00)	(5,545,249.00)
32	KECAMATAN SLUKE	(1,600,000.00)	(2,165,689.00)	(226,000.00)	(3,991,689.00)
33	KECAMATAN PAMOTAN	(20,555,000.00)	(11,495,000.00)	(17,600,000.00)	(49,650,000.00)
34	KECAMATAN GUNEM	(6,307,500.00)	(735,559.00)	-	(7,043,059.00)
35	KECAMATAN SALE	(21,750,000.00)	(20,880,000.00)	(90,350,000.00)	(132,980,000.00)
36	KECAMATAN KRAGAN	(8,756,000.00)	(4,707,000.00)	(1,050,000.00)	(14,513,000.00)
37	KECAMATAN SEDAN	(9,500,000.00)	(10,570,500.00)	(250,000.00)	(20,320,500.00)
38	KECAMATAN SARANG	(200,000.00)	(4,979,221.00)	(1,468,000.00)	(6,647,221.00)
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	(20,570,000.00)	(210,498,030.00)	(12,614,500.00)	(243,682,530.00)
40	BAPPEDA	(4,648,000.00)	(15,692,338.00)	(103,120.00)	(20,443,458.00)
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(257,498,000.00)	(772,221,777.00)	(62,970,790.00)	(1,092,690,567.00)
a	(SKPD)	(257,498,000.00)	(772,221,777.00)	(62,970,790.00)	(1,092,690,567.00)
b	(PPKD)	-	-	-	-
42	BKD	(46,325,000.00)	(605,072,044.00)	(2,501,100.00)	(653,898,144.00)
	JUMLAH	(2,041,227,358.00)	(26,256,732,619.05)	(41,271,753,850.00)	(69,569,713,827.05)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		%			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	27	28	29	30
1	DINPENDIKPORA	98.90	94.23	92.83	94.87
2	DINAS KESEHATAN	93.68	88.45	91.62	90.92
3	RSUD dr R. SOETRASNO	104.21	88.98	63.61	87.51
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	92.00	87.17	92.06	91.97
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	91.94	77.69	84.78	83.98
6	SATPOL PP	97.99	96.19	96.89	97.17
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	99.47	98.09		98.99
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	98.00	95.07	97.64	96.24
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	97.28	83.91	97.68	87.52
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	99.10	96.18	92.87	96.94
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	98.00	93.45	95.86	93.72
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	97.72	98.82	95.71	96.87
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	96.63	98.05	99.91	97.41
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	99.81	99.28	98.05	99.34
15	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	98.40	97.73	68.72	89.32
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	98.31	98.74	99.71	98.79
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	99.62	97.10	68.07	76.46
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	97.71	96.76	95.06	95.47
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
23	SEKRETARIAT DAERAH	97.92	95.84	95.09	96.82
24	SEKRETARIAT DPRD	88.57	80.90	96.55	81.59
25	KECAMATAN REMBANG	95.45	90.84	94.42	93.87
26	KECAMATAN KALIORI	99.25	98.86	98.91	99.03
27	KECAMATAN SULANG	99.12	97.84	99.22	98.60
28	KECAMATAN SUMBER	98.14	99.96	98.28	99.09
29	KECAMATAN BULU	99.71	97.47	100.00	98.80
30	KECAMATAN LASEM	98.65	89.55	95.73	93.55
31	KECAMATAN PANCUR	99.61	98.24	99.93	98.87
32	KECAMATAN SLUKE	99.31	99.15	99.19	99.22
33	KECAMATAN PAMOTAN	91.24	94.83	95.93	94.42
34	KECAMATAN GUNEM	96.24	99.70	100.00	98.56
35	KECAMATAN SALE	91.74	91.98	25.64	79.39
36	KECAMATAN KRAGAN	95.68	98.89	99.45	98.22
37	KECAMATAN SEDAN	97.07	94.19	99.49	96.34
38	KECAMATAN SARANG	99.89	97.91	99.50	99.08
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	99.55	90.80	94.63	96.56
40	BAPPEDA	99.67	99.52	99.94	99.58
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	95.11	88.76	90.62	91.47
a	(SKPD)	95.11	88.76	90.62	91.47
b	(PPKD)	-	-	-	-
42	BKD	97.28	84.28	95.00	88.33
	JUMLAH	98.86	90.94	88.23	91.52

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN
REMBANG , TAHUN ANGGARAN 2018



DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

Hari : Senin , 08 Juli 2019

Dibacakan oleh : MOKH. ZAENURI

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN
REMBANG , TAHUN ANGGARAN 2018

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat siang , dan Salam sejahtera bagi kita semua

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.....

Alhamdulillah , Assholatu wassalamu a'laa Rosulillah , Wa a'la alihi Washohbihi wamanwalah..., Laa haula Walaa quwwata Illabillah..., Amma ba'da ...

Yang kami hormati :

- Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan para Camat dilingkungan Kabupaten Rembang.
- Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf.
- Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan, dan semua hadirin yang dimulyakan oleh ALLAH SWT.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian pendapat akhir ini, terlebih dahulu marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ILAHI ROBBI, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai kini, kita masih diberikan kesempatan hadir, pada Rapat Paripurna DPRD ini, dalam keadaan sehat Wal afiat.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan pada junjungan nabi besar kita, MUHAMMAD SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya sampai dihari kiyamat.

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati, serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Mengawali penyampaian pendapat akhir ini, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang, dalam melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2018, dan mengucapkan selamat atas keberhasilannya menyandang predikat WTP, meskipun dari hasil pembahasan, masih banyak adanya catatan kekurangan yang harus diperbaiki dan disempurnakan, terutama untuk pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berikutnya.

Kami sampaikan rasa terima kasih dan apresiasi juga kepada TAPD, yang telah bekerja keras, sehingga penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2018 ini, dapat selesai sesuai dengan jadwal waktu yang direncanakan. Mulai dari Penyampaian nota keuangan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2018 oleh sdr. Bupati, dan juga jawaban pemandangan umum dari Fraksi-fraksi, yang disampaikan oleh sdr. Wakil Bupati pada rapat Paripurna I, tanggal 02 Juli 2019 yang lalu, sampai pada Pembahasan ditingkat komisi bersama OPD, dan juga Banggar bersama TAPD.

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati serta sidang Dewan yang kami hormati,

Sebelum pendapat akhir ini kami sampaikan, perkenankanlah kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menyampaikan beberapa catatan dari hasil pembahasan, sebagai berikut :

1. Dari hasil pencermatan kami, Realisasi Postur APBD Tahun Anggaran 2018, untuk rasio porsi Perbandingan, antara Belanja Tidak Langsung (58,32 %) dengan Belanja Langsung (41,68 %), masih jauh lebih besar, pada Belanja Tidak Langsung, artinya Anggaran masih banyak diperuntukkan pada belanja Pegawai. Sedangkan Anggaran yang diperuntukkan Belanja Modal, untuk Infra Struktur dan Pemberdayaan masyarakat, masih sangat kurang, sehubungan dengan hal tersebut, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, mengusulkan agar Penganggaran ditahun berikutnya, Porsi Belanja Langsung bisa diperbesar, sehingga apa yang menjadi usulan dan harapan masyarakat, dapat segera terpenuhi, yakni penanganan Infrastruktural, baik Sarana prasarana Jalan Umum maupun sarana prasarana yang lainnya.

2. Berkaitan dengan hasil pembahasan catatan Resume dari LHP BPK , yang telah disepakati oleh Banggar dan TAPD , sehingga menjadi Catatan dan Rekomendasi DPRD , sebanyak 15 item , kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mohon, agar Pemkab rembang , segera menindak lanjuti untuk menyelesaikan permasalahan yang termuat di dalam catatan dan rekomendasi dimaksud.
3. Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , mohon dan mengusulkan kepada sdr. Bupati, agar segera memerintahkan TAPD, untuk mempersiapkan penyusunan dan mengajukan Rancangan KUA / PPAS APBD Perubahan 2019, dan KUA / PPAS APBD Induk 2020 , untuk segera ditindak lanjuti , dan dilakukan pembahasan.

Sidang Dewan yang kami hormati.....,

Selanjutnya, kami dari Fraksi Partai persatuan Pembangunan, setelah mencermati dan mengevaluasi terhadap RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 secara keseluruhan, melalui pendapat akhir ini menyampaikan , dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohiim “ **MENERIMA DAN MENYETUJUI** ” RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD Tahun Anggaran 2018 ini , untuk **DITETAPKAN MENJADI** “ PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD Tahun Anggaran 2018.

Demikian Pendapat akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Tentang hasil Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2018 .

Trima kasih atas perhatiannya , dan mohon maaf atas segala kekurangannya.....

Wallahul muwafiq ila aqwamithoriq....., Wassalamu a'laikum Wr..... Wb.....

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Rembang , 08 Juli 2019

KETUA



SUGIHARTO

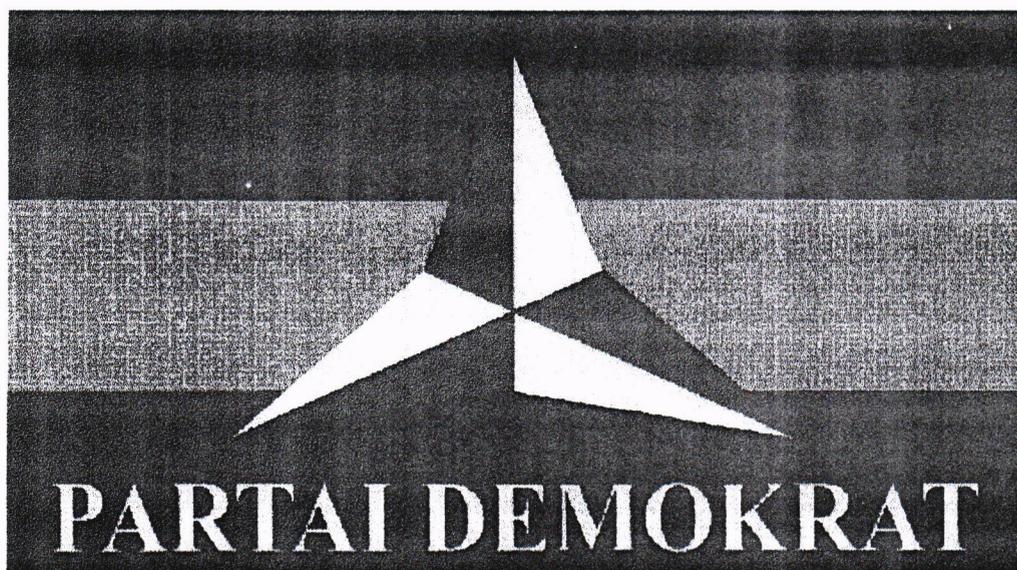
SEKRETARIS



ZAIMUL UMAM NS



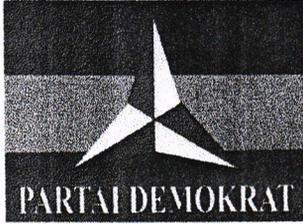
**PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT
TERHADAP HASIL PEMBAHASAN RAPERDA
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018**



**FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Rembang, 8 JULI 2019

Dibacakan oleh : Hj. HIKMAH PURNAMAWATI



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT
TERHADAP HASIL PEMBAHASAN RAPERDA
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018**

SENIN, 8 JULI 2019

Dibacakan oleh : Hj. HIKMAH PURNAMAWATI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
3. FORKOPIMDA Kabupaten Rembang
4. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
5. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
6. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta Staff
7. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia

Mengawali pendapat fraksi ini, kami mengajak kepada hadirin semua marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahNya yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat hadir mengikuti rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi semoga mendapat hasil dan keputusan yang benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Rembang.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat

Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, Kami Fraksi Demokrat **Menerima dan Menyetujui** Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebagai Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Dalam kesempatan yang baik ini pula, kami Fraksi Demokrat memberikan rekomendasi untuk ditindak lanjuti, yaitu :

1. Meningkatkan konsekuensi pelaksanaan APBD Tahun 2018 secara menyeluruh dan profesional.
2. Supaya Saudara Bupati mengoreksi kembali tentang Peraturan Bupati Rembang nomor 13 tahun 2018 tentang perubahan keempat atas peraturan Bupati Rembang nomor 43 Tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial dan Peraturan Bupati Rembang nomor 21 tahun 2018 tentang perubahan keempat atas peraturan bupati nomor 36 tahun 2015 tentang pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dimana dalam kedua peraturan Bupati tersebut ada indikasi pembatasan bila mana diterapkan pada tahun sekarang sudah tidak sesuai dengan harga pasar dengan asumsi kenaikan nilai tukar rupiah.

agar

3. Meningkatkan dan optimalisasi kinerja ASN.

mengoptimalkan.

4. Meningkatkan daya saing Kabupaten Rembang terhadap Kabupaten-kabupaten yang lain dengan jalan memaksimalkan sektor ekonomi masyarakat terutama pada sektor perekonomian kecil dan menengah.
5. Meningkatkan infrastruktur terutama peningkatan jalan serta pelebaran jalan antar desa, antar kecamatan dan jalan jalur ekonomi yang ada di Kabupaten Rembang (sesuai moto dari Bupati jalan tanpa lubang).
6. Menjalankan serta memaksimalkan semua Perda yang sudah disahkan. *Supaya bisa meningkatkan PAD.*

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat

Demikianlah pendapat akhir Fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang serta segenap tamu undangan, kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Rembang, 8 Juli 2019
FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA



EKA SISWA KARTIKA

SEKRETARIS



IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.



Pendapat
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
HASIL PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN 2018

Disampaikan oleh Ilyas

Pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Senin, 8 Juli 2019

Assalamu 'alaikumwrwb.

Yang kami Hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya di lingkungan Pemkab Rembang

Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah; Komandan Kodim Rembang, Kapolres Rembang, Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan Negeri

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta Pejabat di lingkungan Pemkab Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali pendapat fraksi ini perkenankanlah kami menghaturkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT Atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga sampai saat ini kita semua masih bias menikmati karunia dan rahmat-Nya. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW

Sidang Dewan yang kami Muliakan

Selanjutnya kami dari FPKB mengucapkan terima kasih kepada :

1. Pimpinan Rapat Paripurna atas kesempatan yang telah diberikan kepada FPKB untuk menyampaikan Pendapat FPKB terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2018
2. Sekretaris Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang yang telah menyampaikan laporan atas hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2018.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Setelah membaca laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2018, yang disampaikan oleh Sekretaris Badan Anggaran pada tanggal 8 Juli 2019, FPKB bisa memahami laporan tersebut. Namun demikian, FPKB memandang perlu untuk memberikan pandangan, catatan, saran, rekomendasi, ataupun pernyataan terkait Ranperda ini, yaitu :

1. Meskipun BPK telah memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang, namun BPK juga masih menemukan adanya kelemahan system pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan yang mengakibatkan Pengelolaan Aset Sebesar Rp. 18,39 M tidak diyakini kewajarannya. BPK juga menemukan pengelolaan aset tanah hasil reklamasi di Pelabuhan Tanjung Bonang tidak tertib yang mengakibatkan potensi pendapatan sebesar Rp. 32,93 M oleh pihak ke tiga tanpa adanya perjanjian. Dalam hal kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, BPK menemukan belum

- adanya kepatuhan dari Pemkab Rembang yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 2,09 M dalam pelaksanaan belanja modal. Terhadap temuan ini FPKB menekankan agar Pemkab Rembang segera menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK.
2. Realisasi PAD Pemkab Rembang pada APBD TA 2017 adalah sebesar Rp. 300,31M dan pada TA. 2018 sebesar Rp. 296,67 M atau selisih kurang Rp. 3,64 M. Hal ini sungguh disayangkan mengingat PAD sebagai salah satu aspek penilaian kemandirian Daerah yang seharusnya dari tahun ke tahun harus naik justru PAD kita mengalami penurunan. FPKB merekomendasikan agar Pemkab Rembang melakukan langkah-langkah strategis dan sistematis untuk menaikkan target dan realisasi PAD pada Tahun Anggaran yang akan datang.
 3. Terkait realisasi belanja modal sebesar Rp. 309,44 M Dari yang direncanakan sebesar Rp. 350,72 atau selisih Rp. 41,28 M. artinya ada dana sebesar Rp. 41,28 yang seharusnya digunakan untuk pengadaan peralatan dan mesin, pembangunan gedung, jalan, irigasi, jaringan dan pengadaan aset tetap lainnya tidak di manfaatkan sebaik-baiknya. Padahal pembangunan-pembangunan aset-aset tetap ini sangat penting dan berdampak sistemik terhadap laju dan roda pergerakan ekonomi yang pada muaranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. FPKB merekomendasikan agar Pemkab Rembang ke depan membuat terobosan-terobosan untuk meningkatkan realisasi belanja modal.

Rapat Paripurna Dewan yang berbahagia

Demikian beberapa catatan dan rekomendasi dari kami, dan dengan mengucapkan Bismilahirrahmanirrahim, FPKB menyatakan **Dapat Menerima dan menyetujui** "Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 " untuk disahkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

Sidang Dewan yang kami Muliakan

Demikian pendapat Akhir FPKB ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aq Wamittorieq

Wasalammu'allaikum Wr. Wb.

Rembang, 8 Juli 2019

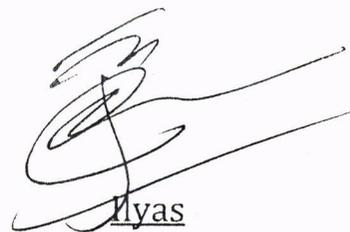
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG



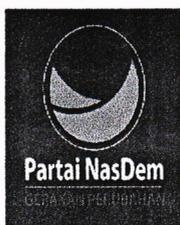
Mohamad Imron

Ketua



Iyas

Sekretaris



**FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

PENDAPAT FRAKSI

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nasional Demokrat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018

Hari / Tanggal : Senin / 8 Juli 2019

Dibacakan oleh :

Assalamu' alaikum Wr, Wb

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Merdeka.....Merdeka.....Merdeka....!!!

Yang terhormat, Sdr Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kab. Rembang

Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA)

Kab. Rembang

Yang Terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Semua Kabag di lingkungan Setda Rembang

Yang terhormat, Ka Dinas, Ka Badan , Ka Kantor dan Camat se- Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Sekretaris DPRD Kab. Rembang, Kabag beserta jajarannya.

Lsm, Rekan Wartawan, Ormas dan semua pihak yang telah hadir pada hari ini yang kami hormati

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Muliakan,

Pada kesempatan yang baik ini marilah kita mengucapkan Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas izin dan nikmatNya lah kita pada hari ini diberikan kesempatan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tentang penyampaian Pendapat Fraksi menanggapi Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018, selanjutnya tak lupa Sholawat beriring salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di Yaumul Akhir nanti.

Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Muliakan,

Menanggapi atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018, kami memahami apa yang ada pada Raperda tersebut, tapi izinkanlah Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem menyampaikan beberapa catatan terkait dengan Raperda tersebut.

1. Dengan diterimanya opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, untuk bisa menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK sehingga pada tahun-tahun yang akan datang Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang bisa mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK tersebut.
2. Untuk refresh kembali terkait pencapaian Pendapatan Daerah yang sudah tercapai 98,31%, agar Pemerintah Kabupaten Rembang melakukan penggalian potensi pendapatan asli daerah, sehingga Pendapatan asli Daerah untuk Kabupaten Rembang bisa ditingkatkan lebih maksimal lagi untuk tahun-tahun kedepan.

Akhir kata dengan mengucapkan Bismillahirohamnirohim, kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem, Menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 menjadi Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018.

Demikian telah kami sampaikan Pendapat Fraksi PDI Perjuangan Nasdem, atas hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, walaupun singkat semoga bermanfaat. Aamiin...

Wabillahi taufiq wal Hidayah

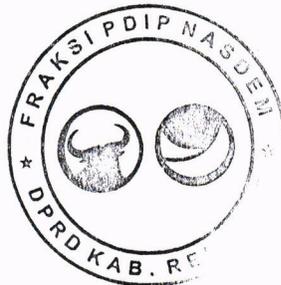
Wassalamu'alaikum Wr, Wb,

Merdeka....Merdeka....Merdeka....

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua


Jasmani



Sekretaris


Ali Ircham, ST

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG

ATAS

RAPERDA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018



REMBANG, 8 JULI 2019



**FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA
(GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG**
Jl.P.Diponegoro No.88 Rembang (0295) 691194 Kode Pos 59251

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG TERHADAP
RAPERDA PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2018**

Disampaikan oleh : Puji Santoso
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Senin 8 Juli 2019

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

SALAM INDONESIA RAYA...

Yang terhormat Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan;
Yang kami hormati Sdr. Para Anggota Forkompimda dan Ketua Pengadilan Negeri
Yang kami hormati Sdr. Para Komandan / Kepala Kesatuan TNI-POLRI
Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah dan Para Pejabat dilingkungan Pemkab.
Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;
Yang Kami hormati Sdr.Paru Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas,
Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali penyampaian pendapat akhir fraksi, dalam kesempatan ini tidak lupa kami mengajak kepada kita semua untuk bersyukur kepada ILLAHI ROBBI atas segala karunia dan nikmat-Nya yang tiada henti. Sholawat dan salam teruntuk Baginda Nabi Muhammad SAW segenap para nabi dan rasul ILLAHI.

Hadirin sidang paripurna yang kami Hormati,

Berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 yang telah didalami pada Rapat-rapat Komisi, Rapat Badan Anggaran bersama dengan TAPD dan telah memunculkan Rekomendasi-rekomendasi yang telah disepakati bersama.

Selain Rekomendasi tersebut, Fraksi Gerindra juga memberikan catatan sebagai bahan evaluasi Pemkab Rembang kedepan.

1. Fraksi Gerindra meminta kepada Bupati Rembang agar memberikan perhatian kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman supaya lebih hati-hati didalam melaksanakan pekerjaan Fisik, karena kami melihat dengan adanya temuan LHP BPK sebesar 1,755 Milyar di 10 pekerjaan Fisik dan rata-rata temuannya berasal dari kekurangan volume pekerjaan. Padahal dari Pekerjaan tersebut telah memiliki Konsultan Pengawas dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Meskipun mereka sudah mengembalikan Kelebihan bayar dan hanya 1 Kontraktor yang sampai saat ini belum menyetorkan ke Kas Daerah, tetapi ini perseden buruk yang seharusnya tidak terjadi. Kedepan kami meminta agar pemerintah Daerah bisa lebih hati-hati agar hal ini tidak terulang kembali.
2. Fraksi Gerindra juga meminta kepada Pemerintah Daerah agar kedepan Tidak ada Pelaksaaan Pekerjaan yang dikerjakan melewati Tahun Anggaran seperti yang terjadi di tahun 2018 yang lalu. Meskipun telah di atur di dalam Perpres untuk perpanjangan waktu selama 50 hari. Fraksi Gerindra mengaharapkan semua Pekerjaan bisa dilaksanakan tepat waktu dalam 1 Tahun Anggaran, yaitu terhitung Bulan Januari sampai Bulan Desember. Pemberian perpanjangan waktu 50 hari kalender itu bukan merupakan Hak dari pihak Ke Tiga, tetapi kewenangan dari PPK yang memberikan tela'ah berdasarkan perhitungannya apakah Pekerjaan tersebut bisa selesai dalam waktu 50 hari atau tidak. Kami Berharap semua Pekerjaan Fisik dengan anggaran besar dan memerlukan waktu pengerjaan yang lama bisa di laksanakan di awal tahun dan maksimal berakhir di Bulan Oktober.
3. Pemerintah Daerah perlu memikirkan anggaran bantuan sosial kepada keluarga miskin yang masih bodoh. Kalau kita mau membasmi kebodohan di Kabupaten Rembang, maka anggar tersebut sangat diperlukan. Karena kebodohan merupakan salah satu rantai permasalahan kemiskinan. Untuk bisa memutuskan rantai kemiskinan diperlukan anak-anak yang cerdas. Sementara Anggaran Basiswa hanya diperuntukan bagi anak-anak yang cerdas saja, sementara anak-anak yang masih bodoh belum mendapat

kesempatan untuk sekolah kejenjang yang lebih tinggi karena keterbatasan biaya.

4. Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti produk-produk Hukum Daerah yaitu Perda yang implementasinya memerlukan tindak lanjut Peraturan Bupati. Misalnya saja Perda tentang Pendidikan.

Bupati, Pimpinan Sidang dan Hadirin yang Kami Hormati,

Demikian pendapat akhir kami, dan dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim kami **dapat menerima dan menyetujui RAPERDA** Pertanggung jawaban ini ditetapkan menjadi **PERDA** Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Rembang Tahun 2018 beserta dengan Rekomendasi-rekomendasinya. Atas segala kekurangan disampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya dan kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT selalu menunjukkan jalan yang benar dan terbaik bagi kita semua. Amiiin Ya Robbal Alamiin...

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

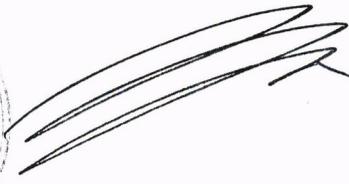
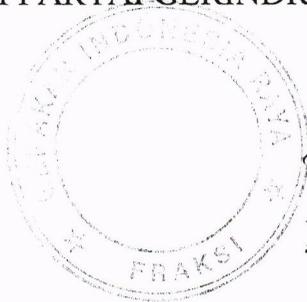
Rembang, 8 Juli 2019

FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD REMBANG



H. CHASANUDDIN

Wakil Ketua



PUJI SANTOSO, SP. MH.

Sekretaris



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Sekretariat: Jl. Diponegoro No 88 Rembang
Telp (0295) 693290



**PENDAPAT FRAKSI KARYA SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN REMBANG**

atas

Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018

Disampaikan dalam Rapat Paripurna

DPRD Kabupaten Rembang

Hari Senin, Tgl. 8 Juli 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Pimpinan rapat dan hadirin yang terhormat.

Marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, rahmah dan berkah kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam suasana yang berbahagia ini.

Setelah melalui pembahasan antara komisi-komisi bersama OPD terkait dan dilanjutkan pembahasan antara TAPD bersama Banggar DPRD maka saatnya kami menyampaikan pendapat Fraksi Karya Sejahtera atas Hasil Pembahasan Raperda Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD TA 2018.

Kami meng-apresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Rembang untuk melaksanakan APBD tahun 2018 walaupun masih banyak kekurangan, maka kami menyampaikan beberapa rekomendasi sbb:

1. Beberapa target pendapatan APBD 2018 banyak tidak tercapai, di harapkan ini penjadikan perhatian bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun target pendapatan pada masa yang akan datang.

2. Kami menyoroti, masih banyak proyek atau kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan spek-nya, contoh material pasir yang dalam spek ditulis menggunakan pasir cepu atau pasir muntitan, tetapi dalam pelaksanaannya digunakan pasir lokal sehingga kualitas atau hasil pekerjaannya jauh dibawah yang diharapkan.
3. Untuk kesekian kalinya kami mengingatkan agar setelah APBD ditetapkan, Saudara Bupati segera mengeluarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan, jangan sampai menggunakan acuan APBD tahun yang lalu, kemudian OPD bersama LPSE membuka pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam bahasa proyek disebut T-1 kegiatan sudah dimulai. Jangan sampai pada pertengahan tahun proses pelelangan baru dilaksanakan yang mengakibatkan molornya pengerjaan proyek/kegiatan serta mengganggu penyusunan APBD Perubahan.
4. Mengenai PT RME (Rembang Migas Energi) kami menengarai adanya perbedaan informasi antara Pemerintah Kabupaten Rembang dengan manajemen PT RME mengenai dana Rp 2 milyar yang dikucurkan dari APBD Kabupaten Rembang. Manajemen RME, pada tanggal 15 April 2019 menjelaskan bahwa Kementerian ESDM sudah menyetujui rencana operasional lapangan migas Randugunting, sementara Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Rembang menyatakan bahwa rencana tsb. masih menunggu petunjuk dari Kementerian ESDM. Jadi dana Rp 2 milyar tersebut belum jelas arah penggunaannya. Dalam kesempatan ini kami minta kepada manajemen PT RME supaya segera melaksanakan kegiatan PT RME.
5. Sekali lagi tentang PT RBSJ yang hingga saat ini belum memberikan deviden kepada Pemerintah Daerah Kabupaten

Rembang. Untuk itu kami mengharap Saudara Bupati memperhatikan hal ini.

6. Sudah sekian lama lalu lintas disepular Pasar Rembang Kota semrawut tak terkendali yang menyebabkan kegiatan pasar terganggu. Mohon tindakan nyata untuk mengatasi kesemrawutan lingkungan Pasar Kota Rembang tsb.

Dengan beberapa rekomendasi tsb. Fraksi Karya Sejahtera menyetujui Raperda Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018 ini ditetapkan menjadi Perda.

Pimpinan rapat dan hadirin yang terhormat.

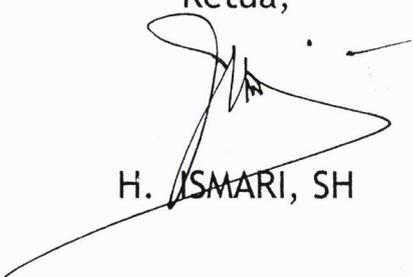
Menutup pendapat fraksi ini, kami sampaikan sesanti “Suradira jyaningrat, lebur dening pangastuti”. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian membangun Kabupaten Rembang.

Amin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Ketua,


H. ISMARI, SH

Sekretaris,


H. JOKO SUPRIHADI, S.H.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI HARAPAN

Sekretariat: Jl. Diponegoro No.88 Rembang



**PENDAPAT FRAKSI HARAPAN
DPRD KABUPATEN REMBANG**

atas

Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Rembang
Hari Senin, tgl. 8 Juli 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Pimpinan rapat dan hadirin yang terhormat.

Mengawali penyampaian pendapat fraksi ini, marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, rahmah dan berkah kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam suasana yang berbahagia ini.

Pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan; Selamat Hari Jadi Kabupaten Rembang yang ke-278 pada tanggal 27 Juli nanti, semoga di usia yang sudah cukup tua ini pemerintah dan warga Kabupaten Rembang senantiasa diberi kekuatan dan pertolongan untuk mewujudkan Kabupaten Rembang yang adil makmur aman sejahtera.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Setelah melalui pembahasan antara DPRD Kabupaten Rembang bersama Pemerintah Kabupaten Rembang, maka tibalah saatn kami menyampaikan Pendapat Fraksi Harapan atas Hasil Pembahasan Raperda Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD TA 2018, sbb.

1. Pengelolaan asset daerah sudah baik sehingga Kabupaten Rembang pada tahun anggaran 2018 mendapatkan predikat atau opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dari pemerintah pusat, karena itu kami mengharapkan agar semua OPD (organisasi perangkat daerah) meningkatkan pengelolaan asset-asset dilingkungannya terutama asset yang berupa tanah dan bangunan agar pada tahun tahun mendatang Kabupaten Rembang mendapatkan opini atau predikat WTP bisa kita pertahankan.
2. Namun ada hal yang masih mengganjal yakni adanya SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang masih cukup tinggi. Kami berharap hal ini tidak terjadi pada tahun-tahun yang akan datang.
3. Pada tahun-tahun terakhir ini, kegiatan/proyek APBD pelaksanaannya molor. Kami berharap hal ini mendapat perhatian serius dari Saudara Bupati dan jajaran Pemerintah Kabupaten Rembang.
4. Mengenai BUMD-BUMD milik Pemerintah Kabupaten Rembang, kami mengharap kinerjanya ditingkatkan sehingga bisa memberikan deviden kepada Kas Daerah atau Pendapatan Asli Daerah.

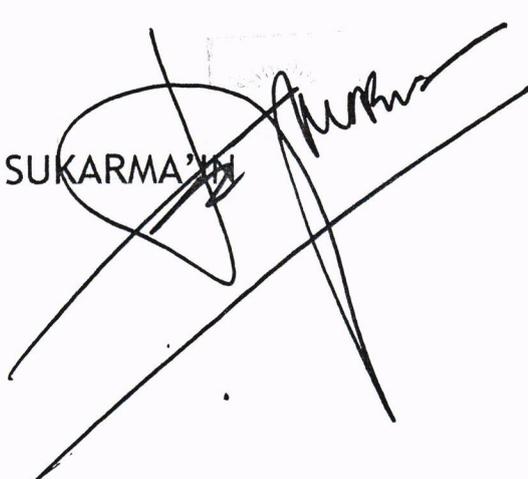
Demikianlah Pendapat Fraksi Harapan atas Pembahasan Raperda tentang Raperda Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD TA 2018. Dengan mengucapkan “alhamdulillah robbil ‘alamiin” Fraksi Harapan menerima Pertanggung-jawaban Bupati atas Pelaksanaan APBD TA 2018 dan ditetapkan sebagai Perda. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga kita senantiasa diberi ridho dan kekuatan untuk membangun Kabupaten Rembang tercinta. Amien.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI HARAPAN

Ketua,

Sekretaris,


SUKARMA, M

SAHNINGSIH, SE



BUPATI REMBANG

**SAMBUTAN BUPATI REMBANG PADA ACARA
PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS HASIL
PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

Tanggal, 8 Juli 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera Untuk Kita semua

- Ykh. - Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang ;
- Ykh. - Wakil Bupati Rembang
- Ykh. - Rekan-Rekan Forkopimda Kab. Rembang;
- Ykh. - Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang ;
- Ykh. - Para Asisten Sekda, Kepala OPD dan Kepala Bagian Sekrerariat Daerah ;
- Ykh. - Para Ketua Partai Politik, Rekan-rekan Wartawan, LSM, dan Hadirin yang berbahagia.

Puji syukur ***Alhamdulillah***, atas segala limpahan rahmat dan karunian-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD, dalam rangka **“Pendapat Akhir Bupati Atas Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 ”** dalam keadaan sehat wal’fiat.

Saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD beserta unsur pimpinan, dan segenap anggota dewan yang terhormat yang telah menunjukkan keseriusannya, mengedepankan sikap arif dan bijaksana dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018.

Berbagai dinamika dalam proses pembahasan telah kita lalui dengan semangat demokrasi, sinergi, dan menjunjung nilai-nilai kebersamaan sehingga Rancangan Peraturan Daerah tersebut, hari ini telah kita setuju bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Semua tanggapan, apresiasi, kritik, saran, dan pendapat yang disampaikan masing-masing fraksi maupun Komisi DPRD selama pembahasan akan menjadi motivasi bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan terhadap masyarakat. Pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan mendorong kemandirian, dan pembangunan menciptakan kesejahteraan.

Rekomendasi-rekomendasi dan hasil evaluasi yang telah diberikan DPRD akan kami tindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Terkait hal-hal yang perlu diperbaiki, kami akan memperbaikinya pada proses perencanaan dan pelaksanaan tahun berikutnya.

Sedangkan hal yang sudah baik kami akan mempertahankan, bahkan akan meningkatkan lagi, untuk mencapai visi kabupaten Rembang yaitu **“Terwujudnya masyarakat Rembang yang sejahtera, melalui peningkatan perekonomian dan sumber daya manusia, yang dilandasi semangat kebersamaan, pemberdayaan masyarakat dan kewirausahaan”**

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada hakekatnya merupakan laporan pelaksanaan tugas-tugas dan program yang sudah dikerjakan pemerintah daerah selama kurun waktu satu tahun.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 merupakan gambaran umum pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2018 dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang.

Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kami atas nama Pemerintah Daerah dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua beserta seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang atas segala dukungan dan kerjasama yang baik selama ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan Forkopimda, Kepala OPD, pimpinan partai politik, wartawan, LSM, dan seluruh masyarakat Kabupaten Rembang.

Kemajuan dan keberhasilan yang telah kita capai ini merupakan rahmat Allah Yang Maha Kuasa, serta buah karya dan hasil kerja keras kita bersama.

Di penghujung pendapat akhir ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersyukur kehadiran Allah SWT, karena sejak proses perencanaan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2018 dapat terlaksana dengan baik dan Pemerintah Kabupaten Rembang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk pertama kalinya. Tentunya kita berharap, dan bertekad, agar setiap tahun kita selalu mendapatkan Opini WTP tersebut.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Demikian Pendapat Akhir atas hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang tahun Anggaran 2018, yang telah kita setuju bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan kepada kita dalam membangun Kabupaten Rembang yang **Mandiri, Aman, Damai, Amanah, Nyaman dan Iman** atau **MADANI**.

Sekian, terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bupati Rembang

H. ABDUL HAFIDZ, SPd.I.



BERITA ACARA

NOMOR : 900 / / 2019

NOMOR : 900 / 32 / 2019

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2018

Pada Hari ini *Jum'at tanggal Delapan bulan Juli Dua Ribu Sembilan Belas* kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **H. ABDUL HAFIDZ** : Bupati Rembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang beralamat di jalan P. Diponegoro No 90 Rembang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. GUNASIH,S.E.** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .
3. **H. BISRI CHOLIL LAQUF** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .
4. **SUMARSIH** : Wakil Ketua Dewah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**
Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Persetujuan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir berita acara ini;
2. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditanda tangani Persetujuan Bersama ini .

Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 8 Juli 2019

BUPATI REMBANG

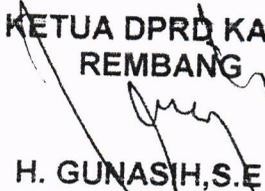


H.ABDUL HAFIDZ, S.P.D.I

**KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG**

H.MAJID KAMIL.MZ.

**WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG**



H. GUNASIH,S.E

**WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG**



H. M. BISRI CHOLIL LAQUF

**WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG**



SUMARSIH



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah, dan rancangan Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama;

b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Persetujuan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

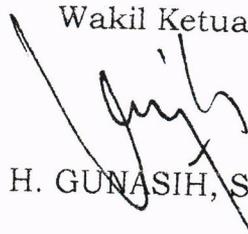
34. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan: 1. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 8 Juli 2019 ;
2. Pendapat akhir Fraksi DPRD Kabupaten Rembang tanggal 8 Juli 2019;
3. Pembicaraan – pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 8 Juli 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran-lampirannya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- KEDUA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini kepada Bupati Rembang;
- KETIGA : Memberikan Rekomendasi kepada Bupati sebagaimana laporan Badan Anggaran untuk ditindaklanjuti;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 8 Juli 2019
DPRD KABUPATEN REMBANG
Wakil Ketua


H. GUNASIH, S.E.